



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN
2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
I.1 LATAR BELAKANG.....	I.1
I.1.1 PENJELASAN UMUM.....	I.1
A Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I.1
B Data Geografis Daerah.....	I.1
C Jumlah Penduduk.....	I.3
D Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan.....	I.6
E Jumlah Perangkat Daerah, Unti Kerja dan pegawai pemerintah.....	I.6
F Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I.9
I.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	I.22
A Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I.22
B Visi Misi Kepala Daerah.....	I.27
C Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I.29
D Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.....	I.35
E Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.....	I.49
I.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	I.53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II.1
II.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	II.1
II.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	II.1
II.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II.1
II.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II.31
II.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.37
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	II.38
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	III.1
III.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN.....	III.1

	III.2	TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN.....	III.4
	III.3	PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	III.4
BAB IV		PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
	IV.1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	IV.1
	IV.2	BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	IV.3
	IV.3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	IV.7
	IV.4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	IV.11
	IV.5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	IV.13
	IV.6	BIDANG URUSAN SOSIAL.....	IV.19
	IV.7	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	IV.22
BAB V		PENUTUP.....	V.1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD ini berisi penjelasan umum kondisi daerah, perencanaan pembangunan daerah, penerapan SPM, tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan dan pencapaian SPM dan capaian pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada tahun anggaran 2020. Seluruh hasil yang dirasakan pada tahun 2020 ini pada dasarnya merupakan hasil kerja kolektif yang telah kami bangun dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Lombok Tengah, DPRD, instansi vertikal, para tokoh masyarakat serta seluruh *stakeholders* lainnya.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan urusan dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Tengah yang lebih beriman, sejahtera dan bermutu (BERSATU).

Praya, Maret 2021,


H. LALUPATHUL BAHRI, S.IP.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah periode 2016 – 2021 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-691 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepala daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Muatan LPPD dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi “hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan”.

I.1.1 PENJELASAN UMUM

A . UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km² (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.792 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2020

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	134	138	140	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	121	128	123	132	132	-	-	-	-	-
3. P u j u t	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	262	269	281	279	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	183	181	181	187	185	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	217	203	203	227	227	-	-	-	-	-
6. K o p a n g	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	116	120	115	117	117	-	-	-	-	-
7. P r a y a	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	82	83	105	88	88	50	50	50	55	59
8. Praya Tengah	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	110	108	107	111	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	135	135	142	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	114	113	112	117	117	-	-	-	-	-
11. Batukliang	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	144	140	145	153	153	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	91	82	90	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	127	127	127	127	127	12	12	12	12	12	1.709	1474	1744	1789	1792	66	66	66	71	71

Sumber: Data Jumlah Dusun / Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat . Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

C. JUMLAH PENDUDUK

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 adalah 1.050.725 jiwa yang terdiri dari 524.007 jiwa penduduk laki-laki dan 526. 718 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 869,52 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020

N o	Kecamata n	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Praya	60.839	63.238	63.000	63.293	61.032	63.843	63.502	63.871	121.871	127.081	126.502	127.164
2	Jonggat	48.620	53.795	53.649	53.906	48.484	54.129	53.815	54.246	97.104	107.924	107.464	108.152
3	Batukliang	41.737	44.040	44.646	44.854	41.723	43.886	44.299	44.523	83.460	87.926	88.945	89.377

No	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
4	Pujut	57.720	57.644	58.196	58.653	58.492	58.511	58.792	59.498	116.212	116.155	116.988	118.151
5	Praya Barat	41.691	40.419	41.093	41.695	42.403	41.054	41.423	41.870	84.094	81.473	82.516	83.565
6	Praya Timur	37.078	36.554	36.699	36.709	37.790	37.076	37.203	37.234	74.868	73.630	73.902	73.943
7	Janapria	43.413	42.516	42.497	42.884	43.708	42.396	42.298	42.550	87.121	84.912	84.795	85.434
8	Pringgarata	38.838	38.311	38.336	38.604	38.130	38.111	38.194	38.410	76.968	76.422	76.530	77.014
9	Kopang	47.211	46.230	46.239	46.432	47.942	46.728	46.696	46.801	95.153	92.958	92.935	93.233
10	Praya Tengah	37.017	36.723	36.965	37.047	37.272	36.972	37.025	37.174	74.289	73.695	73.990	74.221
11	Praya Barat Daya	28.771	28.513	28.704	29.118	29.372	29.102	29.184	29.721	58.143	57.615	57.888	58.839
12	Batukliang Utara	32.210	30.407	30.590	30.812	32.126	30.396	30.714	30.820	64.336	60.803	61.304	61.632
Jumlah		515.145	518.390	520.614	524.007	518.474	522.204	523.145	526.718	1.033.619	1.040.594	1.043.759	1.050.725

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 127.164 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 58.839 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I.3`
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Praya	39.258	39.302	39.224	42.272
2	Jonggat	32.073	34.677	35.078	37.235
3	Batukliang	27.489	28.209	28.574	30.846
4	Pujut	36.049	35.766	36.659	39.100
5	Praya Barat	26.693	25.308	26.043	27.729
6	Praya Timur	24.941	23.711	24.295	25.429
7	Janapria	29.399	27.515	27.677	29.954
8	Pringgarata	25.121	23.898	24.351	25.970
9	Kopang	30.907	29.093	29.467	31.444
10	Praya Tengah	24.134	23.165	23.610	24.877
11	Praya Barat Daya	19.480	18.678	18.896	20.532
12	Batukliang Utara	21.083	19.168	19.623	20.758

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Jumlah	336.627	328.490	333.497	356.046

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 42.272 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 20.532 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.4

Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018 s.d 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	00 - 04	34.284	30.226	34.341	31.478	27.617	3.474	65.762	57.843	65.815
2	05 – 09	50.262	52.141	52.670	47.658	49.464	49.721	97.920	101.605	102.391
3	10-14	45.104	48.002	48.595	42.617	45.618	46.210	87.721	93.620	94.805
4	15 – 19	44.403	44.484	44.269	43.413	42.934	42.395	87.816	87.418	86.664
5	20 – 24	42.630	42.746	43.101	42.885	42.411	42.935	85.515	85.157	86.036
6	25 – 29	45.868	40.601	41.411	49.265	42.871	43.380	95.133	83.472	84.791
7	30 – 34	46.420	43.716	44.252	50.111	48.474	48.563	96.531	92.190	92.815
8	35 – 39	45.280	44.070	44.880	49.252	47.783	48.192	94.532	91.853	93.072
9	40 – 44	38.971	40.827	41.515	39.289	43.275	43.898	78.260	84.102	85.413
10	45 – 49	35.092	35.264	35.393	35.019	33.855	34.001	70.111	69.119	69.394
11	50 – 54	24.668	28.661	28.815	26.593	30.688	30.880	51.261	59.349	59.695
12	55 – 59	22.018	22.209	21.841	22.553	22.384	22.199	44.571	44.593	44.040
13	60 – 64	15.503	17.546	16.543	15.840	18.244	17.446	31.343	35.790	33.989
14	65 – 69	11.750	12.272	11.071	11.462	11.673	10.968	23.212	23.945	22.039
15	70 – 74	7.912	8.905	7.914	7.521	8.508	7.962	15.433	17.413	15.876
16	75+	8.225	8.944	7.396	7.248	7.346	6.494	15.473	16.290	13.890
Jumlah		518.390	520.614	524.007	522.204	523.145	526.718	1.040.594	1.043.759	1.050.425

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.4 dapat dicermati sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.792 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.5
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2020

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	134	138	140	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	121	128	123	132	132	-	-	-	-	-
3. P u j u t	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	262	269	281	279	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	183	181	181	187	185	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	217	203	203	227	227	-	-	-	-	-
6. K o p a n g	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	116	120	115	117	117	-	-	-	-	-
7. P r a y a	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	82	83	105	88	88	50	50	50	55	59
8. Praya Tengah	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	110	108	107	111	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	135	135	142	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	114	113	112	117	117	-	-	-	-	-
11. Batukliang	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	144	140	145	153	153	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	91	82	90	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	127	127	127	127	127	12	12	12	12	12	1.709	1474	1744	1789	1792	66	66	66	71	71

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Berikut kami sampaikan perincian OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
PENUNJANG		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
DINAS DAERAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	B

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
	PINTU	
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	C
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B
BADAN DAERAH		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B
2	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	B
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	B
KECAMATAN		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.6
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	JUMLA H	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	130	10	40	58	22	98	32
2	SEKRETARIAT DPRD	52	0	23	26	3	37	15
3	DINAS PENDIDIKAN	4699	11	392	2102	2194	2612	2087
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	82	2	40	34	6	77	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	57	1	14	37	5	41	16
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	20	0	4	14	2	16	4
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56	3	34	16	3	53	3
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	69	1	11	51	6	30	39
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	126	5	58	56	7	97	29
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	53	1	11	32	9	31	22
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34	0	6	23	5	24	10

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	45	2	6	34	3	33	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	0	7	11	5	16	7
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35	0	9	20	6	18	17
15	DINAS KESEHATAN	981	5	172	711	94	400	581
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	21	0	3	13	5	13	8
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	9	17	5	23	6
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	33	0	8	20	5	20	13
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	68	26	14	22	6	57	11
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	69	14	27	25	3	61	8
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	251	24	161	64	2	211	40
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)	60	0	10	44	6	38	22
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33	0	9	21	3	21	12
24	DINAS PERHUBUNGAN	43	0	14	26	3	37	6
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42	2	19	16	5	28	14
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	0	11	13	5	19	10
27	DINAS PERTANIAN	296	3	81	164	48	200	96
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59	1	19	37	2	40	19
29	DINAS SOSIAL	29	0	7	19	3	21	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	46	0	6	34	6	33	13
31	INSPEKTORAT	69	0	4	45	20	43	26
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	18	0	4	13	1	18	0
33	KECAMATAN BATUKLIANG	19	0	4	14	1	17	2
34	KECAMATAN JANAPRIA	21	0	5	13	3	19	2
35	KECAMATAN JONGGAT	22	0	8	11	3	20	2
36	KECAMATAN KOPANG	24	0	12	11	1	19	5
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	18	0	8	8	2	17	1
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	21	0	10	10	1	13	8
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	44	1	16	25	2	34	10
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	22	0	9	13	0	18	4
41	KECAMATAN PRAYA	94	0	33	60	1	62	32
42	KECAMATAN PRINGGARATA	18	0	5	10	3	12	6
43	KECAMATAN PUJUT	24	0	9	13	2	21	3
44	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4	0	2	2	0	3	1
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	336	5	51	233	47	129	207
JUMLAH		8324	117	1405	4241	2561	4850	3474

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2020

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. REALISASI PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.118.248.698.538,12. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.096.662.043.478,85 atau 98,98%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.7
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.118.248.698.538,12	2.096.662.043.478,85	98,98
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.954.302.747,12	206.330.203.119,85	0,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	61.855.543.137,50	55.498.799.502,42	89,72
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	18.377.106.575,00	16.255.651.949,34	88,46
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.067.928.721,62	10.339.359.321,62	102,70
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.653.724.313,00	124.236.392.346,47	119,86
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.500.902.944.000,00	1.463.851.768.432,00	97,53
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90.268.355.000,00	82.576.143.609,00	91,48
04.02.02	Dana Alokasi Umum	957.311.642.000,00	943.972.250.000,00	98,61
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	453.322.947.000,00	437.303.374.823,00	96,47
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	423.391.451.791,00	426.480.071.927,00	100,73
04.03.01	Pendapatan Hibah	102.546.898.000,00	113.303.114.784,00	110,49
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	87.774.090.791,00	80.094.719.943,00	91,25
04.03.04	Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus	232.768.463.000,00	232.768.463.000,00	100,00
04.03.06	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	302.000.000,00	313.774.200,00	103,90
	JUMLAH PENDAPATAN	2.118.248.698.538,12	2.096.662.043.478,85	98,98

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp61.855.543.137,50 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp55.498.799.502,42 atau 89,72%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.8
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	3.599.999.999,00	3.367.321.310,00	93,54
4.1.1.02.	PajakRestoran	4.200.000.000,00	5.061.542.720,55	120,51
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	87.500.000,00	90.594.741,00	103,54
4.1.1.04.	Pajak Reklame	420.000.001,00	857.868.600,00	204,25
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	16.250.000.000,00	15.883.086.862,00	97,74
4.1.1.07.	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.273.312.455,00	97,95
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	105.000.000,00	205.086.000,00	195,32
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	10.600.000,00	13.750.000,00	129,72
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	312.500.000,00	781.851.560,00	250,19
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.069.943.137,50	10.542.013.258,87	55,28
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	16.500.000.000,00	17.422.371.995,00	105,59
	JUMLAH	61.855.543.137,50	55.498.799.502,42	89,72

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.377.106.575,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 16.255.651.949,34 atau 88,46%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

Tabel I.9
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.277.848.000,00	10.823.848.670,00	88,16
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	102.190.000,00	107.097.000,00	104,80
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	232.944.000,00	99.570.000,00	42,74
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	352.610.375,00	748.048.000,00	212,15
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	159.620.000,00	404.606.500,00	253,48

4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	988.637.000,00	1.302.420.957,00	13 1,74
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.140.352.500,00	237.608.500,00	2 0,84
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	527.825.000,00	246.548.000,00	4 6,71
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	22.300.000,00	12.043.000,00	5 4,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	11.200.000,00	3400000	3 0,36
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	49.632.000,00	10.953.000,00	2 2,07
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	24.259.000,00	0,00
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	437.885.800,00	281.799.100,00	6 4,35
4.1.2.02.15	Retribusi Tera/Tera Ulang	8.654.000,00	4.748.000,00	5 4,86
4.1.2.02.23	RetribusiTempatOlah Raga	68.250.000,00	0,00	0,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.623.532.900,00	1.258.573.903,00	7 7,52
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.375.000,00	123.250.000,00	20 7,58
4.1.2.03.04	Retribusi IzinTrayek	2.250.000,00	3.100.000,00	13 7,78
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	312.000.000,00	563.778.319,34	18 0,70
	JUMLAH	18.377.106.575,00	16.255.651.949,34	88,46

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.067.928.721,62 dan terealisasi sebesar Rp.10.339.359.321,62 atau 102,70 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal dari deviden PT. Bank NTB Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp103.653.724.313,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp124.236.392.346,47 atau 119,86%. Selanjutnya secara lebihrinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.10
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	6.255.424.098,00	9.079.734.815,00	145,15
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	2.969.693.914,35	197,98
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	6.588.851.105,00	5.180.726.986,76	78,63
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	13.621.721.094,88	0,00
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	91.067.509,18	0,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	90.961.595,00	0,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	409.318.275,29	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan dari BLUD	57.565.524.019,00	61.861.680.606,95	107,46
4.1.4.18.	Penerimaan Lain-lain	0,00	146.807.474,06	0,00
4.1.4.19.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	200.000,00	0,00
4.1.4.21.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.22.	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31.693.925.091,00	30.784.480.075,00	97,13
	JUMLAH	103.653.724.313,00	124.236.392.346,47	119,86

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 97,53% atau sebesar Rp. 1.463.851.768.432,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.500.902.944.000,00.

1) Bagi Hasil Bukan Pajak

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 90.268.355.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp. 82.576.143.609,00 atau 91,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.11
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	74.302.857.000,00	69.408.291.903,00	93,41
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.964.569.000,00	4.571.800.258,00	92,09
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	233.453.000,00	560.584.630,00	240,13
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	59.776.491.000,00	56.320.147.364,00	94,22
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9.328.344.000,00	7.955.759.651,00	85,29
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.965.498.000,00	13.167.851.706,00	82,48
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	27.977.000,00	74.493.504,00	266,27
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	14.519.160.000,00	12.305.081.913,00	84,75
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58
	JUMLAH	90.268.355.000,00	82.576.143.609,00	91,48

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 957.311.642.000,00 terealisasi sebesar Rp. 943.972.250.000,00 atau 98,61%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 453.322.947.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 437.303.374.823,00 atau 96,47 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp102.546.898.000,00. Dari target tersebut

teralisasi sebesar Rp113.303.114.784,00 atau 110,49%. Pendapatan hibah IPDMIP merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp2.474.439.784,00 yang dimaksudkan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya berupa Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yg Telah Dibangun, berada pada Bidang Sumber Daya Air.. Pekerjaannya berupa belanja bahan baku bangunan untuk rehab saluran irigasi sekunder dan perbaikan pintu air ditambah upah pekerja pemeliharaan pintu air, upah pekerja harian perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi pada Dinas PUPR, Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif berupa Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan PSETK pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penyuluhan Pertanian berupa pengadaan sekolah lapang bagi para Petani pada Dinas Pertanian. Selain itu terdapat pendapatan hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan financial akibat pandemic covid 19.

Selain itu terdapat hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS)SD dan (BOS) SMP senilai Rp. 107.847.300.000,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 87.774.090.791,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 80.094.719.943,00 atau 91,25%. Terdapat kurang salur pendapatan tahun 2020 sebesar 20% yang tidak di targetkan. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.12
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.273.660.000,00	13.257.051.965,50	86,80
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.392.946.809,00	12.106.701.760,50	78,65
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.500.930.000,00	18.834.108.536,00	101,80
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	63.870.000,00	68.997.588,00	108,03
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	38.542.683.982,00	35.827.860.093,00	92,96
	JUMLAH	87.774.090.791,00	80.094.719.943,00	91,25

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun Target pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp. 232.768.463.000,00, dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 232.768.463.000,00 atau 100,00 %, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.13
Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	24.928.093.000,00	24.928.093.000,00	100,00
4.3.4.01.06.	Dana Desa	207.840.370.000,00	207.840.370.000,00	100,00
	JUMLAH	232.768.463.000,00	232.768.463.000,00	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2. REALISASI BELANJA DAERAH

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.168.825.114.595,87 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 2.093.636.570.402,34 atau sebesar 96,53%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

Tabel III.14

LPPD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARANSETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.168.825.114.595,87	2.093.636.570.402,34	96,53
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.313.283.823.729,59	1.273.805.598.580,30	96,99
05.01.01	Belanja Pegawai	814.796.679.375,59	786.896.290.167,00	96,58
05.01.03	Belanja Bunga	4.767.062.477,00	4.608.264.725,00	96,67
05.01.04	Belanja Hibah	94.518.860.193,00	93.108.933.466,00	98,51
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	1.648.691.000,00	1.642.245.312,00	99,61
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.023.266.000,00	6.416.522.803,00	79,97
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	71.112.933.484,00	62.707.900.977,00	88,18
05.02	BELANJA LANGSUNG	855.541.290.866,28	819.830.971.822,04	95,83
05.02.01	Belanja Pegawai	53.887.307.579,00	67.216.456.932,00	124,74
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	504.735.634.819,60	470.069.329.846,25	93,13
05.02.03	Belanja Modal	296.918.348.467,68	282.545.185.043,79	95,16
	JUMLAH BELANJA	2.168.825.114.595,87	2.093.636.570.402,34	96,53

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 814.796.679.375,59 dan direalisasikan sebesar Rp. 786.896.290.167,00 atau 96,58%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.15
Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5

5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	757.561.482.616,20	736.145.406.167,00	97,17
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	45.959.100.000,00	40.477.467.500,00	88,07
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.353.600.000,000	7.068.000.000,00	96,12
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.010.206.552,81	2.640.985.806,00	87,73
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	912.290.206,58	564.430.694,00	61,87
	JUMLAH	814.796.679.375,59	786.896.290.167,00	96,58

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 4.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.608.264.725,00 atau 96,67% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 51.571.771.897,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 50.311.845.170,00 atau 97,56%, terdapat hibah kepada Instansi Vertikal yakni KPUD, KODIM, POLRES dan Bawaslu dengan anggaran sebesar Rp. 42.050.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 41.900.000.000,00 atau 99,64%.

Selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp. 897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp. 897.088.296,00 atau 100%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Sosial pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.648.691.000,00 dibelanjakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa Tali Asih bagi masyarakat di kawasan pembangunan Sirkuit Moto GP senilai Rp. 600.000.000,00 atau 100% dan pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Quota yang realisasi mencapai Rp1.042.245.312,00 atau 99.39%,

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Rencana anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.023.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.416.522.803,00 atau 79,97%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi bagihasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.16
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	6.185.555.000,00	5.196.822.524,00	84,02
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.837.711.000,00	1.219.700.279,00	66,37
	JUMLAH	8.023.266.000,00	6.416.522.803,00	79,97

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Rencana anggaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp. 318.416.331.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 318.425.441.130,30 atau 100%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi belanja Bantuan ke Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.17
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00
	JUMLAH	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 71.112.933.484,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 62.707.900.977,00 atau 88,18%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk Penanganan dampak penularan COVID-19 senilai Rp. 62.525.150.356,00, bencana alam tanah longsor di Kecamatan Praya Timur, Praya Barat Daya, Praya Tengah dan Janapria senilai Rp. 183.890.000,00 serta pengembalian kas Dana Desa ke kas negara atas dana yang tidak disalurkan keDesa senilai Rp. 220.621,00.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 53.887.307.579,00 dan direalisasikan sebesar

Rp. 67.216.456.932,00 atau 124,74%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja pegawai langsung sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.18
Realisasi Belanja Pegawai Langsung
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.911.013.579,00	22.315.165.950,00	97,40
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.362.348.000,00	10.088.803.000,00	97,36
5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	13.397.496.000,00	28.007.152.102,00	209,05
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	4.527.600.000,00	4.157.385.880,00	91,82
5.2.1.06.	Uang Piket	2.688.850.000,00	2.647.950.000,00	98,48
	JUMLAH	53.887.307.579,00	67.216.456.932,00	124,74

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 504.735.634.819,60 dan terrealisasisebesar Rp. 470.069.329.846,25 atau 93,13%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.19
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.555.501.961,64	28.078.775.205,00	95,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan Material	14.873.946.366,00	14.021.616.747,00	94,27
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.770.396.971,00	88.289.169.837,66	92,19
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.126.138.614,00	24.717.336.395,00	87,88
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.223.286.649,00	3.475.080.407,00	82,28
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.252.805.119,00	5.788.730.421,00	92,58

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.622.600.000,00	1.531.038.000,00	94,36
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	492.722.875,00	448.856.000,00	91,10
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	355.000.000,00	355.000.000,00	100,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	950.576.238,00	865.930.500,00	91,10
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.503.795.370,00	25.833.390.028,00	87,56
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	385.950.000,00	370.775.000,00	96,07
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.001.067.782,00	1.016.706.780,00	50,81
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	415.800.000,00	333.605.000,00	80,23
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.590.583.219,00	18.350.902.219,00	89,12
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi	1.664.787.000,00	1.443.497.000,00	86,71
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	259.631.000,00	240.310.500,00	92,56
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	567.100.000,00	555.145.000,00	97,89
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	61.572.498.100,00	53.208.310.746,31	86,42
5.2.2.23.	Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	140.933.118.521,00	137.953.656.958,15	97,89
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.576.479.545,96	54.168.358.102,13	97,47
5.2.2.28.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	8.825.284.488,00	8.810.425.000,00	99,83
5.2.2.29.	Belanja Perawatan Alat-alat kesehatan	201.565.000,00	197.714.000,00	98,09
	JUMLAH	504.735.634.819,60	470.069.329.846,25	93,13

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 296.918.348.467,68 dan realisasi sebesar Rp. 280.254.302.087,51 atau 94,39%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.20
Realisasi Belanja Modal

Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Modal Tanah	5.965.542.852,36	4.581.679.709,00	76,80
5.2.1.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.508.122.461,25	88.850.102.463,00	102,71
5.2.1.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.426.450.598,07	170.908.742.885,79	96,33
5.2.1.05.	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	12.830.345.346,00	10.015.713.500,00	78,06
5.2.1.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.187.887.210,00	8.188.946.486,00	57,72
	JUMLAH	296.918.348.467,68	282.545.185.043,79	95,16

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

I.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

❖ Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Tingginya angka buta huruf;
- b. Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai;
- d. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata;
- e. Implementasi regulasi pendidikan belum optimal;

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan;
- b. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;

- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan;
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan;
- e. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- f. Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap
- b. Perawatan jalan masih kurang optimal
- c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan
- d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi;
- e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi;
- f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;
- g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten);
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi relatif masih kurang;
- i. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum
- j. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;
- k. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- l. Kurangnya regulasi penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- b. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan,
- c. Kurangnya cakupan pelayanan listrik.
- d. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.
- e. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- f. Belum optimalnya penataan penguasaan lahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Angka kriminalitas relatif masih tinggi;
- b. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi.

6. Sosial

- a. Cakupan layanan bagi PMKS relatif masih rendah;
- b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial;

❖ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
- c. Kesempatan/peluang kerja masih terbatas.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih kurangnya peran lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

3. Pangan

- a. Ketersediaan dan distribusi pangan masih belum merata
- b. Rendahnya diversifikasi pangan
- c. Tata kelola cadangan pangan belum optimal
- d. Sertifikasi pangan segar masih rendah

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase, limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan.
- d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*reduce-Reuse-Recycle*).
- e. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut pengelolaan lingkungan.
- f. Cakupan layanan persampahan masih kurang.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Cakupan layanan Administrasi Kependudukan relatif masih belum optimal;
- b. Updating database kependudukan belum optimal

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di tingkat desa dalam proses pembangunan;
- c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.
- d. Sinkronisasi program desa dan kabupaten belum optimal.

- e. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum optimal.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Cakupan layanan KB belum optimal;
- b. Rata-rata usia kawin pertama perempuan masih rendah.

8. Perhubungan

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
- b. Belum optimalnya cakupan layanan angkutan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Parkir;
- d. Belum optimanya audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penertiban penggunaan dan pemanfaatan gelombang radio;
- b. Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani sinyal telekomunikasi (*blankspot area's*);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik;

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya keunggulan kompetitif koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Masih lemahnya kerjasama dan *networking* antar pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pasar, Teknologi dan permodalan masih belum optimal;

11. Penanaman Modal

- a. Kualitas layanan perijinan dan Investasi belum optimal;
- b. Pengendalian investasi masih belum optimal;
- c. Promosi Investasi Daerah masih kurang.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih minimnya pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi;
- b. Sarana dan Prasarana olahraga masih belum memadai;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan.

❖ Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata;
- b. Kurangnya amenities di kawasan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya promosi wisata;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- e. Atraksi dan event wisata masih kurang.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan terutama pada lahan marjinal; (pindah ke urusan pertanian)
- b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani;
- d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.
- e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani .
- g. Penanganan pasca panen kurang optimal.
- h. Ketersediaan saprodi pertanian belum optimal.

4. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Daya Saing produk Industri masih rendah;
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
- c. Belum optimalnya penataan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) .

5. Transmigrasi

- a. Minimnya kuota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah;
- b. Rendahnya kapasitas calon transmigran.

6. Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih rendah;
- b. Manajemen pengelolaan arsip belum optimal;

❖ **Penunjang urusan pemerintahan :**

1. Integrasi dan sinergisitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;
3. Masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Efektifitas perumusan kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pemerintahan daerah masih kurang optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah;

B. VISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

MISI:

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai

industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di antara pemerintah, swasta, kaum cendekia, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan serta tenaga ahli.

4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah, terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, serta terwujudnya pengawasan yang professional.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

KOD E	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB
A	URUSAN PELAYANAN DASAR
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Program Pendidikan Non Formal
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	Program pembangunan jalan dan jembatan
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
	Program penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	Program pendidikan politik masyarakat
	Program Penanganan Konflik Sosial
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
	pencapaian kinerja dan keuangan
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
	Program Kesiapsiagaan Bencana
	Program Penanganan Bencana Kebakaran
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
6	BIDANG URUSAN SOSIAL
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
B	URUSAN NON PELAYANAN DASAR
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3	BIDANG URUSAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Program Pelayanan Persampahan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
	PENCATATAN SIPIL
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program pengembangan ekonomi pedesaan
	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan
	Program peningkatan pelayanan angkutan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
	pencapaian kinerja dan keuangan
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
14	BIDANG URUSAN STATISTIK
	Program pengembangan data/informasi
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN
	Program persandian daerah
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN
	Program pengelolaan keragaman budaya
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
II	URUSAN PILIHAN
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan budidaya perikanan
	Program pengembangan perikanan tangkap
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA
	Program pengembangan pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN
	Program pengembangan industri kecil dan menengah
6	BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI
	Program Pengembangan dan pembinaan transmigrasi
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN
1	PERENCANAAN
	Program perencanaan pembangunan daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
2	KEUANGAN
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
4	PENGAWASAN
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
6	PEMERINTAHAN UMUM
	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
	Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KOD E	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Sebagai implementasi program Prioritas pembangunan Daerah secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa kegiatan teknis Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

KOD E	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN
I	URUSAN WAJIB
A	URUSAN PELAYANAN DASAR
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 6. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 7. Belanja operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
	b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung sekolah SD/MI 2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI 3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI 4. Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI 5. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 6. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI 7. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI 8. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 9. Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI 10. Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs 11. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs 12. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs 13. Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs 14. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs 15. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs 16. Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs

	<ul style="list-style-type: none"> 17. Pembinaan Pendidikan karakter dan siswa berprestasi SMP/MTs 18. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 19. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs 20. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Inklusi 21. Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar 22. Pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan di Bidang Pendidikan 23. Pembinaan Dewan Pendidikan 24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan 26. Pelaksanaan Tugas Pengawas Akademik dan Manajerial pada satuan pendidikan 27. Dukungan Operasional UPT Dinas Pendidikan 28. Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru
	c. Program Pendidikan Non Formal <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 3. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 4. Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesenian
	d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 4. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Pengembangan Kualitas Literasi dan Numerasi Guru
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN
	a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan puskesmas pembantu 2. Pengadaan puskesmas keliling 3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 5. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Kesehatan 6. Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) 7. Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Tenaga Kesehatan 8. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan 9. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 10. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 11. Supervisi pendataan dan perijinan, pengembangan kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> 12. Pengawasan rencana kerja dan kebijakan pengembangan kesehatan, rencana usulan kegiatan 13. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 14. Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah 15. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin 16. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 17. Pelayanan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (Alkes) 18. Pembangunan Puskesmas 19. Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 20. Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan
	<p>b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2. Revitalisasi sistem kesehatan 3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 4. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi lansia 5. Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) 6. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 7. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 8. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 9. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 11. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 12. Peningkatan imunisasi 13. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 14. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 15. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 16. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 17. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
	<p>c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 4. Pembangunan Sarana Penunjang Rumah Sakit
3	<p>BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
	<p>a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 3. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 4. Pemberdayaan petani pemakai air

	5. Komisi irigasi
	b. Program pembangunan jalan dan jembatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan jalan 2. Pembangunan jalan 3. Perencanaan pembangunan jembatan 4. Penyusunan sistem informasi/ database jalan
	c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 4. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 5. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 6. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
	d. Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan ruang 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian, Pemanfaatan Ruang 3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	e. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat 2. Perencanaan pengembangan Keciptakaryaan
	f. Program penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung kantor
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	a. Program Pengembangan Perumahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan 2. Perencanaan Pengembangan Perumahan 3. Pengelolaan Perumahan Formal
	b. Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan dan Pertamanan 2. Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4. Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Permukiman
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	a. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bhakti Pembaruan) 2. Seminar/Diskusi Wawasan kebangsaan
	b. Program pendidikan politik masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepada Pengurus Partai Politik 2. Pendataan dan Monitoring Kegiatan Ormas, LSM dan Yayasan 3. Penyuluhan Politik kepada Masyarakat 4. Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
	c. Program Penanganan Konflik Sosial

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kewaspadaan Dini 2. Pemantauan Orang Asing 3. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial 4. Pelatihan Ketahanan Bangsa 5. Pemantauan Aliran Kepercayaan
	d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Operasi Penegakan PERDA 2. Kegiatan Penyadaran Penyakit Masyarakat 3. Kegiatan Pengamanan Event-event Daerah 4. Kegiatan Operasi Pemberantasan Pekat 5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja 6. Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan
	e. Program Kesiapsiagaan Bencana <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Penanganan Daerah Rawan Kekeringan 2. Operasional dan Pemeliharaan Pusdatin dan Pusdalops 3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam 5. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
	f. Program Penanganan Bencana Kebakaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 2. Kesamaptan Petugas PMK dan TRC 3. Pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran
6	BIDANG URUSAN SOSIAL
	a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak 2. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 4. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 5. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks trauma 6. Pengembangan Keluarga Harapan (PKH) 7. Pelestarian Nilai Keberintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K4S) di kalangan pelajar dan remaja 8. Biaya Operasional penyaluran RASTRA 9. Pengembangan program SLRT 10. Pemberian bantuan asistensi sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas 11. Pemutakhiran Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
	b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan

	sosial <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2. Verifikasi, validasi data dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
B	URUSAN NON PELAYANAN DASAR
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA
	a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya 3. Pendidikan dan Pelatihan TTG, Tenaga Kerja Mandiri dan Kewirausahaan 4. Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) 5. Penyiapan Pelatihan/ Bimbingan Teknis Sertifikasi dan Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK 8. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 9. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 10. Pelayanan Dokumen Ketenagakerjaan
	b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Peningkatan Kualitas Data Hubungan Industrial (HI) 3. Penyusunan Kegiatan dan Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja 4. Peningkatan Pembinaan, Perlindungan Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Ketenagakerjaan
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan dan Advokasi Perlindungan anak dan Perempuan Korban Kekerasan
3	BIDANG URUSAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan 2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pangan 4. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 6. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia 7. Penyusunan Neraca Bahan Makanan 8. Pelatihan dan Penyuluhan Pengolahan Pangan Alternatif 9. Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan

	10. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah 11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan 12. Pembinaan Kawasan Desa Mandiri Pangan 13. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) 14. Penyusunan Informasi Ketersediaan Pangan Pokok
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Perencanaan Teknis Pertanahan 3. Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang Menimbulkan Polusi 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 4. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan
	b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
	c. Program Pelayanan Persampahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Penataan Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Administrasi kependudukan 2. Pelayanan Dokumen Kependudukan 3. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak 4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Pemanfaatan Data Kependudukan
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	a. Program pengembangan ekonomi pedesaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 2. Pembinaan Pengelolaan BUMDes 3. Pengembangan Usaha Masyarakat Desa 4. Peningkatan dan Pemanfaatan Produk Unggulan Desa 5. Peningkatan Kerjasama Antar Desa 6. Pembangunan Kawasan Perdesaan

	b. Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 3. Pemberdayaan Lembaga Adat 4. Pengembangan Lembaga Sosial Masyarakat
	c. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2. Penataan desa 3. Pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian BPD 4. Perencanaan Pembangunan Desa 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 6. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Keluarga Berencana <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2. Pelayanan KIE 3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 4. Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga 5. Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD 6. Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD 7. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 8. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 9. Pembinaan Kelompok UPPKS 10. Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN
	a. Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan 2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 3. Penataan Lalu Lintas Kawasan 4. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
	b. Program peningkatan pelayanan angkutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Angkutan 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 3. Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 3. Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) 4. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 3. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana KUKM 4. Monitoring, evaluasi dan Validasi data UMKM 5. Pendampingan Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi 6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	b. Program Peningkatan Kualitas Koperasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 2. Pembinaan Kelembagaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi 3. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Ritel Koperasi
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL
	a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Penyelenggaraan Pameran Investasi 4. Penyelenggaraan Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus 5. Pendataan potensi perizinan dan non perizinan
	b. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi Daerah tentang Pelayanan Perizinan 2. Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan 3. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi Muda 4. Pembinaan Pemuda Pelopor dan Pertukaran Pemuda 5. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat 6. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 8. Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetisi pelatih, peneliti, praktisi dan tehnisi olahraga 9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Olahraga 10. Monitoring dan evaluasi perkembangan Olahraga
14	BIDANG URUSAN STATISTIK
	Program pengembangan data/informasi

	1. Pengolahan, Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN
	Program persandian daerah 1. Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN
	Program pengelolaan keragaman budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Penyelenggaraan event budaya daerah 3. Pelestarian kekayaan budaya daerah
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pengembangan minat dan budaya baca 2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 3. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 5. Pelayanan perpustakaan
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN
	a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Peningkatan Keterampilan/Pelatihan Pengelola Arsip 2. Pengklasifikasian Arsip
	b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 2. Penyusutan Arsip Statis 3. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif
II	URUSAN PILIHAN
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
	a. Program pengembangan budidaya perikanan 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 3. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan
	b. Program pengembangan perikanan tangkap 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil 2. Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil 3. Pengembangan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dan Kemitraan Usaha
	c. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA
	Program pengembangan pariwisata 1. Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 2. Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Wisata 3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata 4. Pengembangan statistik kepariwisataan
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN

	<p>a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi/Produktivitas Tanaman Pangan 2. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Pangan 3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan 4. Pengembangan/Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) 5. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 6. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 8. Pengembangan /Pengeloaan kawasan hortipark 9. Peningkatan Produksi/Produktivitas Tanaman Perkebunan 10. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Perlindungan Tanaman Perkebunan 11. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 12. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK) 13. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 14. Pembangunan/Pemeliharaan Sumber-sumber air 15. Pembangunan/Pemeliharaan JUT 16. Fasilitas Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani 17. Pembinaan/Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida dan obat-obatan Pertanian 18. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 19. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 20. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 21. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Partisipatif
	<p>b. Program peningkatan produksi hasil peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuh Kembangan Usaha Peternakan 2. Peningkatan Skala Usaha Kelompok Tani Ternak 3. Pembinaan/Pengawasan Tata Niaga Ternak 4. Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Menular Ternak
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN
	<p>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi Kemetrolgian Legal 2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 3. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah 5. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN
	<p>Program pengembangan industri kecil dan menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis agro 2. Peningkatan sarana produksi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) 3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan mutu produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) 5. Peningkatan promosi produk unggulan daerah 6. Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerajinan
6	BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI
	Program Pengembangan dan pembinaan transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Pemenuhan Sumber Daya Manusia
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN
1	PERENCANAAN
	Program perencanaan pembangunan daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan RPJMD 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 4. Penetapan RKPD 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal 7. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 10. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12. Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 13. Penyusunan indikator ekonomi daerah 14. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 15. Koordinasi Penyelenggaraan tata ruang dan pengembangan wilayah 16. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan 17. Peningkatan Kapasitas aparat perencana 18. Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif (IPDMIP) 19. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 20. Penanganan Pengentasan Kemiskinan Daerah 21. Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan
2	KEUANGAN
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7. Penyusunan Informasi Keuangan Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 10. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 11. Pengelolaan administrasi belanja hibah dan bantuan sosial 12. Pengendalian Anggaran 13. Pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung 14. Manajemen pengelolaan Kasda 15. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan daerah 16. Pelayanan administrasi keuangan pelaksanaan anggaran belanja langsung 17. Pengawasan aset/barang daerah
	<p>a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah 2. Penyediaan dan pengendalian barang kuasi 3. Pendataan dan Pemutahiran Obyek dan Subyek Pajak PBB-P2 dan BPHTB 4. Penyusunan Paket Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Pendataan, Pendaftaran dan Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan dan Penatausahaan Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB 7. Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 8. Pelaporan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 9. Penatausahaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 10. Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Serta PAD Sah 11. Sosialisasi dan Intensifikasi Pemungutan Retribusi Daerah 12. Pendataan, Pendaftaran, Penatausahaan dan Pengembangan Potensi Retribusi Daerah
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	<p>a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
	<p>b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS 3. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 4. Pemberiaan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 5. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 7. Pemetaan Kompetensi Calon/Pejabat Struktural 8. Penyelesaian mutasi Kenaikan Pangkat 9. Penyelesaian Surat keputusan (SK) Pensiun 10. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian

	ijazah 11. Penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami 12. Penyusunan Formasi PNS 13. Penataan Arsip Kepegawaian 14. Evaluasi Kinerja Aparatur 15. Penyelesaian jabatan fungsional
4	PENGAWASAN
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 3. Pembinaan dan Pengawasan yang lebih komprehensif 4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 5. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 6. Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penelitian dan Pengembangan 2. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia 3. Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA) 5. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
6	PEMERINTAHAN UMUM
	a. Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar 2. Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah 3. Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah 4. Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an 5. Penguatan Kelembagaan Rumah Ibadah
	b. Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 2. Penataan Kerjasama Daerah 3. Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah 4. Pengendalian Penanganan Masalah Sosial 5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6. Penanganan Pengaduan Hukum Pemerintah Daerah 7. Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah 8. Publikasi Produk Hukum Daerah 9. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 11. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 12. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) 13. Penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) 14. Evaluasi Badan Usaha Daerah 15. Pembinaan PD. BPR NTB Kabupaten Lombok Tengah

	16. Pengelolaan dan Pengendalian Kebijakan SDA dan SDL 17. Pengawasan dan Penyaluran Pupuk dan Benih Bersubsidi 18. Pemantauan dan Pengawasan Pasca Panen Tembakau 19. Stabilisasi Nilai Inflasi 20. Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi 21. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 22. Penyusunan Instrumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) ASN 23. Penyusunan dan Standarisasi Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah 24. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan dan SOTK Pemerintah Daerah 25. Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah 26. Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah 27. Penyelenggaraan Event-event Daerah 28. Pembinaan Keprotokolan Daerah
	c. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 2. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
	d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
	e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan 1. Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan 2. Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan 3. Pemeliharaan Keamanan dan Kantrantibmas Wilayah Kecamatan 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 5. Pengembangan kapasitas wilayah Kelurahan 6. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum 7. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan 8. Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 9. Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan

E. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 kami sampaikan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

N O	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUA N	RUMUS	TARGET
Misi I : Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal						
A	Meningkatn ya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	A1	Indeks Toleransi	Poin	ndeks toleransi= ⁴ √1(a) X 1(b) X 1(c) X 1(d) Dimana: a = dimensi persepsi b = dimensi sikap c = dimensi kerjasama d = dimensi sikap pemerintah $1 \text{ (dimensi)} = \frac{\sum \text{frekwensi} \times \text{skor}}{\sum \text{frekwensi}}$ Interval nilai indeks: 1-1,7 = Sangat Rendah 1,8 – 2,5 = Rendah 2,6 – 3,3 = Cukup 3,4 -4,1 = Tinggi 4,2 – 5 = Sangat Tinggi Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah.	3,44
1	Terpelihara nya Stabilitas Sosial	1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/ 100.00 0 pendud uk	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/ Jumlah Penduduk x 10.000 (Sumber: lamp. Permendagri No 86 Th 2017 Aspek Daya Saing Daerah No. 9)	85,3

N O	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	RUMUS	TARGET
2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	2	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	Laporan / Rekapitulasi kasus konflik berlatar belakang agama dalam 1 tahun	0
Misi II : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender						
B	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	B1	IPM	point	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X(1) = Indeks harapan hidup X(2) = Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) = Indeks standar hidup layak Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. 10	67,19
		B2	Angka Kemiskinan	%	Jumlah penduduk miskin/ jumlah penduduk x 100%	14,17
		B3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x 100% Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. 19	2,84
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas xi = lama sekolah penduduk laki-laki N = jumlah penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas Sumber: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1039	6,74
		4	Harapan lama sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren Sumber : https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016	13,93
		5	PAUD terakreditasi A	%	Jumlah PAUD terakreditasi A/ Jumlah PAUD x 100 %	1,53
		6	SD terakreditasi A	%	Jumlah SD terakreditasi A/ Jumlah SD x 100 %	6,02
		7	SMP terakreditasi A	%	Jumlah SMP terakreditasi A/ Jumlah SMP x 100 %	11,73
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate / ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian Sumber : https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/48	65,91

N O	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUA N	RUMUS	TARGET
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	9	Angka PMKS	orang	Jumlah PMKS hasil pendataan tiap tahun	1.901
		10	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Angkatan kerja 15 tahun ke atas/ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100% Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. 17	74,23
		11	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	$\frac{\sum_j E_{(ij)}}{E_j P_{(9j)} \cdot q_{(ij)}}$ PPP / Unit =----- Sumber : https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/27	10.030
Misi III : Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas						
C	Meningkatnya Perekonomian Daerah	C1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ r = Laju pertumbuhan ekonomi Y _{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Y _{i(t-1)} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal) Sumber: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/954	6,56
		C2	Indeks Gini	Poin	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})}{k}$ Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. 4)	0,336
6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		$\frac{PDRB_{(t+1)}}{PDRB_{(t)}} \cdot PDRB_{(t)} \times 100\%$ t + 1 = Tahun pengamatan PDRB t = Tahun pengamatan PDRB Tahun sebelumnya	4,47
		13	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ r = Laju pertumbuhan PDRB Sektor akomodasi dan makan inum Y _{it} = PDRB Sektor akomodasi dan makan inum tahun ke-t Y _{i(t-1)} = PDRB Sektor akomodasi dan makan inum ke t-1 (nominal)	8,24
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor	14	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	Indeks yang diterima petani (It) / Indeks yang dibayar petani (Ib) x 100 Sumber:	105,48

N O	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS	N O	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUA N	RUMUS	TARGET
	agraris serta ketahanan pangan				lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Daya Saing Daerah No. 2	
		15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. 28	85,8
Misi IV : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infra Struktur yang memadai						
D	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	D1	Indeks Wiliamson	Poin	$\sqrt{(Y-Y)^2 F_i n}$ Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota	0,40
8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	16	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	Panjang jalan kabupaten yang umurnya sesuai dengan umur teknis tiap tahun / total panjang jalan kabupaten X 100%	77,64
9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITH)	53
		18	Ketaatan terhadap RTRW	%	Realisasi RTRW / rencana peruntukan x 100% Sumber: lamp. Permendagri no 86 Th 2017 Aspek Pelayanan Umum No. 3.2.6	84,36
10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	19	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	Rekapitulasi Luas kawasan kumuh pada tahun yang bersangkutan	23,77
		20	Spot kawasan kumuh	Spot	Rekapitulasi Jumlah spot kawasan kumuh pada tahun yang bersangkutan	2
11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	21	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	Rekapitulasi Jumlah desa yang berubah status dari “desa berkembang” menjadi “desa cepat berkembang” berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa tahun yang bersangkutan	29
Misi V : Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas						
E	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	E1	Nilai EKPPD	Poin	hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri	3,1488
12	Meningkatnya akuntabilitas	22	Nilai SAKIP	Nilai	hasil evaluasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian PAN dan RB	B

N O	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS	N O	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	RUMUS	TARGET
	penyelenggaraan pemerintahan daerah	23	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan setiap tahunnya	2
13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	24	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Sumber : http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis APBD_2011_a.pdf	9,32

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

B. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi

pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :

1) Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik

Kehidupan sosial politik yang kondusif merupakan kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik yaitu melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik dan menurunkan gangguan keamanan kenyamanan dan ketertiban yang diarahkan pada pencegahan konflik antar etnis, peningkatan partisipasi pemilih, pencegahan konflik sosial, penurunan kejadian kriminal serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

2) Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal

Pengamalan nilai-nilai agama dilaksanakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kearifan budaya lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilestarikan agar tidak punah.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal yaitu peningkatan kualitas layanan keagamaan serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada peran aktif rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat, peran aktif lembaga adat dan pelestarian tradisi dan situs budaya.

3) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga berperan penting sebagai pembentukan kepribadian manusia.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yaitu melalui kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun, Pengembangan kurikulum pendidikan, Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal, Pendidikan inklusi pendidikan dasar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan, Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin, Pencapaian SPM Pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, Pembinaan olah raga prestasi, Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan.

4) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakatnya. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan, pembangunan/rehab sarana kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, Layanan kesehatan masyarakat miskin, Implementasi SPM pelayanan kesehatan, Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana, pembinaan keluarga berencana, Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

5) Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS harus dilakukan secara tepat untuk mencegah semakin luasnya kesenjangan sosial. Perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan cakupan layanan PMKS dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kesempatan kerja yang luas dengan terciptanya lapangan usaha, memberikan dampak yang baik bagi penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan dan bidang usaha. Upaya peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja lokal dan penguatan sistem ketenagakerjaan daerah, dan pembinaan transmigran.

6) Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata yang cukup banyak didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai merupakan modal besar pariwisata. Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki daya tarik cukup besar baik yang berupa wisata alam maupun wisata budaya.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Kemudahan berinvestasi adalah upaya perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam mempermudah peluang investasi.

Upaya yang dilakukan dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pariwisata, peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan, pemberdayaan UMKM dan IKM, promosi investasi dan peningkatan kualitas layanan investasi, perijinan dan non perijinan.

7) Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris

Sektor agraris dalam arti luas selain pertanian, perkebunan dan peternakan termasuk didalamnya perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sector agraris dilakukan melalui penerapan panca usaha pertanian, peningkatan kapasitas petani, peningkatan kualitas layanan irigasi, peningkatan populasi ternak, penataan kawasan pertanian dan perikanan unggulan, peningkatan

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan yang diarahkan pada produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), populasi ternak, produksi perikanan, serta konsumsi protein dan energy.

8) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan LaLu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Infrastruktur yang baik dan berkualitas akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sector-sektor pembangunan lainnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan LLAJ dilakukan melalui peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan layanan angkutan.

9) Penataan ruang dan lingkungan hidup

Perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk akan membawa konsekuensi pada pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Strategi ini dilakukan dalam rangka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan dalam penataan ruang dan lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian dampak pencemaran lingkungan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber mata air.

10) Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat untuk dapat tinggal di lingkungan nyaman, aman dan sehat dan tahan bencana.

Upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan perumahan, peningkatan/pembangunan rumah keluarga miskin, penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman, peningkatan kualitas layanan persampahan dan peningkatan ketangguhan bencana.

11) Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif

Kawasan perdesaan merupakan daerah penyangga kawasan perkotaan. Pembangunan kawasan perdesaan harus dilakukan seiring dengan pembangunan kawasan perkotaan dalam rangka pemerataan pembangunan dan untuk mencegah kesenjangan antar kawasan.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif dilakukan melalui pengembangan ekonomi perdesaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

12) Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government

Untuk meningkatkan good governance tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan dan asset daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Selain itu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan upaya peningkatan kualitas layanan adminduk, peningkatan layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan serta penyediaan data dan informasi pembangunan daerah.

13) Peningkatan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam peningkatan kualitas pengelolaan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian indikator kinerja makro Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 s.d 2020 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

N O	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,36	66,43	0,07 (0,10%)
2	Angka Kemiskinan	13,63	13,44	-0,19 (-1,39 %)
3	Angka Pengangguran	2,44	3,74	1,3 (53,27 %)
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,06	-6,68	(-264%)
5	Pendapatan Perkapita	13.087.522	11.182.179	-14,56 %
6	Ketimpangan Pendapatan (Guni Ratio)	0,312	NA	-

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah

II.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Disamping itu berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi mengatur tentang fungsi penunjang urusan yang menjadi fungsi dari beberapa OPD. Operasionalisasi penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Capaian penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang urusan yang menjadi peran beberapa OPD di Kabupaten Lombok Tengah serta urusan pemerintahan umum Tahun 2020 dalam bentuk capaian indikator kinerja kunci keluaran dan capaian indikator kinerja kunci Hasil tahun 2020 sebagai berikut:

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	1	1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	323	Disdik

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	38.607	Disdik
			3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.607	Disdik
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD		Disdik
			5	Jumlah pendidik pada PAUD	12.616	Disdik
			6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau serjana (SI) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	565	Disdik
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	185	Disdik
		2	1	Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	649	Disdik
			2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	SD= 91.151 MI= 23.774	Disdik
			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	SMP= 25.720 MTs= 17.355	Disdik
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	SD=91.151 MI= 23.774	Disdik
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya	SMP= 25.720 MTs= 17.355	Disdik

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			pendidikan		
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	114.925	Disdik
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	43.075	Disdik
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.318	Disdik
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah pertama	2.449	Disdik
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	5.318	Disdik
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2.449	Disdik
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	799	Disdik
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	594	Disdik
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana(SI) dan sertifikat pendidik	2.237	Disdik
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau serjana (SI) dan sertifikat pendidik	965	Disdik
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah (D-IV) atau SI sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	550	Disdik
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	82	Disdik
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Disdik

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Disdik
			1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	72	Disdik
			2	Jmlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	12.283	Disdik
			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.283	Disdik
			4	Jumlah kebbutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	12.283	Disdik
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	172	Disdik
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	121	Disdik
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	82	Disdik
			8	Jumlah Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki Ijazah D-IV atau S1	60	Disdik
2	Kesehatan	1	1	Jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4	Dikes
		2	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasi	1	Dikes
		3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	183	Dikes
		4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan	183	Dikes

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				untuk pelayanan persalinan sesuai standar		
		5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Neonatal, Esensial sesuai standar.	183	Dikes
		6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Dikes
		7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.		Dikes
		8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Dikes
		9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Dikes
		10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dikes
		11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Dikes
		12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Dikes
		13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dikes
		14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dikes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Dikes

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				sesuai standar.		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	327.23 Ha	Disperkim
			2	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	28.39 Ha	Disperkim
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (HA)	6.7 Ha	Disperkim
			4	Panjang pantai di kawaasan permukiman yang rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	4.85 Km	Disperkim
			5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan /oa pengelolaan SD air WS kewenanga kab/kota	Ada	Dis. PUPR
			6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota	Ada	Dis. PUPR
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada	Dis. PUPR
		2	1	-		
		3	1	Persentase panjang jaringan irigrasi primer kondisi baik	60 %	Dis. PUPR
			2	Persentase panjang jaringan irigrasi sekunder dalam kondisi baik	65 %	Dis. PUPR
			3	Persentase panjang jaringan irigrasi tersier dalam kondisi baik	100%	Dinas pertanian
		4	1	Penetapan dokumen RISPAM kab/kota (ada/tidak)	Ada	Dis. PUPR
			2	tersusun dan di tetapkannya JAKSTRADA kab/kota (ada/tidak)	Ada	Dis. PUPR
			3	Jumlah BUMD dan/uptd kab/kota penyelenggara spam (ada/tidak)	Ada	Dis. PUPR
			4	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha utk melakukan penyelenggara	0	DPMP TSP

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				spam		
			5	Jumlah kerjasama penyelenggara SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain		Dis. PUPR
		5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat unntuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	3.136 Unit	DLH
			2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T	-	DLH
			3	Jumlah rumah tangga akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T		DLH
			4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	DLH
			5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolaan lumpur tinja	-	DLH
			6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	DLH
			7	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan SPALD S akses dasar	-	DLH
			8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	3.136 Unit	DLH
			9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	-	DLH
			10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	-	DLH
			11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	1 Unit	DLH
			12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1 Unit	DLH
			13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	-	DLH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			14	kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	DLH
		6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dis. PUPR
			2	Jumlah IMB yang di berikan oleh pemerintah kab/kota dalam tahun eksisting	241	DPMPTSP
			3	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan/gedung (ada/tidak)	Ada	Dis. PUPR
			4	Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang tim ahli bangunan / gedung (ada/tidak)	Tidak ada	Dis. PUPR
			5	Jumlah bangunan gedung yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota utk dilindungi dan dilestarikan		Disparbud
			6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota utk kepentingan strategis daerah provinsi	17	BPKAD
			7	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota	67	BPKAD
			8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang di pelihara / dirawat	66	BPKAD
		7	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	809.879 KM	Dis. PUPR
			2	Panjang jalan yang dibangun	0 km	Dis. PUPR
			3	Panjang jembatan yang dibangun	0	Dis. PUPR
			4	Panjang jalan yang di tingkatkan (sturktur/fungsi)	1 km	Dis. PUPR
			5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dis. PUPR
			6	Panjang jalan yang di rekonstruksi/direhabilitasi	0	Dis. PUPR
			7	Panjang jembatan yang di rehabilitasi	0	Dis. PUPR
			8	Panjang jalan yang di pelihara	228.05 KM	Dis. PUPR
			9	Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dis. PUPR
		8	1	Jumlah pelatihan tenaga ahli	0	Dis. PUPR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				konstruksi di wilayah kabupaten/kota		
			2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten /kota		Dis. PUPR/disperkim
			3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		Dis. PUPR/disperkim
			4	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termuktakhir	ada	ULP setda
			5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/kota	ada	ULP setda
			6	Tersedianya dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	ULP setda
			7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	ULP setda
			8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termuktakhir secara berkala	Ada	ULP Setda
			9	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi kab/kota	Tidak ada	Dis. PUPR
			10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri	Tidak ada	Dis. PUPR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				yang membidangi jasa konstruksi , asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		
			11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi analisis		Dis. PUPR
			12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisi wilayah kab/kota		Dis. PUPR
			13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota		Dis PUPR
			14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dis. PUPR
			15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis ,sifat, klasifikasi,layanan usaha bentuk dan atau dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi keewenangan pengawasannya		Dis. PUPR
			16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dis. PUPR
			17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi ,layanan usaha bentuk dan kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dis. PUPR
			18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah kab/kota		DPMPTSP
			19	Jumlah usaha perseorangan		DPMPTSP

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		
			20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota		DPMPTSP
			21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota		Dis. PUPR
			22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	161 IUJK 34 TDUP	DPMPTSP
			23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat klasifikasi layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dis. PUPR
			24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dis. PUPR
			25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat klasifikasi layanan usaha bentuk dan kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Dis. PUPR
4	Perumahan Rakyat	1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Disperkim
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	115 unit	BPBD
			3	Jumlah rt ,kk dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	115 kk	BPBD
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	BPBD
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang di bangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	BPBD
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	BPBD

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	BPBD
			8	Jumlah rt, kk dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	115 kk	BPBD
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Disperkim
		2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	120	Disperkim
			2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkim
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	120	Disperkim
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkim
			5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	120	Disperkim
			6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	17.133 m2	Disperkim
		3	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	81,07 ha	Disperkim
			2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1881	Disperkim
			3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14,86 ha	Disperkim
		4	1	Jumlah rumah di kab/kota	235.217 unit	Disperkim
			2	Jumlah unit PK RTLH	1881	Disperkim
			3	Jumlah rumah tidak layak	64.847	Disperkim

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				huni		
			4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Disperkim
			5	Rasio rumah dan KK	0,92	Disperkim
		5	6	Jumlah rumah pembanguna baru	300	Disperkim
			1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	41	Disperkim
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Disperkim
			3	Jumlah unit rumah yang difasilitasi jalan lingkungan		Disperkim
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / of site)		Disperkim
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Disperkim
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	39.265 unit	Disperkim
			7	Jumlah pengmbang yang terfasilitasi	41	Disperkim
			8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	41	Disperkim
			9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Disperkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibun dalam kab/kota yang ditangani	40 kasus	Satpol PP
			2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	Satpol PP
			3	Jumlah perda dan perkara yang ditegakkan	4 perda	Satpol PP
			4	Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 orang	Satpol PP
			5	Tersedianya sop dalam penegakan perda perkara serta penangana gangguan trantibun	1 SOP	Satpol PP
			6	Tersedianya sarana prasarana minimal	100%	Satpol PP
		2	1	-		
		3	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
			2	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD
			2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD
			3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD
			5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalop peanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD
			6	Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	BPBD/ DISKOP UKM
		5	1	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD
			2	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD
			3	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD
			4	Presentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	BPBD
		6	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dikabupaten/ kota	1	BPBD
			2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, saran prasarana penyelamatan dikantor kecamatan	tidak ada	BPBD
			3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang	Tidak ada	BPBD

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				dilaksanakan secara bergatian (shift) dikantor kecamatan		
			4	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi disetiap kelurahan/desa	Tidak ada	BPBD
			5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		BPBD
			6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran		BPBD
			7	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan dinas pmdam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	BPBD
			8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pmdam kebakaran	3 orang	BPBD
6	Sosial	1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	22 Layanan dan Pengaduan	Dinsos
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlanatar dan gepeng yang akan masuk dalam data terpadu FM dan OTM	35.216 Orang	Dinsos
			3	Jumlah tim reaksi cepat yang di bentuk	1	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	70 Orang	Dinsos
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Unit	Dinsos
			6	Jumlah penyandang	2.200	Dinsos

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinsos
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	426 Orang	Dinsos
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	50 Orang	Dinsos
			10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinsos
			11	Jumlah paket pembekalan kesehatan yang tersedia	50	Dinsos
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket pembekalan kesehatan	50	Dinsos
			13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos
			14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	7 Orang	Dinsos
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial rumah singgah/shelter dan/ atau pusat kesejahteraan social	1.154 orang	Dinsos
			16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	20 Kali	Dinsos
			17	Jumlah penyandang	12	Dinsos

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				disabilitas terlantar,anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	12 Orang	Dinsos
			19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	10 Orang	Dinsos
			20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	57 Orang	Dinsos
			21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	22 Orang	Dinsos
		2	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	457 Orang	Dinsos
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	22 Orang	Dinsos
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsos
			4	Jumlah paket pemakanan khusus bagi kelompok rentan	126 Orang	Dinsos
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinsos
			6	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawwan sosial yang tersedia	68 Orang	Dinsos
7	Tenaga Kerja	1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	Disnakertran

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Disnakertran
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Disnakertran
		2	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster		Disnakertran
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	Disnakertran
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16%	Disnakertran
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	38	Disnakertran
			5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	41 %	Disnakertran
			6	Jumlah penganggur yang dilatih	1685	Disnakertran
			7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	1633	Disnakertran
			8	Persentase penyerapan lulusan	90%	Disnakertran
			9	Lulusan besertifikat kompetnensi	809	Disnakertran
			10	Jumlah calon pekerja indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnakertran
			11	Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI)/ Calon tenaga kerja indonesia (CTKI)	0	Disnakertran
		3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peninngkatan produktivitas		Disnakertran
			2	Data tingkat produktivitas total		Disnakertran
		4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	4,23%	Disnakertran
			2	Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja sama PKB	0,18 %	Disnakertran
			3	Rekpitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,SP/SB di perusahaan yang tercatat SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	9	Disnakertran
			4	Persentase perusahaan yang	0	Disnakertran

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				sudah menyusun struktur skala upah		
			5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	49%	Disnakertran
			6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3,13	Disnakertran
			7	Jumlah mogok kerja	0	Disnakertran
			8	Jumlah penutupan perusahaan	13	Disnakertran
			9	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnakertran
			10	Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1 perusahaan	0	Disnakertran
			11	Jumlah perselisuhan PHK	10	Disnakertran
			12	Jumlah pekerja buruh yang ter- PHK	45	Disnakertran
			13	Jumlah perselisihan yang terselesaikan melalui perundingan bipartite	5	Disnakertran
			14	Lembaga kerja sama (LKS) Tripartit kab/kota yang diberdayakan	0	Disnakertran
			15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui prjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	11,7%	Disnakertran
		5	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten /kota	2088	Disnakertran
			2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.619	Disnakertran
			3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	9	Disnakertran
			4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		Disnakertran
			5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	1	Disnakertran
			6	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja lokakl dalam suatu wilayah kab/kota	10	Disnakertran
			7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenaga kerjaan kab/kota	0	Disnakertran

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			8	Jumlah penempatan kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (sisnaker)	0	Disnakertran
			9	Jumlah pkerja migran indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisai	2194	Disnakertran
			10	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI)/ caloon tega kerja imdonesia (CTKI) yang terdata	2194	Disnakertran
			11	Jumlah calon yang terdata migran indonesia (CPMI) /calon tenaga kerja indobnesia (CTIKI) yang mendapat fasilitasi kepulauan	192	Disnakertran
			12	Jumlah calon yang terdata migran indonesia (CPMI) /calon tenaga kerja indobnesia (CTIKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	0	Disnakertran
			13	Data pemberdayaan pekerja migran indonesia (PMI)/tenaga kerja indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnakertran
			14	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang di bentukan.	1	Disnakertran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilaih PUG	20 OPD	DP3AKB
			2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		DP3AKB
		2	1	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota	37	HUMAS SETDA
			2	Jumlah lembaga layanan anak yanag telah memiliki standar pelayanan minimal	3 LEMBAGA	DP3AKB
			3	persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DP3AKB

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		DP3AKB
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ Fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)		DP3AKB
		3	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan	23	DP3AKB
			2	jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih	36	DP3AKB
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat bantuan		DP3AKB
			4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kota		DP3AKB
			5	Jumlah kebijakan atau program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 PERDA	DP3AKB
			6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	DP3AKB
			7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.	100	DP3AKB
9	Pangan	1	1	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada (Peraturan bupati no.18a tahun 2017 tentang pengelolaan cadangan pangan)	Dinas ketahanan pangan
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	341.450 ton	Dinas ketahanan

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
					beras melalui 6 LUPM (lembaga usaha pangan masyarakat)	pangan
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas ketahanan pangan
			4	Terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Dilaksanakan melalui 33 kelompok	Dinas ketahanan pangan
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	Dinas ketahanan pangan
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	0 (tidak ada desa rawan pangan)	Dinas ketahanan pangan
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Penyaluran sebanyak 2,7 ton	Dinas ketahanan pangan
			8	Terlaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada /terlaksana	Dinas ketahanan pangan
10	Pertahanan	1	1	SK izin lokasi yang yang di terbitkan oleh bupati/wali kota	4	Disperkim
			2	SK Bupati/Wali kota tentang penetapan tanah objek landerpoom yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum /absente dan daftar subyek	Tidak ada	Disperkim
			3	SK bupati/wali kota tentang penempatan besarnya ganti rugi kepada bekas milik tanah kelebihan maksimum/absente	Tidak ada	Disperkim
			4	Dokumen izin membuka tanah	Tidak ada	Disperkim
			5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kab/kota.		Disperkim
11	Lingkungan Hidup	1	1	Indeks kualitas air (IKA)	16.845	DLH
			2	Indeks kualitas udara (IKU)	27.910	DLH
			3	Indeks tutupan hutan (ITH)	22.791	DLH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	1	Tersediainya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	25% (155.855 M3)	DLH
		3	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	133	DLH
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	1:7.762	DLH
			3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	-	DLH
			4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	DLH
			5	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani.	8 Usaha	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	Penerbitan akta perkawinan	112.423	Disdukcapil
			2	Penerbitan akta perceraian	34	Disdukcapil
			3	Penerbitan akta kematian	880	Disdukcapil
			4	Penerbitan data kependudukan.	2 dokumen	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama anatar desa	0 Desa	DPMD
			2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	DPMD
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	80 lembaga	DPMD

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	2 desa	DPMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang diperdakan	TIDAK ADA	DP3AKB
			2	Media usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19.39 TH	DP3AKB
			3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesifik fertiliti rate ASFR 15-19)	TIDAK ADA	DP3AKB
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK (advokasi dan KIE)	73%	DP3AKB
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	27	DP3AKB
		2	1	Persentase fasilitas kesehatan (FASKES) yanag siap melayani KB MKJP	173	DP3AKB
			2	persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	29.93%	DP3AKB
			3	pemerinntah daerah provinsi yang memiiki kelompok kerja KKBPK yang efektif	2	DP3AKB
			4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	781 KASUS	DP3AKB
		3	1	Persentase kesertaan KB di kabupate dan kota dengan kesertaan rendah	4.9	DP3AKB
			2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI).	41.16	DP3AKB
15	Perhubungan	1	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c	35,29 %	Dishub
			2	Terlaksanakannya pelayanan uji berkala	7039 (203 %)	Dishub

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100 %	Dishub
			4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	100 %	Dishub
16	Komunikasi dan Informasi	2	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	29,54%	Diskominfo
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang di sediakan Dinas Kominfo	6,81%	Diskominfo
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	2,27%	Diskominfo
		3	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo NO,5/2015	6,8 % 1) Youtube Diskominfo Lombok Tengah (https://www.youtube.com/channel/UCWztyVHbeKnvGzT20kc779g)	Diskominfo
			2	persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	72% 2) https://lomboktengahka	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
					b.go.id/ domain (ada 32 instansi	
			3	Persentase perangkat daerah yang mengimplentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan	100%	Aplikasi PPID Diskominfo
			4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70%	Diskominfo
			5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	69%	Diskominfo
			6	Persentase elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	7%	Diskominfo
			7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Aplikasi PPID Diskominfo
			8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100% (44 OPD)	Diskominfo
			9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah	11% (4 OPD)	Diskominfo
			10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	72% (32 OPD)	Diskominfo
			11	Persentase data dapat berbagai pakai	60%	Diskominfo
			12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	69%	Diskominfo
			13	Persentase ASN pengelola	25% (8	Diskominfo

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				TIK yang di sertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo	pegawai)	
			14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%	JDIH (BAGIAN HUKUM)
		3	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota	11,36 %	Diskominfo
			2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 konten	Web .loteng Diskominfo
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi s (STRAKOM) dan SOP yang telah di tetapkan.	0	Diskominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang di terbitkan untuk koperasi dengan wilayah anggota dalam daerah kab/kota	40%	Diskop UKM
			2	Persentase fasilitasi penerbit izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	100%	Diskop UKM
			3	Presentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untik koprasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80%	Diskop UKM
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		Diskop UKM

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			5	Persentase koprase yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	19%	Diskop UKM
			6	Persentase jumlah anggota yang telah megikuti pelatihan perkoperasian untuk koprase dengan wilah keanggotaan dalam daerah kab/kota	8 %	Diskop UKM
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggaraakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koprase dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	26%	Diskop UKM
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Diskop UKM
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikst nomor induk koperasi (nik) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	47%	Diskop UKM
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Diskop UKM
			11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19%	Diskop UKM
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasillitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34%	Diskop UKM
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19%	Diskop UKM
		2	1	Rasio pertumbuhan	4,72%	Diskop UKM

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				wirausaha baru yang berskala mikro		
			2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ods)	1,42%	Diskop UKM
			3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		Diskop UKM
			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,11 %	Diskop UKM
			5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0,61%	Diskop UKM
			6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	0,31%	Diskop UKM
			7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan.	0	Diskop UKM
18	Penanaman Modal	1	1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTSP
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTSP
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	1 keg	DPMPTSP
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		DPMPTSP
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3159	DPMPTSP
			9	Laporan realisasi penanaman modal	ada	DPMPTSP
			10	Pembinaan apatur penanaman modal tingkat	0	DPMPTSP

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				kabupaten/kota		
			11	Pembinaan penanaman modal pma dan pmdn	1 dok	DPMPTSP
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota.	ada	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	62 Orang	DISPORA
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	5 Orang	DISPORA
		2	1	Jumlah pemuda yang mendapat kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	60 Orang	DISPORA
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaa yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	DISPORA
		3	1	Jumlah pelatihan olahraga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	0	DISPORA
			2	Jumlah penyelenggaraan event or prestasi tingkat daerah.	2 event	DISPORA
20	Statistik	1	1	Tersediannya buku profil daerah	Tidak ada	Diskominfo
			2	Jumlah suevey statiatik sektoral yang dilakukan	32 OPD dan 12 instansi vertikal	Diskominfo
			3	Jumlah kompilasi stistik sektoral yang di lakukan	1 (Lombo k tengah dalam data dan KCA)	Diskominfo
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari bps	32 OPD dan 12 instansi vertikal	Diskominfo
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari bps	1 (Lombo k tengah dalam data dan KCA)	Diskominfo
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	97 %	Diskominfo

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik.	97%	Diskominfo
21	Persandian	1	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 %	Diskominfo
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	05%	Diskominfo
			3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	Diskominfo
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan.	3%	Diskominfo
22	Kebudayaan	1	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, peyelamatan dan publikasi)	10	Disparbud
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan kebegaragaman)	0	Disparbud
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimaafatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	10	Disparbud
			4	Jumlah sdm, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas	20	Disparbud

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		<div>tata kelola)</div> <div>5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencataatan, pemeringkatan, penghapusan)</div> <div>6 Perlindungan cadar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaraan)</div> <div>7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi dengan dukungan data</div> <div>8 Pemanfaatan cagar budaya provinsi penelitian, sosial adaptasi</div> <div>9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)</div> <div>10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum</div> <div>11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan</div> <div>12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota</div> <div>13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya</div> <div>14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi</div> <div>15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya</div> <div>16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman</div> <div>17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota</div> <div>18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman</div> <div>19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan</div>	<div></div> <div>20</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>10</div> <div>0</div> <div>0</div>	<div></div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div> <div>Disparbud</div>

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				masyarakat.		
23	Perpustakaan	1	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,25	Dis. Perpus Arsip
			2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,028	Dis. Perpus Arsip
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,002	Dis. Perpus Arsip
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar perpustakaan	0,036	Dis. Perpus Arsip
			5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12 kali	Dis. Perpus Arsip
		2	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	5	Dis. Perpus Arsip
			2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dis. Perpus Arsip
			3	Jumlah koleksi budaya etnis nusntara yang tersimpan dan / atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item).	21	Dis. Perpus Arsip
24	Kearsipan	1	1	Persentase aktif yang telah dibuatkandaftar arsip	100 %	Dis. Perpus Arsip
			2	Persentase aktif in aktif yang telah dibuatkakan daftar arsip	90 %	Dis. Perpus Arsip
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	Dis. Perpus Arsip
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam sikn melalui jikn	0	Dis. Perpus Arsip
		2	1	Pemusnahan arsip yang sesuai nspk	95 %	Dis. Perpus Arsip
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai nspk	0	Dis. Perpus Arsip
			3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau di bubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai nspk di provinsi	0	Dis. Perpus Arsip
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga	0	Dis. Perpus Arsip

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				kearsipan provinsi yang sesuai nspk		
			5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang di nyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai nspk	0	Dis. Perpus Arsip
			6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai nspk.	0	Dis. Perpus Arsip
25	Kelautan dan Perikanan	1	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (rtp)	0	Dislutkan
			2	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	0	Dislutkan
			3	Jumlah izin usaha perikanan (iup) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	Dislutkan
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan)	0	Dislutkan
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.	10.292.000	Dislutkan
26	Pariwisata	1	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Disparbud
			2	Jumlah kelengkapan insfastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata		Disparbud
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		Disparbud
			4	Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan		Disparbud
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana		Disparbud
			6	Jumlah event luar negeri		Disparbud

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				yang diikuti provinsi		
			7	Jumlah imdustri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Disparbud
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi		Disparbud
			9	Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan.		Disparbud
			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan masyarakat.		Disparbud
27	Pertanian	1	1	sarana pertanian yang diberikan	28 unit	Dinas Pertanian
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	51 unit	Dinas Pertanian
			3	Penrbitan izin usaha pertanian	7 rekom.	Dinas Pertanian
			4	Persentase prasarana yang digunakan	100 %	Dinas Pertanian
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/ kota	100 %	Dinas Pertanian
		2	1	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100 %	Dinas Pertanian
28	Kehutanan	1	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan tahura	0	
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		
			3	Pemulihan ekosistem pada tahura	0	
			4	Menurunnya gangguan kawasan tahura	0	
29	Energidan Sumber Daya Mineral	1	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP
30	Perdagangan	1	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a.pusat perbelanjaan b.toko swalayan	100%	Disperindag/ DPMPTSP
			2	Persentase penerbitan TDG	100%	Disperindag/ DPMPTSP
			3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	Disperindag
			4	Persentase penerbitan stpw yang tepat waktu untuk	100%	DPMPTSP
			5	Persentase pemeriksaan	0	Disperindag

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				pasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota		
			6	Persentase penerbitan spka yang tepat waktu	0	Disperindag
			7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi pedagang di wilayah kerjanya	6,25	Disperindag
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		Disperindag
		2	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	42.883,27 ton	Disperindag
		3	1	Persentase alat ukur takar , timbang dan pelengkapannya uttp yang ditera /tera ulang dalam tahunn berjalan	110,60 %	Disperindag
			2	Persentase kesesuaian bdkd yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	50%	Disperindag
31	Perindustrian	1	1	persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (iuki) dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah kab/kota	0	DPMPTSP
		2	1	Persentase terselesaikannya dokumen ripik sampai dengan ditetapkan menjadi perda	0	Disperindag
		3	1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (iui) kecil dan iui menengah yang diterbitkan	0	DPMPTSP
			2	Persentase jumlah izin perluasan industri (ipui) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DPMPTSP
		4	1	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk dalam siii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kab/kota.	35.85	Disperindag
32	Transmigrasi	1	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang	2	Disnakertran

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			difasilitasi penetapannya		
		2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2	Disnakertran
		3	Jumlah satuan permukiman yang dibina.	0	Disnakertran

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatesivasi dalam PAUD	82.37%	Disdik
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar	96.33%	Disdik
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80.50%	Disdik
		4	Tingkat partispasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.46%	Disdik
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0.25% 248.805/ JUMLAH PENDUDUK	Dikes
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dikes
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	108,65% (23.232 orang)	Dikes
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,79% (20.395 orang)	Dikes
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehtan bayi baru lahir	104,38% (20.395 orang)	Dikes
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	50.711 balita (52,47%)	Dikes
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69.064 orang (36,44 %)	Dikes
		8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68.759 orang (36,282 %)	Dikes

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12.426 (27.21%)	Dikes
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (40.465 orang)	Dikes
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (848 orang)	Dikes
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	39,2 % (974 orang)	Dikes
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	12,28 % (2.043 orang)	Dikes
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	23,2 % (15.042 orang)	Dikes
3	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	87.15%	Disperkim
		2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi,crosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0%	Disperkim
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	12.403 DI	Dis. PUPR
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,16 %	Dis. PUPR
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		DLH
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota		DPMPTSP
		7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	67,55%	Dis. PUPR
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasanny tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dis. PUPR
		9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelkaan konstruksi	100 %	Dis. PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rahabilitas rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	24.136 unit	BPBD
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Disperkim
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	18,33%	Disperkim
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.181	Disperkim
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	41	Disperkim
5	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP
		2	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	2,7%	Satpol PP
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20.000	BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamat dan evakuasi korban bencana	0	BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	BPBD
6	sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	4.013 orang/14,23%	Dinsos
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	457 orang/100%	Dinsos
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Disnakertrans
		2	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat kompetensi	4%	Disnakertrans
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 613.375.544	Disnakertrans
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	49 %	Disnakertrans

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur sekala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)		
		5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100%	Disnakertrans
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.000045%	DP3AKB
		2	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi terkait kabupaten	100%	DP3AKB
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.008%	DP3AKB
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersediany cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	221%	Dinas ketahanan pangan
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokas dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		DPMPTSP /PUPR
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	Disperkim
		3	Tersedianny lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	tersedia	DPMPTSP
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan Tanah absentee	0	Disperkim
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Disperkim
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Disperkim
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	67.554 Poin	DLH
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	25% (155.855 M3)	DLH
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kab/kota	12 Usaha	DLH
12	Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	1	Perekaman KTP elektronik	734.592 (97,40%)	Disdukcapil
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	24.608 (8,46%)	Disdukcapil
		3	Kepemilikan akta kelahiran	915.866 (87,17%)	Disdukcapil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4 OPD	Disdukcapil
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMD
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	8 desa (0,19%)	DPMD
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1	TFR (Angka kelahiran total)	2.40%	DP3AKB
		2	Persentase pemakaian Kontrasepsimodern (modern contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	29.07%	DP3AKB
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet ned)	15.05%	DP3AKB
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	10,5	Dishub
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,165	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	29,54 %	Diskominfo
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Diskominfo
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	13,5 %	Diskominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	21 %	Diskop UKM
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4,72 %	Diskop UKM
18	Penanaman modal	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	PMDN (30,66% PMA (11,45%)	Dpmpptsp
19	Kepemudaan dan olahraga	1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3%	DISPORA
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3%	DISPORA
		3	Peningkatan prestasi olahraga	3.5%	DISPORA
20	Statistik	1	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Diskominfo
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Diskominfo
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	Diskominfo

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	10 cagar budaya	DISPARBUD
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	15.000 orang	Dis. Perpus Arsip
		2	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat		Dis. Perpus Arsip
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasl 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70 %	Dis. Perpus Arsip
		2	Tingkat keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspk kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	95 %	Dis. Perpus Arsip
25	Kelautan dan perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	58.734,58	DISLUTKAN
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebngsaan	-0,76 %	DISPARBUD
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-0,70 %	DISPARBUD
		3	Tingkat hunian akomodasi	0,11 %	DISPARBUD
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,03 %	DISPARBUD
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 25.850.534.444,- (12,68%)	DISPARBUD
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	56,39 kw/ha	Dinas Pertanian
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasusu penyakit hewan menular	17,55 % (7187 kasus)	Dinas Pertanian
28	Kehutanan	-	-		
29	Energi dan sumber daya mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	0	DPMPTSP
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIPU pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100% sesuai dengan berkas yg lengkap dan benar	DPMPTSP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	87,80%	DISPERIN DAG
		3	Pesentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	110,60 %	DISPERIN DAG
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0.07%	DISPERIN DAG
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	DISPERIN DAG
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh intansi terkait	0%	DISPERIN DAG & DPMPTSP
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh intansi terkait	0%	DISPERIN DAG & DPMPTSP
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasanKawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	DISPERIN DAG & DPMPTSP
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2 Dok	DISPERIN DAG
32	Trasmigrasi	-	-		

II.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN		INDIKATOR KINERJA KNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		BPKAD
		2	Rasio PAD	9,84 %	BPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT
		4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		BPKAD
		5	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPKAD
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	SETDA

		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100%	PBJ setda
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	Pbj setda
3	Kepegawaian	1	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	52,34%	BKPP
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kerja kesehatan)	10,65%	BKPP
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	BKPP
4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,53 %	BKKAD
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	106,38%	BPKAD
		3	Manajeme Aset	ada	BPKAD
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6.86%	BPKAD
5	Transparasi dan Partisipasi publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	ada	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	ada	

II.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ X 100%

Persentase pencapaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ X 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Lebih dari100	SANGAT BAIK
2	Nilai 86 s.d100	BAIK
3	Nilai 71 s.d85	SEDANG
4	Nilai 56 s.d70	KURANG
5	Nilai ≤ 55	SANGATKURANG

Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	REALISASI 2020	TARGET 2020/ REALISASI (%)	TARGET 2021/ REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI
MISI I: Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal										
A	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	A1	Indeks Toleransi	Poin	3,44	3,45	3,72	108,14 (Sangat Baik)	107,83	107,83
1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/ 100.000 penduduk	85,3	81,63	48,36	143,31 (Sangat Baik)	140,75	
2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	2	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	100 (Sangat Baik)	100	
Misi II : MeningkatkanKesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender										
B	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	B1	IPM	Point	67,87	67,67	66,43	97,88 (Baik)	98,17	90,97
		B2	Angka Kemiskinan	%	14,17	13,86	13,44	105 (Baik)	103,03	
		B3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,84	2,83	3,74	70,03 (Kurang)	67,84	
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,74	6,88	6,28	93,18 (Baik)	91,28	
		4	Harapan lama sekolah	Tahun	13,93	14,15	13,67	98,13 (Baik)	96,61	
		5	PAUD terakreditasi A	%	1,53	1,53	0	0 (Sangat kurang)	0	
		6	SD terakreditasi A	%	6,02	6,86	5,79	96,18 (Baik)	84,41	
		7	SMP terakreditasi A	%	11,73	11,97	9,5	80,99 (Sedang)	79,37	

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	REALISASI 2020	TARGET 2020/ REALISASI (%)	TARGET 2021/ REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,91	66,06	66,21	100,46 (Sangat Baik)	100,23	
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	9	Angka PMKS	Orang	1.901	1.092	13.029	-478 (Sangat Kurang)	-933	
		10	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,23	74,65	75,04	101,10 (Sangat Baik)	100,53	
		11	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/ tahun	10,030	10.252	9,952	99,22 (Baik)	97,08	
Misi III : Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas										
C	Meningkatnya Perekonomian Daerah	C1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56	6,61	-6,08	-101,33 (Sangat Kurang)	-91,98	(2,90 (Sangat Kurang))
		C2	Indeks Gini	Poin	0,336	0,332	0,312*	107,14 (Sangat Baik)	106,02	
6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		4,47	4,68	-3,52	-68,23 (Sangat Kurang)	-75,21	
		13	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	8,24	8,81	-20,43	-255 (Sangat Kurang)	-231	
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	14	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	105,48	105,69	109,22	103,55 (Sangat Baik)	103,34	
		15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,8	86,00	93,80	109,32 (Sangat Baik)	109,07	
Misi IV : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang memadai										
D	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	D1	Indeks Wiliamson	Poin	0,40	0,39	0,36	110 (Sangat Baik)	107,69	110 (Sangat Baik)
8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	16	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	74,72	75,79	65,03	87,50 (Baik)	85,81	
9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53	53,5	66,25	125 (Sangat Baik)	123,84	
		18	Ketaatan terhadap RTRW	%	84,36	86,71	81,40	96,49 (Baik)	93,88	
10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	19	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	23,77	11,65	38,15	37,40 (Sangat kurang)	-127	
		20	Spot kawasan kumuh	Spot	2	1	3	50 (Sangat Kurang)	-100	
11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	21	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	29	35	33	113,79 (Sangat Baik)	94,28	
E	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	E1	Nilai EKPPD	Poin	3,1488	3,1545	3,0479*	96,80 (Baik)	96,62	96,80
12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	22	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	Cc	91,46 (baik)	91,46	
		23	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	WTP	WTP*	WTP	100 (Baik)	100	
13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	24	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9,32	9,35	9,64	103,43 (Sangat Baik)	103,10	

Secara umum capaian kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2020 adalah **81,69** dengan kriteria “SEDANG”. Adapun

uraian capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan sebagai berikut:

II.3.1. TUJUAN1
MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Tujuan tersebut diukur dengan 1(Satu) indicator yaitu: Indeks toleransi. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								7	8		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Toleransi	Poin	3,44	3,45	3,72	107,8	107,83	-	-	Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Bappeda Kab. Lombok Tengah	BAPPEDA
Rata-rata						103,8%	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Perbandingan capaian indikator “Indeks tolerasi” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2020	3,72	-	-

Ket: Indeks toleransi NTB dan Nasional tidak ada karena Kementerian Agama menggunakan indeks Kerukunan Beragama.

Program Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator “Indeks Toleransi” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

a. BAKESBANGPOLDAGRI;

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
- Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

Program Penanganan Konflik Sosial

- Pemantauan Aliran Kepercayaan

b. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)

Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah

- Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar
- Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
- Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
- Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an

Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Pengendalian Penanganan Masalah Sosial
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

c. DINAS PENDIDIKAN

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis :

Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2020

Capaian Indeks	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,91	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,24	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,34	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	4,10	Tinggi
INDEKS TOLERANSI	3,72	Tinggi

Sumber: Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.

Interval nilai indeks toleransi :

- 1 - 1.7 = Sangat rendah
- 1.8 - 2.5 = Rendah
- 2.6 - 3.3 = Cukup
- 3.4 - 4.1 = Tinggi
- 4.2 - 5 = Sangat tinggi

Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan indeks toleransi Provinsi NTB dan Nasional karena tidak ada data. Meskipun demikian, terdapat alternatif indikator lain yang sangat relevan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat, yaitu: indeks kerukunan beragama. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dapat diketahui bahwa nilai indeks kerukunan beragama Nusa Tenggara Barat: 70,4 sedangkan IKB nasional adalah: 73,83. Sumber: artikel "Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019", <https://tirto.id/engH>.

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 sebesar 3,72 dan masuk dalam kategori “tinggi”. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari

dimensi persepsi, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

Dari dimensi sikap, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Lombok Tengah bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada dan bersedia melakukan musyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah apabila terdapat perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Namun masih ada sebagian besar responden tidak bersedia apabila ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil penelitian, indeks dimensi kerjasama-hubungan sosial dan indeks sikap pemerintah mendapatkan nilai yang cukup baik. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi pembangunan rumah ibadah, fasilitasi dialog antar umat beragama dan sosialisasi kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks toleransi” di Lombok Tengah antara lain:

- Norma dan ajaran agama;
Norma dan ajaran agama yang diakui di Indonesia selalu mengajarkan kebajikan dan nilai-nilai toleransi antar umat seagama maupun berbeda agama. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sangat menghargai toleransi saling menghormati antar umat se agama dan beda agama.
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.
- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah. Contoh : kegiatan pemberdayaan rumah ibadah dengan pembuatan akta yayasan masjid dan pemberian insentif bagi marbot masjid;
- Sikap pemeluk agama.

Sikap umat islam dan umat agama lain di Kabupaten Lombok Tengah dinilai cukup taat dalam beribadah. Bahkan Kabupaten Lombok Tengah sejak dahulu telah dikenal dengan nama “pulau seribu masjid”. Label “pulau seribu masjid” mencerminkan jumlah pemeluk agama islam yang mayoritas serta pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

- Persepsi pemeluk agama.

Persepsi ini berkaitan dengan respon terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Persepsi pemeluk agama terhadap peristiwa atau suatu isu akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pada aspek toleransi. Dibawah bimbingan tokoh agama serta pembinaan pemerintah daerah, masyarakat Lombok Tengah selalu memiliki persepsi positif terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang berkaitan dengan agama.

- Kerjasama antar umat beragama

Kerjasama antar umat beragama secara nyata diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus seperti :

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi

- Sikap pemerintah

Pemerintah Indonesia mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat selalu mendukung kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dukungan ini diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi serta penyusunan regulasi dalam rangka pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah: Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.

- Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.

Tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Lombok Tengah saat ini relatif merata dan cukup tinggi. Hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat toleransi masyarakat.

Toleransi beragama di Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh sikap, persepsi dan pemahaman masyarakat yang cukup tinggi terhadap agamanya masing-masing. Kondisi inilah yang mendukung terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama pada seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan Tahun 2020 tidak pernah ada konflik sosial masyarakat yang dilatarbelakangi masalah agama.

Dokumentasi:



II.3.1.1 SASARAN1
TERPELIHARANYA STABILITAS SOSIAL

Sasarantersebut diukur dengan 1(Satu) indikatoryaitu: Tingkat Kriminalitas. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	88,55	81,63	48,35	143,31	-	-	-	Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021	SAT POL PP
Rata-rata						200 %	Kriteria 2020 : SANGAT BAIK				

Sumber: Data dari Satpol PP Lombok Tengah

Perbandingan capaian kinerja indikator “tingkat kriminalitas” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.

Tahun	Lombok Tengah		NTB		Nasional		Ke t
	Jumlah Kriminalitas	Tingkat Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Tingkat Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Tingkat Kriminalitas	
2020	48,35	48,35*	-	-	-	-	-

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kriminalitas” antara lain:

1. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/ PKL/Pelajar

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
- Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

- Sosialisasi kepada pengurus partai politik
- Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan
- Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
- Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Program Penanganan Konflik Sosial

- Pembinaan Kewaspadaan Dini
- Pemantauan Orang Asing
- Rencana aksi penanganan konflik sosial
- Pelatihan ketahanan bangsa
- Pemantauan Aliran Kepercayaan

Analisis:

Pendukung capaian kinerja indikator “angka kriminalitas” antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup baik. Seiring dengan maraknya investasi dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun

semakin meningkat. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam mengurangi jumlah kriminalitas di daerah;

- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada ummat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.
- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah.
- Efektifitas mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib dalam penyelesaian masalah-masalah di desa (Babinsa, Polmas, Pol PP, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll);
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP yang langsung menyasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum. Selain itu, SatPol PP Kab. Lombok Tengah juga rutin melaksanakan patroli pengamanan ketertiban umum;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Adanya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dikhususkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di Lombok Tengah. Contoh kegiatan pengamanan lingkungan di KEK Mandalika;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana toleran, aman dan tertib lingkungan yang kondusif;
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Pembangunan akan maksimal jika tingkat kriminalitas berkurang.

Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya

tersebut tidak hanya ditanggung korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah.

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2018	2019	2020
Pembunuhan	21	18	17
Penganiayaan Berat (Anirat)	37	19	64
Penganiayaan Ringan (Anira)	256	603	260
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	313	303	152
Perkosaan	44	46	46
Penculikan	2	2	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	310	204	249
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	526	394	96
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1.397	1.021	1.319
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	488	529	887
Pengrusakan/Penghancuran Barang	325	174	66
Pembakaran Dengan Sengaja	4	4	0
Narkotika Dan Psikotropika	155	188	777
Penggelapan	318	329	95
Korupsi	15	11	15
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	3	0	0
JUMLAH	4.214	3.845	2.724

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan dalam Buku Statistik Kriminalitas Provinsi NTB Tahun 2020 Halaman no. 19

Kriminalitas menurut S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta (1980) (dalam Abdulsyani, 1987) dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Kriminalitas juga dapat dipandang dari beberapa aspek, antara lain :

- a) Dari aspek yuridis, kriminalitas adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Akan tetapi, bila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b) Dari aspek sosial, kriminalitas adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar/tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

- c) Dari aspek ekonomi, kriminalitas adalah jika seseorang/lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia di anggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Tinggi rendahnya angka kriminal di daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain:

A. Menurut Zsolt Becsi (1999) dalam Astuti (2014) :

- variabel kepadatan penduduk
- variabel usia pelaku/ korban
- variabel pengangguran
- variabel pendapatan personal
- variabel kesejahteraan
- variabel pendidikan
- variabel personil kepolisian (kuantitas dan kualitas)

B. Menurut Alison Oliver (2002) dalam Astuti (2014) :

- GDP perkapita
- Indeks Gini
- Tingkat pengangguran
- Jumlah aparat keamanan/ polisi

Berdasarkan variabel-variabel kriminalitas diatas, maka dapat dipastikan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Namun, alhamdulillah besarnya potensi kriminalitas tersebut ternyata dibarengi dengan kesadaran aparat untuk terus melakukan sosialisasi, pembinaan, koordinasi serta penindakan terhadap kriminalitas di daerah. Kesadaran masyarakat untuk mendukung keamanan dan kertertiban umum juga sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi serta adanya akulturasi budaya dan semangat toleransi tinggi antara masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang telah terjalin dengan baik. Selain itu, hal yang paling mendukung capaian kinerja tersebut adalah adanya aparatur pemerintah dan petugas Kamtrantib pada setiap level tingkatan masyarakat yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Beberapa organisasi yang mendukung kerukunan dan akulturasi budaya dan kamtrantib di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;

- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi
- k) Siskamling, dll.

Dokumentasi :



II.3.1.2 SASARAN 2
TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Sasaran tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Konflik berlatar belakang agama. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	100	100	0	0	Laporan Kamtrantibmas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Sat Pol PP Kab. Lombok Tengah	SAT POL PP
Rata-rata						100 %	Kriteria 2020 : BAIK				

Perbandingan capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2020	0	-	-

Catatan: Data tentang “konflik berlatar belakang agama” di NTB dan Nasional Tahun 2019 tidak ada.

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

1. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Kamtrantibmas terhadap Masyarakat/
PKL/Pelajar

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
- Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

- Sosialisasi kepada pengurus partai politik
- Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan
- Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
- Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Program Penanganan Konflik Sosial

- Pembinaan Kewaspadaan Dini
- Pemantauan Orang Asing
- Rencana aksi penanganan konflik sosial
- Pelatihan ketahanan bangsa
- Pemantauan Aliran Kepercayaan

3. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)

Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah

- Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari
besar
- Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
- Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
- Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an

Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Pengendalian Penanganan Masalah Sosial
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat

Analisis:

Sampai dengan Tahun 2020, di Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama. Kondisi ini antara lain dibuktikan dengan rekapitulasi gangguan kamtrantibmas Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

NO	LOKASI KEJADIAN	PERZINAAN	PENCURIAN BARANG	PENCURIAN HEWAN TERNAK	CURANMOR	PENEMUAN MAYAT / JENAZAH	PENIPUAN	PENGANIAYAAN	KDRT	PENCULIKAN	PENGELAPAN	PENCURIAN KAYU	PENGERUSAKAN BARANG	PERCOBAAN PEMBUNUHAN	PENCABULAN	CURAT	MELARIKAN PEREMPUN	KEKERASAN TERHADAP ANAK	BANJIR
1	KECAMATAN PRAYA	0	15	0	16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KECAMATAN KOPANG	0	4	0	5	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECAMATAN PRINGGARATA	0	10	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECAMATAN JANAPRIA	0	2	0	3	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	KECAMATAN PUJUT	0	3	0	2	0	1	9	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
6	KECAMATAN PRAYA BARAT	0	2	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	0	4	0	0	0	2	6	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
8	KECAMATAN PRAYA TIMUR	0	6	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KECAMATAN PRAYA TENGAN	0	9	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KECAMATAN JONGGAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KECAMATAN BATUKLIANG	1	9	0	7	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	0	3	0	0	0	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1	67	1	50	3	7	42	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4

Sumber : Laporan Sat Pol Pp Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.

Pendukung capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Efektifitas upaya-upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll). Upaya preventif ini dilakukan pada seluruh permasalahan/ potensi konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk jika berkaitan dengan latar belakang agama;
- Adanya tradisi adat masyarakat yang harmonis sejak dahulu kala karena telah terjadi akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada ummat

beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.

- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) , Majelis Adat Sasak, Badan Keamanan Desa/ Kelurahan, bale mediasi , siskamling dll yang langsung menysasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan di masyarakat.

Berkaitan dengan ketegangan atau konflik dalam masyarakat, antara lain dijelaskan oleh Syafia (2004) dalam kajiannya yang berjudul *Kerukunan antar umat Beragama dan Konflik Sosial* (Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020),. Ia menjelaskan bahwa “keinginan setiap komunitas agama untuk mempertahankan eksistensinya bahkan melakukan ekspansi pengikut adalah suatu yang alamiah terutama bagi agama dakwah (*mission*) seperti Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Bahkan sebenarnya secara sosiologis sikap ekspansif tersebut tidak hanya dimiliki oleh agama-agama dakwah itu tetapi oleh kelompok sosial politik dan ekonomi apa pun. Namun demikian, sikap ekspansif itu akan menjadi positif apabila terorientasi pada prinsip keselamatan dan didasarkan pada pengakuan hak-hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa pemaksaan “.

Faktor-faktor penyebab konflik dibedakan dalam beberapa jenis (Jamil, Sholihan, et.al, 2007:16. Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020), yaitu :

1. *Triggers* (pemicu) yaitu peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
2. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar) yaitu terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.

3. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) yaitu masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
4. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk) yaitu faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

Tidak adanya konflik berlatar belakang agama di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan para tokoh masyarakat yang tinggi, serta tidak adanya permasalahan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan Trantibum di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini patut kita syukuri dan terus jaga agar terawat dan menjadi semakin baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* harus memperhatikan enam isu utama yang biasanya melatari konflik-konflik agama, yang kadang bersifat tumpang-tindih satu sama lain (Ali-Fauzi dkk. (2009) sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI 2018 dalam dokumen yang berjudul “Menggapai Kerukunan Umat Beragama : Buku Saku FKUB”. Halaman: 16). Isu-isu tersebut yaitu:

1. *Isu moral*, mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti anti korupsi juga bisa dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.
2. *Isu sektarian*, yang melibatkan perseteruan terkait pemahamanajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Dalam Islam, misalnya, kelompok Ahmadiyah adalah di antara kelompok-kelompok agama yang kerap memicu berbagai insiden konflik. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.
3. *Isu komunal*, yang melibatkan perseteruan di antara komunitasagama yang berbeda, seperti konflik Muslim-Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori isu komunal ini.
4. *Isu terorisme*, yang terkait dengan aksi-aksi serangan terror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik

- pemerintah asing. Contohnya adalah pengeboman di Bali, yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.
5. *Isu politik-keagamaan*, yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.
 6. *Isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Dokumentasi:



II.3.2 TUJUAN 2
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun * 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	IPM	point	67,87	67,67	66,43	97,8	98,17	65,36	65,36	Sumber Data BPS NTB web. Globalfmlombok .com	Lintas OPD
2	Angka Kemiskinan	%	14,17	13,86	13,44	105	-	13,87	13,87		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,84	2,83	3,74	70,03	-	3,08	3,08		

Ket: * Sumber BPS Lombok Tengah.

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Perbandingan capaian indkator “IPM” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2018-2020:

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2018	65,36	67,30	71,39
2	2019	66,36	68,14	71,92
3	2020	66,43	68,25	-

Sumber: Globalfmlombok.com/read 2020/02/18
 Untuk data Nasional bersumber dari www.bps.go.id/presrelease/2020/02/17

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan capaian indikator IPM di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- A. DINAS PENDIDIKAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program Pendidikan Luar Biasa
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- B. DINAS KESEHATAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
 - Program Jaminan Kesehatan Nasional
 - Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan
- C. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- D. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- E. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- F. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. program/upaya peningkatan IPM di Kabupaten Lombok Tengah masih belum terpadu, terutama pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan IPM. Contoh: Sampai dengan saat ini belum terlihat keterkaitan kebijakan urusan perdagangan dan tenaga kerja di Lombok Tengah dengan tingkat perkembangan pendidikan penduduk. Bagaimana keterkaitan/pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam menggalakkan dan meningkatkan kualitas perizinan dan investasi dengan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, penyiapan tenaga kerja, penyiapan komoditi pertanian, kondisi keamanan dan ketertiban, sampai dengan pengaruhnya terhadap kelesarian adat budaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki kebijakan/*road map* khusus dalam upaya peningkatan IPM agar lebih fokus, terarah dan terpadu;
- b. Besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan IPM.
- c. Besarnya pengaruh Pandemi COVID 19 sangat berdampak terhadap peningkatan IPM Lombok Tengah.

Adapun pendukung peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:

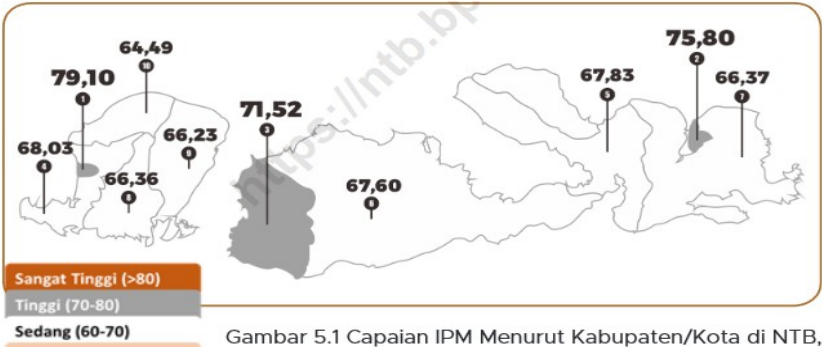
- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;
- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggulangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

Setiap tahun, IPM Lombok Tengah selalu meningkat selama periode 2018-2020. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan IPM hingga 66,43 persen. Pada tahun 2020, IPM Lombok Tengah mencapai 66,43 persen, meningkat 1,07 persen selama periode 2018-2020.

Indeks
Pembangunan
Manusia
Kabupaten
Lombok
Tengah 2015-
2019

Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Lombok Tengah masih menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 meningkat dari posisi ke-8 menjadi ke-7 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

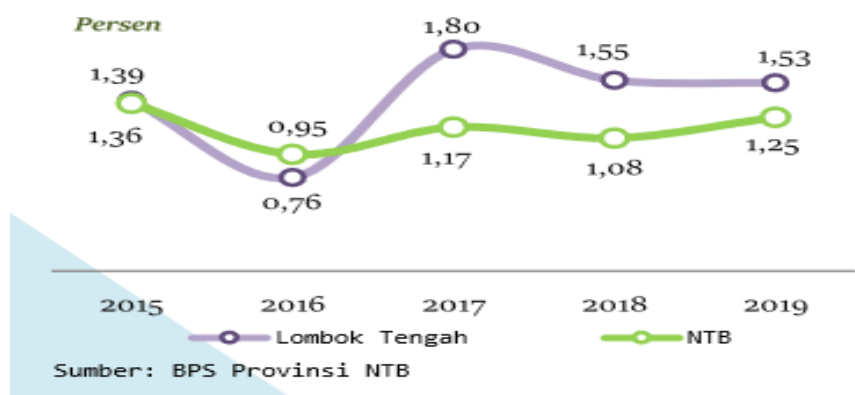


Gambar 5.1 Capaian IPM Menurut Kabupaten/Kota di NTB,

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

Perbandingan Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lombok Tengah 2015-2019



Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2020, umur harapan hidup saat lahir di Lombok Tengah minimum 25 tahun maksimum mencapai 85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 85 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 5,96 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas V SD. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,47 tahun atau setara dengan tahun kedua di bangku kuliah. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita mencapai 9,8 juta rupiah per tahun.

Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Pada tahun 2015, AHH saat lahir di Lombok Tengah mencapai 64,75 tahun. Lima tahun kemudian (Tahun 2020) bertambah 1,24 tahun menjadi 65,99 tahun. Ini berarti rata-rata harapan bayi baru lahir untuk hidup bertambah 0,61 setiap tahunnya. AHH saat lahir Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa hal yang mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat, serta meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator dari dimensi pengetahuan. Selama tahun 2016-2020, pengetahuan penduduk Lombok Tengah semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2016-2020. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 2,21 persen per tahun selama tahun 2016-2020. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 2,15 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat 477 ribu rupiah atau tumbuh 2,64 persen per tahun. Jika pada tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 8,85 juta rupiah, maka pada tahun 2020 mencapai 10,20 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.

Dokumentasi:



B. ANGKA KEMISKINAN

Perbandingan capaian indikator “Angka Kemiskinan” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
----	-------	------------------	-----	----------

1	2018 (September)	13,87	14,63	9,66
2	2019 (Maret)	-	14,56	9,41
3	2020 (Desember)	13,44	-	-

Sumber: Berita Resmi Grafikanews.com/berita-BPS-angkakemiskinan
Kabupaten Lombok Tengah

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kemiskinan” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakaryaan
 - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- B. DINAS SOSIAL
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- C. DINAS KESEHATAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
- Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

D. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

E. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program pengembangan wilayah transmigrasi

F. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

G. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Analisis:

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2018

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Lombok Tengah Regency, 2013–2020

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	306 311	145 200	16,20
2014	319 518	145 177	16,03
2015	335 286	147 940	16,26
2016	357 337	145 370	15,80
2017	369 645	142 142	15,31
2018	386 676	130 002	13,87
2019	404 633	128 822	13,63
2020	421 439	128 100	13,44

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Pendukung capaian kinerja indikator “angka kemiskinan” antara lain:

1. Komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas pembangunan daerah. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
4. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika beserta seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan event-event yang akan dilaksanakan seperti pagelaran Moto GP Tahun 2021, telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah terutama aspek pengembangan pariwisata di daerah;
5. Makin meningkatnya investasi dunia usaha di Kabupaten Lombok Tengah terutama pada sektor parwisata telah menambah jumlah lapangan pekerjaan dan penambahan penghasilan bagi masyarakat;
6. Besarnya potensi SDA, demogafi dan budaya di Lombok Tengah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh: banyaknya Obyek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah;
7. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
8. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/

pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional

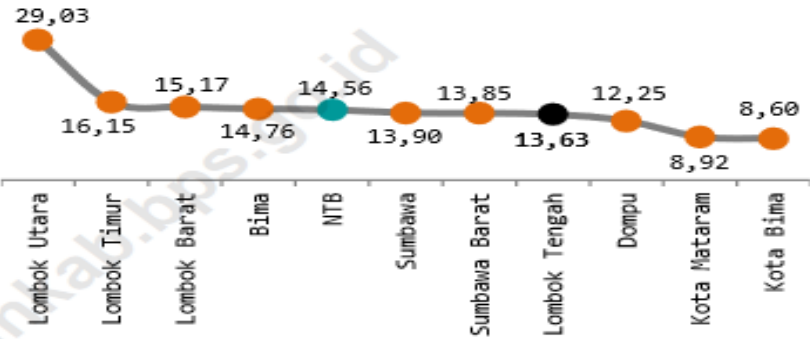
9. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
10. Adanya pembinaan dan penanggulangan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah beserta *stakeholder* lain seperti pemerintah desa. Penanganan masalah PMKS ini dilakukan melalui pemberian santunan kebutuhan pokok maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian peralatan dan modal usaha agar masyarakat dapat mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS di Lombok Tengah;
11. Adanya pembinaan terhadap koperasi dan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya untuk penciptaan wirausahawan baru dan pembinaan terhadap UMKM agar lebih produktif dan berkembang. Contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti: pembinaan manajemen koperasi dan UMKM, pemberian bantuan peralatan, pemberian bantuan modal usaha kelompok, fasilitasi dalam pemasaran melalui pameran dan promosi secara lokal maupun regional;
12. Adanya Job fair dan pelatihan keterampilan pada BLK (balai latihan kerja) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga secara langsung sangat berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan.
13. Meningkatnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Patut disyukuri selama kurun waktu 2013-2020, kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 16,20 persen, dan pada tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,44 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Contoh: Kebijakan pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2020, seluruh desa dan kelurahan telah melakukan pembangunan / rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayah kerja

masing-masing. Dengan demikian, diluar pembangunan ratusan RTLH oleh dinas PERKIM, Desa dan kelurahan talah membantu upaya penanganan kemiskinan secara langsung dengan membangun 1.150 unit RTLH.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah berada pada peringkat ke-4 terendah dan persentasenya lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi NTB. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-pulau Lombok, peringkat Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi ke-2 terendah setelah Kota Mataram.

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi NTB

Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks kedalaman kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah sejak periode 2013 hingga 2020 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,42. Nilai P1 paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1,42.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks

ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi penduduk miskin diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu perlu dirumuskan agar program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, jadi lebih bersifat padat karya dibanding berbentuk transfer langsung.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2020**

Tabel 4.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020
Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Lombok Tengah Regency, 2013–2020

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	2,32	0,50
2014	2,21	0,48
2015	3,00	0,87
2016	2,74	0,64
2017	2,81	0,75
2018	2,31	0,54
2019	1,56	0,25
2020	1,42	0,26

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Indeks Keparahahan Kemiskinan (P₂)
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2020

Tabel 4.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020
Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Lombok Tengah Regency, 2013–2020

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	2,32	0,50
2014	2,21	0,48
2015	3,00	0,87
2016	2,74	0,64
2017	2,81	0,75
2018	2,31	0,54
2019	1,56	0,25
2020	1,42	0,26

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS–Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah terlihat cukup fluktuatif dengan peningkatan tajam pada tahun 2015 mencapai 0,87. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 mencapai 0,50 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,26. Nilai Indeks Keparahahan Kemiskinan mencapai nilai terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 0,25. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin pengeluarannya berkurang ketimpangannya. Sementara itu, kenaikan nilai Indeks Keparahahan Kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang semakin melebar.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018

Tabel 4.4.1
Table 4.4.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Lombok Tengah Regency, 2013–2020

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	306 311	145 200	16,20
2014	319 518	145 177	16,03
2015	335 286	147 940	16,26
2016	357 337	145 370	15,80
2017	369 645	142 142	15,31
2018	386 676	130 002	13,87
2019	404 633	128 822	13,63
2020	421 439	128 100	13,44

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Dokumentasi:



C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Perbandingan capaian indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

Tahun	NASIONAL	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	5,94	-	6,47
2015	6,18	-	7,42
2016	5,61	-	2,90

2017	5,50	-	3,08
2018	5,34	-	6,47
2019	-	3,42	2,44

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia 2018, Halaman: 55 sebagaimana telah diunduh dari [www.bps.go id](http://www.bps.go.id) tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ Kegiatan yang berkaitan dengan indikator “tingkat pengangguran terbuka” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Sampai dengan akhir penyusunan laporan ini, BPS tidak dapat merilis data tingkat pengangguran terbuka Kab. Lombok Tengah Tahun 2020. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target Tahun 2020 dengan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat Pengangguran Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 terkecil ke 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya 2,44 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 2 orang yang merupakan pengangguran. TPT sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Pertumbuhan sektor industri dan UMKM yang belum optimal serta kondisi realisasi investasi di daerah sangat mempengaruhi kondisi TPT. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015, 2017-2019 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	9,92	4,32	7,42
2017	3,83	1,88	2,90
2018	2,72	3,49	3,08
2019	2,76	2,16	2,44

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Penambahan jumlah/ nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
2. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
3. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
4. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
5. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
6. Penyelenggaraan job fair secara rutin setiap tahun sebagai upaya menjembatani kebutuhan personil pada dunia usaha serta penyaluran / penempatan tenaga kerja di daerah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Contoh: Peningkatan kualitas perizinan di PTSP

(pelayanan terpadu satu pintu) serta peningkatan kualitas pelayanan bagi para calon TKI di Lombok Tengah;

8. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) (jiwa)	311,33	367,68	679,01
Angkatan Kerja (jiwa)	252,81	230,15	482,96
Bekerja (%)	247,36	223,80	471,16
Pengangguran (%)	5,45	6,35	11,80
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	38,52	137,54	196,05
Sekolah (%)	23,37	17,48	40,84
Mengurus Rumah tangga (%)	11,24	106,94	118,18
Lainnya (%)	23,91	13,12	37,03

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2019 (Laki-laki + Perempuan)

Tahun	Lapangan Usaha Utama	Jumlah
-------	----------------------	--------

	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
2017	42,04	15,64	18,99	12,14	11,19	100,00
2018	36,56	17,09	20,71	12,54	13,09	100,00
2019	32,40	21,12	17,46	11,77	17,25	100,00

Sumber: Survey angkatan Kerja Nasional Agustus 2017,2018 dan 2019

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal
di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2019 (Laki-laki + Perempuan)

Tahun	Sektor		Jumlah
	Formal	Informal	
2017	17,26	82,74	100,00
2018	21,32	78,68	100,00
2019	19,17	80,83	100,00

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Jumlah usia kerja di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebanyak 670,88 ribu orang, terdiri dari 307,46 ribu laki-laki dan 363,42 ribu perempuan. Dari 670,88 ribu orang penduduk usia kerja, 449,29 ribu orang merupakan angkatan kerja. Meskipun jumlah penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun jumlah angkatan kerja penduduk perempuan lebih kecil dari laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 208,53 ribu orang, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 240,75 ribu orang. Salah satu penyebabnya karena budaya yang menempatkan laki-laki harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan perempuan bertugas di rumah untuk mengurus keluarga.

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, disetiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019

Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum tamat SD	0,48	0,54	1,02
≤SD	1,12	0,84	1,96
SMP	1,30	0,94	2,24
SMA	4,57	11,03	15,56
Diploma I/II/III	0,00	0,00	0,00
Universitas	5,11	3,70	8,81
TPT Lombok Tengah	2,16	2,76	2,44

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMA mencapai 15,56 persen, terutama pada penduduk perempuan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak selektif dalam memilih pekerjaan dan tidak mensyaratkan pekerjaan tertentu. Selain itu, lapangan pekerjaan yang mereka geluti merupakan lapangan pekerjaan informal yang kesempatan kerjanya lebih luas dibandingkan lapangan pekerjaan formal. Pola tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018 dimana pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMA dengan angka TPT mencapai 15,56 persen.

Potensi dari lapangan usaha yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja dalam lapangan usaha tersebut. Dengan melihat besarnya jumlah pekerja menurut lapangan usaha dapat dirumuskan kebijakan untuk mengamankan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus melihat prospek ekonomi di masa mendatang.

Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Lapangan Usaha	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,96	99,04	100,00
Pertambangan dan Penggalian	0,00	100,00	100,00
Industri Pengolahan	10,09	89,91	100,00
Listrik, Gas dan Air Minum	71,22	28,78	100,00
Konstruksi	17,71	82,29	100,00
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	18,81	81,19	100,00
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	16,33	83,67	100,00
Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	89,77	10,23	100,00
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	86,18	13,82	100,00
Total	19,17	80,83	100,00

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2019

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Pada Tahun 2019 jumlah Angkatan Kerja yang bekerja di Sektor informal tercatat lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di sector formal dengan nilai 80,83 persen terhadap 19,17 persen. Keadaan tersebut juga sama jika dilihat berdasarkan lapangan usaha utama kecuali sector listrik, gas dan air minum. Lembaga keuangan real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, serta jas kemasyarakatan, sosial dan perorangan dimana persentase angkatan kerja yang bekerja di sector formal lebih tinggi dibandingkan sector informal.

Apabila dilihat dari pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak, maka sebagian besar tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian memiliki pendidikan SD ke bawah. Hanya 2,30 persen yang tamatan universitas. Begitu pula dengan lapangan usaha Industri, sekitar 20,85 persen tenaga kerjanya memiliki latar belakang pendidikan SD ke bawah. Berbeda hal dengan lapangan usaha Perdagangan, 33,39 persen yang berpendidikan SMA. Tenaga kerja yang memiliki ijazah Universitas dan Diploma lebih banyak terserap pada lapangan usaha Jasa.

Hampir separuh dari penduduk Lombok Tengah yang bekerja pada tahun 2019 berstatus berusaha baik berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Proporsi tenaga kerja berstatus buruh/karyawan dan pekerja bebas hampir sama yaitu 19,82 persen dan 18,68 persen. Sedangkan yang berstatus pekerja keluarga masih cukup besar yaitu 13,65 persen.

Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Lap. Usaha Utama	Tidak/ Belum Tamat SD	≤SD	SMP	SMA Umu m	DI/II/ III	Universita s	Jml
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	49,97	35,02	26,15	18,36	8,36	2,03	32,40
Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Industri	18,83	30,95	26,09	17,78	0,00	4,57	21,12
Listrik, Gas, dan Air	0,00	0,24	0,41	0,83	0,00	1,85	0,42
Konstruksi	9,65	11,85	15,69	12,22	12,69	3,94	11,34
Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi	17,06	15,94	25,58	28,15	12,88	10,74	20,25
Transportasi,Pergudangan dan Komunikasi	1,44	3,69	2,38	4,29	0,00	0,93	2,61
Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,00	0,00	2,77	3,77	8,08	1,03	0,95
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	4,482,76	2,30	3,69	17,60	66,35	74,91	10,83
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah sebagian besar berstatus berusaha, serta biasanya pada sektor informal. Begitu pula dengan penduduk dengan pendidikan SMP. Untuk penduduk yang berpendidikan SMA, status pekerjaan utamanya hampir berimbang antara berusaha dan sebagai buruh/karyawan. Sedangkan Diploma dan Universitas lebih banyak berstatus sebagai buruh/karyawan mengingat lapangan kerja yang tersedia lebih banyak mensyaratkan yang berpendidikan Diploma maupun universitas dalam penerimaan tenaga kerjanya.

II.3.2.1 SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Sasarantersebut diukur dengan 5(Lima) indikator yaitu:

1.

Rata-rata lama sekolah;
2.

Harapan lama sekolah
3.

PAUD terakreditasi A
4.

SD terakreditasi A
5.

SMP terakreditasi A

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,74	6,88	6,28	93,18	91,28	5,95	5,96	Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	Dinas Pendidikan
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,93	13,93	14,15	98,13	96,61	13,47	13,47		
3	PAUD terakreditasi A	%	1,53	1,53	0	0	71,90	0	0	LKJIP dinas Pendidikan Tahun 2020 dan Bappeda	
4	SD terakreditasi A	%	6,02	6,86	5,79	96,18	84,41	5,46	5,46		
5	SMP terakreditasi A	%	11,73	11,97	9,5	80,99	79,37	8,94	8,94		

Catatan: * Kondisi Tahun 2019, Data Tahun 2020 belum dipublikasikan oleh BPS

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Perbandingan capaian indikator “Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional

Tahun	NASIONAL	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2015	7,84	6,71	5,54
2016	7,95	6,79	5,6
2017	8,10	6,9	5,95
2018	8,17	7,03	5,96
2019	-	7,27	6,27

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Rata-rata Lama sekolah”:

A. DINAS PENDIDIKAN

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- B. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- C. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Analisis :

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Lombok Tengah usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 6,27 tahun atau sampai kelas 1 SMP. Sedangkan penduduk NTB rata-rata bersekolah selama 7,27 tahun atau sampai kelas 2 SMP. Bila dibandingkan dengan nilai maksimum RLS sesuai ketentuan UNDP, nilai RLS Lombok Tengah masih sangat rendah.

Variabel yang mempengaruhi indikator RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. Kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan;
7. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. Faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “RLS” di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

1. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar
2. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih nyaman untuk proses belajar mengajar;
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas guru di jenjang SD dan SMP berupa pelatihan guru dan memberikan ijin/ beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- 4. Perbaikan sarana transportasi (jalan) agar setiap wilayah di Kabupaten dapat terjangkau terutama sarana dan prasarana pendidikan;
- 5. Bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh setiap sekolah untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa;
- 6. Guru melakukan kunjungan (visite) langsung kepada rumah wali murid / pengampu untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa dan atau wali murid/pengampu agar tetap bersekolah dengan baik. Kunjungan ini dilakukan terutama saat siswa melakukan/ mengalami suatu permasalahan yang berpotensi menimbulkan penurunan prestasi belajar siswa atau bahkan drop out.

Dokumentasi :



B. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2015	12,81	13,04	-
	2016	12,83	13,16	
	2017	13,13	13,46	
2	2018	13,47	13,47	-
3	2019	13,50	13,48	-

Sumber: Buku statistik daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “rata-rata lama sekolah”:

- DINAS PENDIDIKAN

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis:

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lombok Tengah untuk menikmati jenjang pendidikan selama 13,67 tahun atau harapannya baru mencapai tahun kedua di perguruan tinggi. Capaian HLS Lombok Tengah sama dengan capaian Provinsi NTB. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang disuatu wilayah. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang sangat penting karena berkaitan erat dengan peluang kesempatan kerja. Apalagi Lombok Tengah dengan progres pembangunan di sektor pariwisata, membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pelayanan pendidikan serta perbaikan pelayanan dasar di masyarakat.

Variabel yang mempengaruhi indikator HLS pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. Jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. Kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan;
7. kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. Faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “HLS” di Lombok Tengah antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan yang memadai dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan siswa baru;
2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ramah anak dan ramah gender di sekolah-sekolah. Hal ini untuk memastikan perlindungan dan pemberian rasa nyaman bagi seluruh peserta didik;
3. Pemberian bantuan dana pendidikan melalui BOS untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah sekaligus meringankan biaya pendidikan bagi siswa;
4. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar;
5. Pemberian bantuan sosial ekonomi kepada individu/ kelompok masyarakat yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair, penggalakan investasi di daerah dll. Upaya ini merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan di daerah yang secara langsung dapat meningkatkan angka HLS di Lombok Tengah;

Dokumentasi :



C. PAUD TERAKREDITASI A, SD TERAKREDITASI A, SMP TERAKREDITASI A

Perbandingan capaian Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020:

INDIKATOR	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
Paud terakreditasi A	0	-	-
SD terakreditasi A	5,79	-	-
SMP terakreditasi A	9,5	-	-

**Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerjaIndikator
“PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A”:**

- DINAS PENDIDIKAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program Pendidikan Luar Biasa
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis:

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

PAUD TERAKREDITASI A

Pada tahun 2020belum ada lembaga PAUD yang terakreditasi A. Indikator PAUD Terakreditasi A ditargetkan 1,11% dari 361 PAUD Formal dan terealisasi 100% (361 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C). Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2016-2020 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikantahun 2016-2021, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,11% dari total 361 lembaga

PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2020 dari 361 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 100% atau 361 lembaga yang terakreditasi B Sebanyak 139 Lembaga & yang terakreditasi C Sebanyak 222 Lembaga. Akreditasi PAUD dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran, diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 9.077.905.300,00 terealisasi sebesar Rp. 8.882.298.708,00 (97,85%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
- (3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (5) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- (6) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- (7) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Hambatan/ masalah yang menjasi penyebab belum tercapainya target Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” antara lain:

1. Penilaian akreditasi dilaksanakan tiap lima tahun karena jangka waktu akreditasi adalah 5 (lima) tahun. Saat ini, masih berlaku hasil akreditasi yang lama sehingga belum ada yang mengajukan permohonan akreditasi ;
2. Sebagian besar PAUD diselenggarakan yayasan/ swasta yang tidak memiliki hubungan struktural hirarkis dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan minimnya intervensi yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka akreditasi PAUD;

3. Pertambahan jumlah lembaga PAUD belum dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan dan pelayanan PAUD;
4. Dampak covid 19

SD / SMP TERKREDITASI A

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

Pada tahun 2020 ditargetkan 5,18% (31 SD) dari 604 SD mendapat Akreditasi A dan terealisasi sebesar 5,79% (35 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 10,06% (18 SMP) dari 179 SMP terakreditasi A dan terealisasi sebesar 9,50% pada Tahun 2019.

Pendukung capaian kinerja indikator SD / SMP terakreditasi A :

- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses dan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat khususnya penduduk usia sekolah, serta semakin banyak lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat/yayasan yang berdampak kepada bertambahnya jumlah daya tampung pada SD/MI dan SMP/MTs
- Peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan melalui penyelenggaraan Diklat, Tugas/ Ijin belajar, sosialisasi, studi banding dll;
- Adanya program akreditasi sekolah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan proses belajar mengajar telah memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Komitmen Pemkab. Lombok Tengah yang besar dalam dunia pendidikan inklusi yaitu mewajibkan sekolah umum untuk menerima pelajar berkebutuhan khusus;
- Gerakan Masyarakat Penuntasan Tuntutan dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forkopimda dan seluruh jajaran pendidikan.
- Gerakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah

Belum tercapainya target SD dan SMP terakreditasi A Tahun 2019 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan di sekolah yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada.

II.3.2.2 SASARAN 4
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Usia Harapan Hidup. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,91	66,06	66,21	100,46	100,23	65,59*	65,59	BPS Lombok Tengah Tahun 2020	LINTAS OPD

Sumber: BPS Lombok Tengah Tahun 2020

Perbandingan capaian Indikator “Usia Harapan Hidup” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2017	65,28	65,55	71,06
2	2018	65, 59	65,87	71,20
3	2019	65,91	-	-
4	2020	66,21	-	-

Sumber: Berita Resmi Statistik tentang Profil IPM Lombok Tengahtahun 2020 BPS Lombok Tengah. lomboktengahkab.bps.go.id/indicator/26/80/1/angka-harapan-hidup.html

Progam/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Usia Harapan Hidup” antara lain:

A. DINAS KESEHATAN

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
- Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

B. DINAS SOSIAL

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

C. DINAS KETAHANAN PANGAN

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
- Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
- Penyusunan neraca bahan makanan
- Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
- Peningkatan cadangan pangan pemerintah
- Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan

- Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
- Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program peningkatan pengendalian polusi
- Program Pengelolaan Sampah

E. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Analisis:

Pendukung capaian indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” antara lain:

1. Sosialisasi gerakan hidup sehat masyarakat (GERMAS);
2. Sosialisasi pentingnya PHBS kepada sekolah, kantor/ instansi pemerintah/ swasta serta kepada masyarakat luas;
3. Pemberdayaan POSYANDU dalam peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Pemberdayaan keluarga yang diinisiasi oleh PKK dan dharma wanita. Melalui pendekaan berbasis dasa wisma, PKK dan Dharma wanita dapat memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman dan sejahtera;
5. Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
6. Pembangunan fasilitas umum yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh: pembangunan pasar, jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dll
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terutama perlindungan dari tindakan kriminal/ kejahatan;
8. Pembantuan lembaga yang menyelenggarakan manajemen penanggulangan

bencana yaitu BPBD, Dinas Ketahanan pangan, dll

- 9. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Contoh: adanya kegiatan rehab Puskesmas agar prasarana Puskesmas lebih nyaman dan memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- 10. Adanya kegiatan standarisasi / akreditasi Puskesmas;
- 11. Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas;
- 12. Kegiatan Monev ke Puskesmas secara rutin.

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. AHH selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Lombok Tengah mencapai 66,21 tahun, mengalami peningkatan 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup dan pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup	Pertumbuhan Angka Harapan hidup
2016	65,01	0,40
2017	65,28	0,42
2018	65, 59	0,47
2019	65,91	0,32
2020	66,21	0,30

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat, AHH Kabupaten Lombok Tengah masih berada dibawah AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nilainya 68,16 tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan AHH yang berada dibawah laju pertumbuhan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah kondisi kesehatan masyarakat yang terhindar dari berbagai penyakit. Angka kesakitan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cukup tinggi yaitu 31,07%. Sedangkan Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup rendah yaitu hanya 11,05 %. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi penyakit seperti PHBS dan penataan lingkungan agar lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk bergabung dan aktif dalam jaminan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pembiayaan pengobatan jika masyarakat terkena atau menderita sakit.

Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik Jenis Kelamin	Angka Kesakitan
Laki-laki	25,85
Perempuan	28,78
Kelompok Pengeluaran	

40 Persen Terbawah	26,08
40 Persen Tengah	28,68
20 Persen Teratas	27,45
Lombok Tengah	27,39

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Halaman: 31

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
Laki-laki	86,74
Perempuan	83,89
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	87,26
40 Persen Tengah	85,66
20 Persen Teratas	80,16
Lombok Tengah	11,05

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 32

Dokumentasi:



II.3.2.3 SASARAN 5

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEMPATAN KERJA

Sasarantersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), . tingkat partisipasi angkatan kerja dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Angka PMKS	orang	1.901	1.092	13.029	-485	-	-	-	Rekapitulasi Penanganan PMKS Lombok Tengah Tahun 2020	Dinas sosial
2	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,,23	74,65	75,04	101,10	100,53	66,97	-		Dinas tenaga kerja/ bappeda/ bps
3	Pengeluara n per kapita disesuaikan	Rp (ribu) /tahu n	10,03	10,252	99,22	97,08		9.800	-		
						-					

Catatan :
1. *Angka PMKS Tahun 2016 (kondisi awal RPJMD) Dinas Sosial tidak dapat menyampaikan data jumlah/ angka PMKS Tahun 2017, 2018 dan 2019.

A. ANGKA PMKS

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Angka PMKS” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2018	-	-	-
2	2019	-	-	-
3	2020	68.752	-	-

Catatan: angka PMKS Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.
Sumber. Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Angka PMKS antara lain:

A. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

B. DINAS SOSIAL

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Analisis:

Salah satu faktor pendukung dalam penanganan masalah PMKS di Kabupaten Lombok Tengah adalah peran aktif Pemerintah Kabupaten/ Dinas Sosial dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD II.

Capaian kinerja indikator “angka PMKS” ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam visi, misi dan penjabaran dalam perencanaan pemerintah daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya program/ kegiatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kemiskinan seperti: rehab rumah tidak layak huni oleh dinas Perumahan dan Permukiman, kursus/ pelatihan keterampilan oleh BLK (Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi), Bantuan sosial kepada PMKS oleh Dinas Sosial, bantuan peralatan usaha bari UKM, dll
4. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
5. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh BLK;
6. Pembinaan terhadap UMKM melalui pemberian modal, pelatihan, bantuan alat, sampai dengan pemasaran produk;
7. Perluasan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan job fair di daerah.

Dokumentasi :



B. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

**Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Parisipasi Angkatan Kerja”
Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :**

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2017	69,31	-	-
2	2018	66,97	-	-
3	2019	69,39	-	-
4	2020	75,04	-	-

Catatan: angka TPAK Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.

**Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja antara lain:**

- A. DINAS PENDIDIKAN
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program Pendidikan Luar Biasa
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- B. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- C. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program pengembangan wilayah transmigrasi

D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

E. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah penduduk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peran serta penduduk dalam kegiatan perekonomian wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK akan memberikan gambaran bagaimana besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja disuatu wilayah sehingga mencerminkan besarnya angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

TPAK Kabupaten Lombok Tengah berada di atas 60 persen artinya dapat dikatakan bahwa partisipasi tenagakerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPAK” antara lain:

1. Bertambahnya investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Investasi ini dapat bersumber dari pemerinah mapun swasta pada sektor formal dan informal. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika, berkembangnyadesa wisata di kab. Lombok Tengah;
2. Pelaksanaan job fair yang dapat menarik cukup banyak tenga kerja;
3. Pembentukan LTSP-P2TKI (Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Adanya peningkatan jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;

5. Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara *online* dan *offline* (promosi dalam daerah dan luar daerah);
6. Tersedianya lapangan kerja di dalam dan luar negeri;
7. Pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) maupun yang dilaksanakan oleh lembaga kursus swasta;
8. Peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**TPAK dan TKK Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2014-2015 dan 2017-2019 (persen)**

Tahun	TPAK	TKK
(1)	(2)	(3)
2014	71,81	93,63
2015	67,41	92,58
2017	69,31	97,10
2018	66,97	96,92
2019	69,39	-----

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 terdapat 670,88 ribu penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 69,39 persen merupakan angkatan kerja dan 33,03 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Pada tahun 2019, angka TPAK Kabupaten Lombok Tengah menurun sebanyak 2,42 poin dibanding tahun 2018. Dari sisi TKK, pada tahun 2019 sebanyak 97,82 persen angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Angka ini mengalami penurunan 0,18 poin dibanding tahun 2018.

Peningkatan dan penurunan nilai TPAK dan TKK di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan atau penurunannya. Sonny Sumarsono dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Tahun 2009. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. hal 76 sebagaimana dikutip oleh Hidayat Muhammad, (2014:33) Menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni;

- a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah

dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat.

d. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2001:45) dalam Fudloli dan Sukidin (2015;18) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK disuatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.
2. Jenis kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitanya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.
4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

Dokumentasi :



C. PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 mencapai 9,796 juta rupiah, 2019 mencapai 10,196 Juta Rupiah dan pada

Tahun 2020 mencapai 9,952 Juta Rupiah Menurun 244 ribu rupiah dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Tahun	Kabupaten Lombok Tengah
2015	8,85
2016	9,08
2017	9,32
2018	9,80
2019	10,2
2020	9,95

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020,

Progam/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Pengeluaran Perkapita disesuaikan” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Analisis:

Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” sangat berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran perkapita masyarakat. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Pendukung capaian kinerja Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selalu positif dan meningkat. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi masyarakat termasuk pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
2. Ketersedian faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja yang cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah. Faktor produksi mempengaruhi kelancaran dan kapasitas produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Disisilain, kegiatan ekonomi dalam masyarakat berpengaruh secara resiprokal dengan belanja/pengeluaran masyarakat;
3. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018. Kondisi ini mencerminkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar ada pada sektor agraris terus mengalami pertumbuhan yang diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada masyarakat;
4. Kondusifitas keadaan kamtrantibum di masyarakat yang memungkinkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
5. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat menjadi pemicu/ penggerak perekonomian masyarakatan. Secara umum, belanja kegiatan pemerintah merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian di daerah. Contoh: Pembangunan dan rehab pasar tradisional diseluruh kecamatan bahkan di Desa Kopang Rembiga telah dilaksanakan pembangunan pasar tradisional modern terbesar di NTB. Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur pelayanan dasar lain sesuai kebutuhan masyarakat, Pembinaan kepada UMKM, Pelatiha ketrampilan bagi pencari kerja, dll.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten

Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 16,75 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 11,92 triliun rupiah, meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan
2010Tahun 2017-2018 dan 2020 (juta rupiah)**

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2017	15.789.214,15	11.551.693,67
2018**	16.750.495,68	11.918.408,40
2020	16.670.395,40	11.571.990,69

* angka sementara

** angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah telah berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung usaha pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi.

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 yaitu mencapai 27,05 persen. Kategori Konstruksi memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 yakni sebesar 15,38 persen. Kemudian diikuti oleh kategori perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 12,14 persen. Kategori ini selalu memberikan peranan di atas 10 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini akibat dampak dari keberadaan Lombok Internasional Airport dan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu agenda prioritas pemerintah yaitu membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan menyiapkan sarana yang mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 memiliki peranan cukup besar mencapai 11,86 persen. Sementara kategori yang lain hanya memiliki peranan dibawah 6 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah.

Peranan Kategori terhadap PDRB Tahun 2018-2020 (persen)

Kategori	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,37	24,80	27,05

B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	4,52	4,95
C	Industri Pengolahan	4,68	4,64	4,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	12,00	13,67	15,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,48	11,86	12,14
H	Transportasi dan Pergudangan	19,11	17,27	9,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,20	1,03
J	Informasi dan Komunikasi	1,44	1,42	1,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,11	2,04	2,50
L	Real Estat	3,76	3,76	4,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,44	6,28
P	Jasa Pendidikan	4,51	4,62	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,33	2,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,06	2,11	2,19
PDRB		100	100	100

* angka sementara

** angka sangat sementara

II.3.3 TUJUAN 3

MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

Tujuan tersebut diukur dengan 2(Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan indeks gini. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56	6,61	-6,08	-101,33	-	3,17	-	Buku Lombok Tengah Dalam Angka TAHUN 2020	Bappeda/bps
2	Indeks Gini	Poin	0,336	0,332	0,312*	107,14	-	0,332	-		Bappeda/bps
						Kriteria 2020 : SEDANG					

Ket: * Kondisi Tahun 2018. Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Perbandingan Indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	-	-	6,28
2015	-	-	5,60
2016	-	-	5,65
2017	-	-	6,42
2018	-	-	3,17
2019	-	-	4,06
2020	-	-	-6,08

Catatan: capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi NTB dan Nasional tidak ada data

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” antara lain:

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program pengembangan wilayah transmigrasi

C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

E. DINAS PERTANIAN

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Analisis:

Pada Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Lombok Tengah melambat 3,17%. Hal ini disebabkan karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan akibat kekeringan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB karena Pandemi Covid 19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 (%) adalah sebagai berikut: Tahun 2016= 5,65, Tahun 2017=6,42, Tahun 2018=3,17, Tahun 2019= 4,06, dan tahun 2020= -6,68. Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 didominasi oleh Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 14,20 persen. Kemudian diikuti oleh Informasi dan Komunikasi yang hampir sama peranannya dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah. Pertanian menyumbang -0,42 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya hanya menyumbang dibawah 0,5 persen.

Pendukung capaian kinerja “laju pertumbuhan ekonomi” antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di daerah;
2. Sosialisasi dan pelatihan *enterpreneurship* kepada masyarakat;
3. Fasilitasi promosi produk UMKM dalam pelaksanaan pameran-pameran dan event-event regional/ nasional;
4. Peningkatan kualitas dan kemudahan dalam perizinan;
5. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap UMKM di daerah;
6. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah
7. Intensitas promosi wisata oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi;
8. Keberadaan obyek wisata alam dan budaya yang menarik;
9. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
10. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
11. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
12. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budayalokal. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami perlambatan sebesar -6,68 persen. Hal ini karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat dari menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat yang berimbas pada berkurangnya jumlah penumpang pesawat akibat Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia tahun 2020. Meskipun demikian, ekonomi Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung kantor pemerintah, kampus politeknik, pengembangan kawasan KEK Mandalika, serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2018 (persen)

ategori	Uraian	Laju PDRB		
		2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.24	1.55	-0.42
B	Pertambangan dan Penggalian	6.53	13.09	1.08
C	Industri Pengolahan	1.55	3.60	-3.05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.14	9.59	9.72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	-0.43	-1.78
F	Konstruksi	5.49	15.14	3.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.73	6.33	-5.57
H	Transportasi dan Pergudangan	-1.00	-5.55	-45.02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.86	1.78	-20.43
J	Informasi dan Komunikasi	5.34	4.24	12.92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.87	1.49	14.20
L	Real Estate	4.94	4.98	1.42
M,N	Jasa Perusahaan	5.08	5.16	-2.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.76	3.43	2.96
P	Jasa Pendidikan	5.53	6.96	1.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.54	6.18	0.72
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.06	5.36	-5.41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		3.14	4.06	-6.68

* Sumber Data dari Bps Lombok Tengah
 Angka Sementara*
 Angka Sangat Sementara**

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir meskipun di tahun 2020 mengalami perlambatan. Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi -45,02 persen pada tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan

dan Asuransi sebesar 14,20 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Jasa Infrmasi dan Komunikasi mencapai 12,92 persen dan Pengadan Listrik dan gas sebesar 9,72 persen. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta hanya mampu tumbuh 4,83 persen di tahun 2020, begitupula dengan kegiatan pertambangan dan penggalian sebagai penopang kegiatan konstruksi tumbuh selaras sebesar 4,86 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Sangat Menurunmencapai -0,42

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2017-2020 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	24,89	24,75	24,95	25,36	24,80
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,70	3,79	3,91	4,04	4,48
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,93	4,85	4,79	4,67	4,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi/Construction	11,13	11,35	11,47	11,99	13,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,48	10,83	11,09	11,48	11,84
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	21,91	21,46	20,87	19,14	17,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1,19	1,24	1,26	1,24	1,22
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,39	1,39	1,43	1,43	1,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,84	1,93	2,03	2,11	2,04
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,64	3,67	3,66	3,77	3,76
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	6,07	5,84	5,62	5,57	5,43
P	Jasa Pendidikan/Education	4,33	4,42	4,41	4,51	4,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,21	2,19	2,17	2,30	2,36
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1,98	1,97	2,02	2,07	2,12
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara/Definitive Figure

* angka sementara

** angka sangat sementara

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat perubahan cuaca beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun yang berpengaruh terhadap hasil pertanian.

Dokumentasi :



B. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Perbandingan Indikator “Indeks Gini” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan

apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Perbandingan Indikator Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional

N o	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lombok Tengah	0,352	0,348	0,332		0,312*
2	NTB	0,359	0,371	0,372		
3	Nasional	0,394	0,391	0,384	0,382	

Sumber : Laporan Bappeda Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Indeks gini” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Program pengembangan Ekonomi pedesaan
- Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
- Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Dalam Lima tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah dalam kategori sedang dan cenderung bergerak kearah pemerataan. Penurunan tertinggi terjadi pada periode 2016 sebesar 0,352 point meskipun mengalami pelambatan pada periode berikutnya. Namun pada tahun 2020 tingkat penurunan kesenjangan menunjukkan perbaikan yaitu mampu turun sebesar 0,312 dari tahun 2017 dan tingkat kesenjangan di Kabupaten Lombok Tengah masih di bawah gini ratio Provinsi NTB.

Pendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengurangi indeks gini antara lain dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan tentang pemetaan, fokus, perencanaan pembangunan serta penetapan pembagian daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;

- Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
- Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
- Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
- Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
- Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
- Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

II.3.3.1 SASARAN 6

MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN, JASA UNGGULAN

DAN INVESTASI DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,47	4,68	-3,52	-78,75		4,69	1,47		Bappeda/ bps/ dinas perindag
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	8,24	8,81	-20,43	-255		7,0	2,04		Bappeda/ bps/ dinas parbud
Rata-rata							Kriteria 2019 : KURANG				

A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Perbandingan Indikator “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan			
2019	4,63	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum			
2019	1,22	-	-

Catatan: “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” Provinsi NTB dan nasional tidak ada data

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Program pengembangan Ekonomi pedesaan
- Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
- Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 647,43 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 827,08 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun kontribusinya cenderung menurun terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Tengah. Kontribusi kategori ini pada tahun 2019 sebesar 4,63 persen, terendah selama lima tahun terakhir.

Menurunnya kontribusi kategori industri pengolahan bukan berarti nilai tambah yang dihasilkan berkurang. Tapi karena kenaikan nilai tambah kategori ini tidak sebesar kenaikan nilai tambah kategori lain.

Industri pengolahan pada tahun 2019 mengalami perumbuhan sebesar 3,52 persen karena peningkatan produksi industri pengolahan tembakau, industri barang dari kayu, dan industri barang galian bukan logam.

Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB perkapita (juta Rp)	Laju pertumbuhan PDRB (%)
2016	15,64	8,79
2017	16,96	8,44
2018	17,83	5,12
2019		
2020		

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2020

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2020)

Kategori	Uraian	Laju PDRB				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.86	6.37	2.24	1.55	-0.42
B	Pertambangan dan Penggalian	9.36	7.12	6.53	13.09	1.08
C	Industri Pengolahan	3.19	4.69	1.55	3.60	-3.05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.85	5.39	1.14	9.59	9.72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.72	3.95	0.32	-0.43	-1.78
F	Konstruksi	8.68	7.03	5.49	15.14	3.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.12	7.93	5.73	6.33	-5.57
H	Transportasi dan Pergudangan	5.74	6.23	-1.00	-5.55	-45.02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.54	7.01	1.86	1.78	-20.43
J	Informasi dan Komunikasi	8.62	8.02	5.34	4.24	12.92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.11	10.48	6.87	1.49	14.20
L	Real Estate	6.54	6.81	4.94	4.98	1.42
M,N	Jasa Perusahaan	6.72	5.34	5.08	5.16	-2.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.31	2.56	0.76	3.43	2.96
P	Jasa Pendidikan	6.01	5.62	5.53	6.96	1.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.78	6.02	7.54	6.18	0.72
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.25	6.81	5.06	5.36	-5.41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		5.65	6.43	3.14	4.06	-6.68

* Angka sementara/Preliminary Figures

Penghambat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020;
2. Kondisi masyarakat Lombok Tengah yang dominan bersifat agraris dan belum mengarah pada sektor industri. Masih dominannya sektor pertanian sebagai bidang yang digeluti masyarakat menyebabkan perhatian terhadap sektor industri pengolahan belum berkembang dengan baik;
3. Keterbatasan bahan baku industri yang memenuhi standar tertentu dan terjamin kontinuitas pasokan sepanjang tahun;
4. Masih kurangnya inovasi dan kapasitas SDM dalam melakukan identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran hasil industri sektor pengolahan;
5. Keterbatasan modal usaha, karena industri pengolahan dipastikan membutuhkan sarana prasarana serta modal awal yang cukup untuk menjalankan suatu usaha;
6. Masih kurangnya jaringan/ hubungan usaha dengan industri pengolahan di daerah lain yang menyulitkan akses modal, pemasaran dan *transfer of knowledge*;
7. Bencana Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya kab. Lombok Tengah mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sektor sekunder dan tersier. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 17,88 triliun rupiah. Angka ini bertambah 1,17 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Struktur perekonomian Lombok Tengah tahun 2019 masih sama seperti tahun sebelumnya. Lapangan usaha pertanian masih mendominasi perekonomian Lombok Tengah tahun 2019. Lapangan usaha ini berperan 24,80 persen. Diikuti

Jasa Transportasi dan Pergudangan, yang menyumbang 17,33 persen dalam pembentukan ekonomi Lombok Tengah. Kontribusi lapangan usaha ini menurun dibanding tahun sebelumnya akibat dampak gempa Lombok tahun 2018.

Jenis Industri	2018	2019
Industri Agro	6 210	6 237
Industri Sandang	7 986	8 073
Industri Kimia dan Bahan Bangunan	1 714	1 431
Industri Kerajinan	25 464	19 282
Logam Mesin Elektronika dan Aneka	1247	778
TOTAL	42 621	35 801

Dokumentasi:



II.3.3.2 SASARAN 7
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR AGRARIS
SERTA KETAHANAN PANGAN

Sasaran tersebut diukur dengan 2(Dua) indikator yaitu: Rata-rata Nilai Tukar Petani dan skor pola pangan harapan. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	105,48	105,69	109,22	103,55	103,34	104,36*	-*		Bappeda/ bps/ dinas pertanian
2	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,8	86,00	93,80	109,32	109,07	-90,7	-	Laporan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020	Dinas ketahanan pangan
Rata-rata						102,54 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Catatan: * Nilai Tukar Petani Kondisi Tahun 2016. Dinas Pertanian tidak dapat menyampaikan data NTP Tahun 2017, 2018 dan 2019. Data Tahun 2020 sumber dari BPS Prov. NTB

A. NILAI TUKAR PETANI

Perbandingan capaian indikator “Nilai Tukar Petani” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Lombok Tengah
2016	-	-	104,36
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	103,22	113,40 (agustus 2019)	-
2020	-	-	109,22

Sumber: Berta Resmi Statistik tentang Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi, dan BPS prov. NTB

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator “nilai tukar petani” antara lain:

- A. DINAS PERTANIAN
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan

- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Program Pengembangan Keciaptakaryaan
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

Analisis :

Nilai Tukar Petani sangat dipengaruhi oleh produktivitas padi, luas lahan, pendidikan (tahun), jumlah anggota keluarga petani (jiwa), harga gabah (rupiah), harga benih (rupiah), biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, pengeluaran pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan) dan pengeluaran non pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan). Perubahan terhadap variabel tersebut diatas dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendukung capaian kinerja “nilai tukar petani” antara lain:

1. Kondisi geografis dan luas areal pertanian di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Bahkan Lombok Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pangan terutama komoditi padi;
2. Upaya intensifikasi pertanian secara modern yang didukung dengan penyuluhan yang intensif;
3. Tradisi dan budaya masyarakat Lombok Tengah bersifat agraris;
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani;
5. Pemberian penyuluhan secara intensif kepada petani;
6. Pemberian bantuan peralatan pertanian seperti traktor, alat pembasmi hama, alat panen dll;
7. Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani;
8. Pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat;
9. Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian kepada kelompok tani;
10. Penyediaan bibit-bibit unggul pertanian (tanaman/ hewan);
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan;
12. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dokumentasi



B. POLA PANGAN HARAPAN

Perbandingan capaian indikator “Pola Pangan Harapan” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2016	85	94,34	86,0
2017	80,8	83,30	88,0
2018	85,5	89,88	-
2019	90,7	-	-
2020	93,80	-	-

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Pola Pangan Harapan” antara lain:

DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
- Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

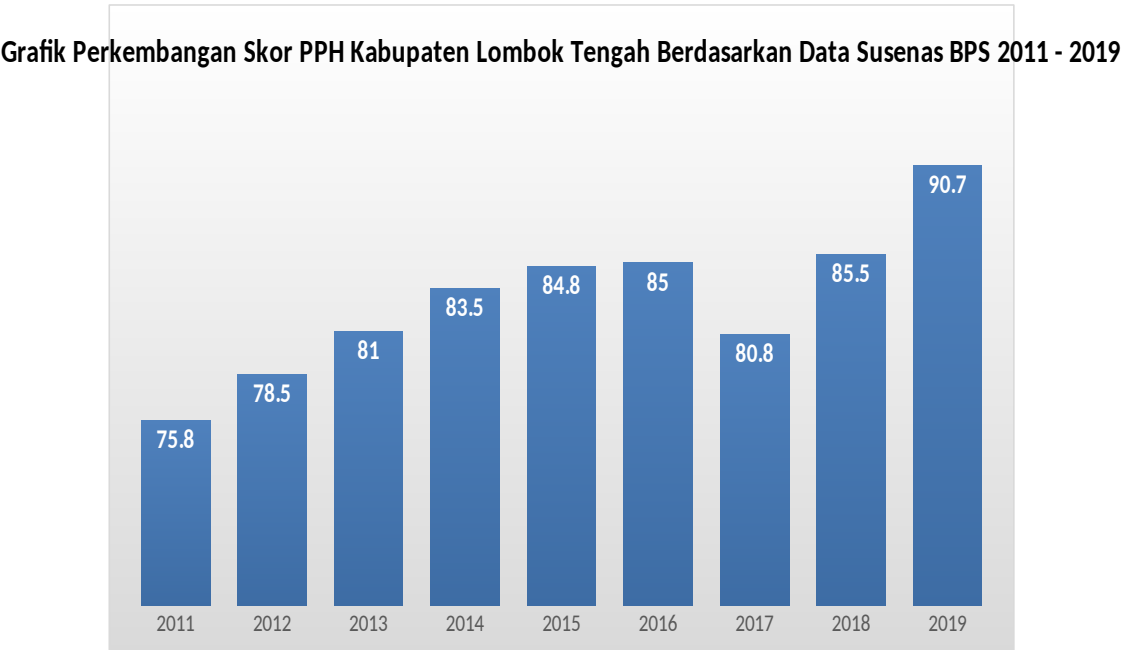
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
- Penyusunan neraca bahan makanan
- Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
- Peningkatan cadangan pangan pemerintah
- Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
- Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
- Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Analisis

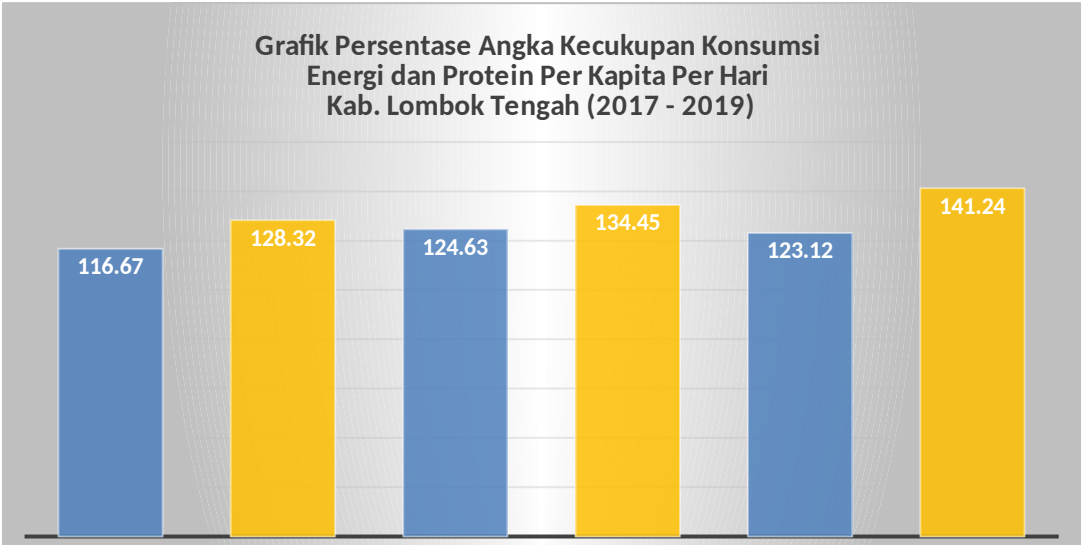
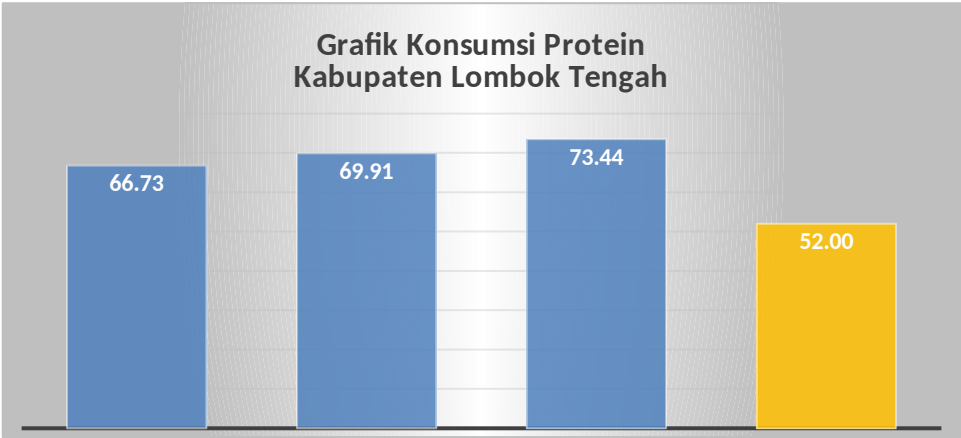
Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis PPH dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 . PPH Kabupaten Loteng pada tahun 2020 sebesar 93,8 point dari target 87 point, artinya terjadi peningkatan sebesar 4,25 % sedangkan PPH ideal sebesar 100%.. Selain itu, Konsumsi Energi dan Protein selama 3 tahun terakhir berada diatas standar Angka Kecukupan Gizi yaitu 2000 kilo kalori untuk energy dan 52 gram untuk protein.

Pendukung pencapaian indikator “skor pola pangan harapan” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas;
2. Adat budaya masyarakat yang bersifat agraris dan telah mempraktekkan sistem ketahanan pangan sejak dahulu. Hal ini tercermin dari bentuk bangunan khas masyarakat sasak berupa lumbung padi tempat menyimpan hasil-hasil pertanian.
3. Varietas/ jenis tanaman pangan yang beragam/ variatif;
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif;
5. Program pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
6. Pembangunan lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah;
7. Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
9. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
10. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)



Adapun perkembangan PPH di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik-grafik sebagai berikut:



Untuk menunjang pencapaian ketahanan pangan, Kabupaten Lombok Tengah juga telah melakukan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahunan dilakukan dengan menggunakan data statistik pada tahun sebelumnya. Data yang dihimpun untuk mendukung analisis SKPG tahunan meliputi 3 (tiga)

aspek/pilar ketahanan pangan, yaitu 1) aspek ketersediaan pangan; 2) aspek akses pangan; dan 3) aspek pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil analisis data SKPG tahunan (Januari – Desember 2020), maka dapat disimpulkan bahwa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan Pangan

Dari aspek ketersediaan pangan, semua kecamatan dalam kondisi aman (hijau). Ini terjadi karena analisis menunjukkan bahwa rasio ketersediaan terindikasi tinggi.

2) Akses Pangan

Dari aspek akses pangan, seluruh kecamatan dalam kondisi rawan, kondisi ini disebabkan oleh tingginya rasio keluarga miskin terhadap jumlah keluarga di masing-masing kecamatan.

3) Pemanfaatan Pangan

Dari aspek pemanfaatan pangan, seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam aman (warna hijau).

4) Komposit

Hasil analisis komposit dipengaruhi oleh aspek ketiga aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek akses dan aspek pemanfaatan pangan. Sesuai dengan hasil analisis komposit menunjukkan dalam kondisi rawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

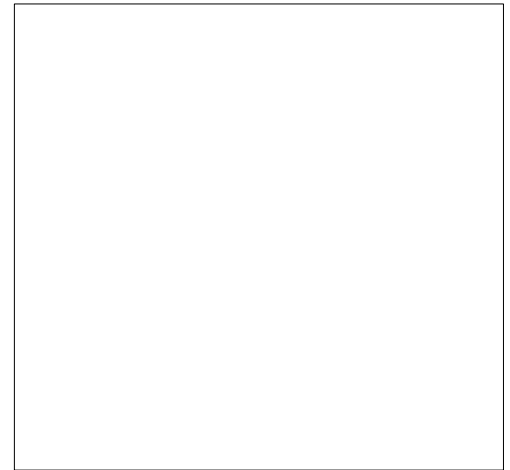
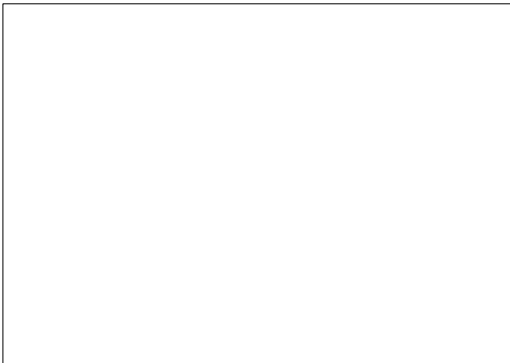
- Tim SKPG perlu melakukan investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- Bila kondisi kerawanan pangan cukup dalam, maka perlu dilakukan intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan bertujuan untuk mewujudkan penyediaan aneka ragam pangan sehingga konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan tahun 2020 adalah 12 Kelompok KK Miskin dan 1 Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh di Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya di Kabupaten Lombok Tengah.

-
- a. Pengembangan tanaman sayuran dalam polybag di pekarangan anggota kelompok telah dilaksanakan. Seluruh kelompok telah melakukan pembibitan di rumah bibit dan hasilnya ditanam dalam polybag.
 - b. Pengembangan ternak ayam KUB telah dilaksanakan di setiap KK Miskin masing-masing sebanyak 40 ekor ayam KUB.
 - c. Tanaman buah-buahan yang disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, telah ditanam oleh KK Miskin. Setiap KK mendapatkan 3 bibit Jambu Kristal.
2. Kegiatan pelatihan Demonstrasi pengolahan pangan alternatif dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta 60 orang dari Kelompok Wanita Tani yg dapat bantuan alat pengolahan pangan.
 3. Kegiatan peningkatan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2019 sebanyak 15 ton dengan pembelian beras kelas medium. Sistem penyimpanan dilakukan dengan kerjasama dengan Gapoktan Binaan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut jumlah beras yang dititip, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak. Setiap pemerintah membutuhkan beras maka gapoktan harus siap menyediakan beras yang dibutuhkan. Jumlah cadangan pemerintah sampai dengan Desember tahun 2019 sebanyak 41.120 kg. Jumlah ini terdiri dari saldo beras tahun 2018 sebanyak 26.370 kg dan pembelian tahun 2019 sebanyak 15.000 kg sehingga berjumlah 41.120 kg. Beras cadangan pemerintah ini dititip di dua Gapoktan yaitu Gapoktan Usaha Bersama sebanyak 26.370 kg dan Gapoktan Patuh Bersama sebanyak 14.750 kg.
 4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan sarana pendukung lainnya .yaitu berupa Gudang Lumbung Pangan, Lantai Jemur , Rumah RMU dan Mesin RMU masing-masing 1 unit. Lokasi pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yaitu di Kelompok Tani Harapanan Bersama Desa Jango Kecamatan Janapria dan Gapoktan Sopok Angen Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang
 5. Kegiatan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dokumentasi:



II.3.4 TUJUAN 4
MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
KETERPADUAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Indeks Wiliamson. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Wiliamson	Poin	0,40	0,39	0,36	110	-	-	0,40	Kertas Kerja Hasil penghitungan Indeks Wiliamson Kab. Lombok Tengah Tahun 2019. Bappeda Lombok Tengah	Bappeda/ bps
Rata-rata						100 %	Kriteria 2020 : Sangat BAik				

Perbandingan capaian indikator “indeks wiliamson” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2020	0,36	-	-

Catatan: Data Indeks Wiliamson NTB dan Nasional Tahun 2020 tidak ada.

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “indeks wiliamson” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Program Pengembangan Keciaptakaryaan
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

G. DINAS PERKIM

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

H. DINAS SOSIAL

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Program pengembangan Ekonomi pedesaan
- Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
- Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis :

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson

menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeks, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeks dibawah 0,50.

Faktor yang mempengaruhi indeks wiliamson (Damarjanti;2010):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari beberapa variabel antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Jam Kerja, dan Harapan Hidup Waktu Lahir
2. Tingkat Pengangguran
3. APK SMA
4. Aglomerasi (pemusatan aktivitas) produksi

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Islami (2018), faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Indeks Wiliamson di Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kriteria rendah. Artinya ketidakmerataan / kesenjangan pendapatan antar wilayah (kecamatan) di Lombok Tengah masih rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sumber daya alam antar kecamatan yang relatif serupa / merata serta mobilitas barang, jasa dan investasi yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan pertumbuhan PDRB juga selalu meningkat.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks wiliamson” di Kabupaten Lomok Tengah antara lain:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi pada pemetaan dan fokus pembangunan, perencanaan pembangunan serta daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;

3. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Penyelarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional, provinsi dan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pembangunan serta menghindari tumpang tindih perencanaan/ pembangunan di daerah;
5. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah secara kontinyu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan oleh tiap OPD dapat berjalan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat;
6. Pemanfaatan Dana Desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
7. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
8. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
9. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
10. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
11. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
12. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Dokumentasi :



II.3.4.1 SASARAN 8

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR

DALAM MENDUKUNG KONEKSITAS WILAYAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	74,72	75,79	65,03	87,50	85,81	-	-	Laporan realisasi RPJMD Lombok Tengah di BAPPEDA Lombok Tengah	Dinas PU
Rata-rata						85,5 %	Kriteria 2020 : BAIK				

Sumber: Bappeda Lombok Tengah

Perbandingan capaian indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2020	65,03	-	-

Sumber: BAPPEDA Lombok Tengah Realisasi RPJMD 2016-2021

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis”antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakarya
 - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- Program pengembangan data/informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, diketahui bahwa : “Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan tersebut harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan secara masif mulai dari Tahun 2011 sampai sekarang. Selain kegiatan pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk memaksimalkan penggunaan jalan agar sesuai dengan umur teknis jalan.

Pendukung capaian kinerja indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis”antara lain:

- 1. Komitmen kepala daerah yang sangat besar pada pemenuhan dan perbaikan inftastruktur di daerah, terutama jalan;
- 2. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang intensif;
- 4. Adanya data base jalan dan jembatan di Lombok Tengah;
- 5. Keberadaan sumber daya (personil, peralatan, pendanaan) pada Dinas PUPR yang cukup memadai;
- 6. Pengaturan trayek dan kondisi lalu lintas angkutan oleh dinas perhubungan;

II.3.4.2 SASARAN 9

TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Indeks Lingkungan Hidup dan Ketaatan terhadap RTRW. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53	53,5	66,25	125	123,84	-	58,66	Kertas Kerja penghitungan IKLH Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Dinas LH
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	84,36	86,71	81,40	96,49	93,88	-	91,7	LKjIP Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Tahun 2020	Dinas PU
Rata-rata						125 %	Kriteria 2020 : SANGAT BAIK				

Sumber: Laporan Realisasi RPJMD Lombok Tengah tahun 2020 Dari BAPPEDA

A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Perbandingan IKLH Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	-	56,53	65,73

2	2017	66,698	56,99	66,46
3	2018	58,66	75,16	71,67
4	2019	66,254	64,56	66,55
5	2020	66,25	-	-

Sumber: Bappeda Lombok Tengah

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “IKLH”antara lain:

- A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Program peningkatan pengendalian polusi
 - Program Pengelolaan Sampah
- B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- Program pengembangan data/informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- C. DINAS PERKIM
- Program Pengembangan Perumahan
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

Analisis:

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020				
No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	53,11	30%	15,333
2	Indeks Kualitas Udara	93,74	30%	28,122
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,998	40%	22,799
IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH				66,254

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2020

Kondisi IKLH Tahun 2020 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2017: 48,45, Tahun

2019: 58,66, Tahun 2020: 66,254). Peningkatan kinerja IKLH tahun 2020 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik.

Cakupan layanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

B. KETAATAN TERHADAP RTRW

Perbandingan indikator “ketaatan terhadap RTRW” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	77,32	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-
4	2019	-	-	-
5	2020	81,40	-	-

Sumber: Bapped Realisasi RPJMD Kab. Lombok Tengah 2016-2021

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “ketaatan terhadap RTRW” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakaryaan
 - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- B. DINAS PERKIM
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
- C. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - Program pengembangan data/informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- D. SAT POL PP
 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian keamanan lingkungan
 - Operasi Penegakan PERDA

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

Analisis:

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam capaian kinerja indikator “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama.

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep

audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah .

II.3.4.3 SASARAN 10

MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAM

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Luasan Kawasan Kumuh dan Spot Kawasan Kumuh. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	23,77	11,65	38,15	39,50	-130	-	52,42		Dinas Perkim
	Spot kawasan kumuh	Spot	2	1	3	66,66	-100	-	7		
Rata-rata							Kriteria 2020 : SANGAT BAIK				

Perbandingan indikator “Luasan Kawasan Kumuh” dan “spot kawasa kumuh” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
Indikator : Luasan Kawasan Kumuh				
1	2019	14,86	-	-
Indikator : Spot Kawasan Kumuh				
1	2020	1	-	-

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “luasan kawasan kumuh” dan “spot kawasan Kumuh” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

- Program Pengembangan Keciaptakaryaan
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

B. DINAS PERKIM

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

C. DINAS SOSIAL

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

D. SAT POL PP

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian keamanan lingkungan
 - Operasi Penegakan PERDA
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

E. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Program pengembangan Ekonomi pedesaan
- Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
- Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana permukiman dan penataan lingkungan dalam bentuk Pembangunan Saluran Drainase, Jalan Lingkungan, Trotoar, Rabat dan Normalisasi Saluran Drainase. Total hasil penataan dan pembangunan yang telah dilaksanakan adalah 31.755 m.

Pendukung capaian indikaor kinerja tersebut antara lain :

- a. Penanganan kumuh dilakukan secara kolaborasi yang artinya kerja sama dengan semua pihak sehingga sumber pendanaannya bisa dari APBD,Dana Desa,APBN maupun CSR. Contoh kolaborasi yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan rehab/ pembangunan RTLH disetiap desa/ kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2020, tiap desa/ kelurahan melakukan pembangunan dan rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayahnya masing-masing.

-
- b. Ada dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
 - c. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
 - d. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Namun dalam pelaksanaan Penurunan Kawasan Kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
- b. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penanganan kumuh antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan permukiman;
- b. Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur diantaranya: Pembangunan Saluran Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan yang didukung dengan partisipasi masyarakat setempat yang sumber dananya dari APBD 2020;
- c. Melaksanakan pembangunan / peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman diantaranya: pembangunan saluran air, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan persampahan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sumber dananya dari APBN 2020;
- d. Adanya kegiatan pembinaan komunitas perumahan;
- e. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;

II.3.4.4 SASARAN 11

TERWUJUDNYA KAWASAN PERDESAAN MAJU DAN MANDIRI

Tujuan tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	29	35	33	113,79	94,28	-	-	Laporan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah	DPMD
Rata-rata						112,5 %	Kriteria 2020 : SANGAT BAIK				

Perbandingan capaian indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2018	-	-	-
2019	27	-	-
2020	33	-	-

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang”:

- A. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- Program pengembangan Ekonomi pedesaan
 - Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
 - Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
- B. DINAS PERTANIAN
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang

-
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakarya
 - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- D. DINAS PERKIM
- Program Pengembangan Perumahan
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
- E. DINAS SOSIAL
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- F. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Program peningkatan pengendalian polusi
 - Program Pengelolaan Sampah
- G. DINAS PENDIDIKAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program Pendidikan Luar Biasa
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- H. DINAS KESEHATAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
- Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

Analisis:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan disampaikan bahwa: “Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan”. Kemudian untuk mengetahui secara pasti tingkat perkembangan desa setiap tahun, Pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. “Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan”.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan beberapa aspek sebagai berikut:

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. Pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
- a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;
 - h. penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Penilaian hasil perkembangan desa ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
- b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
- c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Pendukung capaian kinerja “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Tahun 2020 adalah:

1. Sumberdaya (SDM, pendanaan dan kewenangan) pemerintah desa cukup besar. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Adanya tenaga pendamping desa yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tenaga pendamping desa melakukan pendampingan pada hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi sebagai fasilitator dan tim ahli dalam penyelesaian masalah-masalah di desa;

3. Adanya kegiatan Monev pembinaan dari pemerintah supra desa (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat);
4. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa berupa Bimtek, pelatihan, kursus, sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Terdapat banyak LSM/ NGO yang melakukan pembinaan atau pendampingan desa;

Sedangkan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Profil desa/ kelurahan tidak di *up date* secara rutin sehingga data yang disampaikan tidak valid/ akurat;
2. Minimnya kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja di Pemerintahan desa;
3. Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat;
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan *e governance* di desa;
5. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pendampingan OPD teknis terkait terhadap penyelesaian/ penanganan masalah sosial kemasyarakatan di desa;
6. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa.
- 7.

II.3.5 TUJUAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Nilai EKPPD .
 Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Nilai EKPPD	Poin	3,1488	3,1545	3,0479*	96,80	95,6	3,0738	-	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019	Bag. APU
Rata-rata						97,8 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Catatan: *Kondisi Tahun 2019. Nilai EKPPD tahun 2020 akan diumumkan pertengahan tahun 2021

Perbandingan capaian indikator “nilai EKPPD” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2016	3,1254	-	-
2017	3,0332	-	-
2018	3,0738	-	-
2019	3,0479*	-	-
2020			

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai EKPPD”:

A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Program pengembangan data/informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

B. INSPEKTORAT

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

- Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
 - Penataan Kerjasama Daerah

- Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

Analisis:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan”. Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

LPPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan EPPD serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Hasil EPPD akan menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Nilai EKPPD juga disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Nilai EKPPD Kab. Lombok Tengah 2016-2020				
N O	TAHU N	NILAI EKPPD	PREDIKAT	DOK. PENDUKUNG
1	2016	3,1254	Sangat Tinggi	LKJIP BPKP Perwakilan NTB Tahun 2020, Halaman 76-77
2	2017	3,0332	Sangat Tinggi	
3	2018	3,0738	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
4	2019	3,0479*	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
5	2020	-	-	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Catatan: Nilai EKPPD Tahun 2020 Belum Di keluarkan Oleh Kemendagri

MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Sebagian besar OPD tidak memiliki profil atau statistik sektoral sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab sesuai Tupoksi yang dimiliki. Akibatnya sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan akuntabilitas hasil kinerja yang dicapai.
2. Penurunan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD;
3. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pejabat/ pegawai dalam penyelenggaraan kinerja urusan pemerintahan.
4. Kualitas dokumentasi dan pengarsipan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah cukup rendah;
5. Kurangnya harmonisasi/ keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan di daerah.

Berkaitan dengan penyusunan LPPD, kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 antara lain:

No	Tahapan Penyusunan	Uraian	Ket
1	Pengumpulan dokumen wajib ke Bag. APU Setda	Jenis dan jumlah dokumen sesuai daftar yang ditentukan	SKPD mengumpulkan hard copy dan soft copy
2	Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP	Konsultasi tentang format dan tindak lanjut evaluasi inspektorat dan BPKP	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan Oleh Bag. APU/ Tim Kabupaten;• SKPD diminta untuk

No	Tahapan Penyusunan	Uraian	Ket
	Koordinasi dan melengkapi dokumen wajib dari SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan dokumen wajib; Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD 	mengumpulkan seluruh dokumen wajib.
3	Penyusunan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten.	Disusun sesuai pedoman penyusunan laporan SKPD	SKPD dapat berkonsultasi /koordinasi dengan Bag. APU/ Tim Kabupaten.
4	Pengumpulan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten dari masing-masing SKPD kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Bagian APU Setda.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan laporan SKPD dan IKK Kabupaten dilengkapi dengan ekspedisi dan tanda terima; Bag. APU akan melakukan rekapitulasi atas ketepatan waktu pengumpulan laporan /dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> laporan SKPD dan IKK Kabupatendisampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy (disimpan dalam <i>Compact Disc</i> (CD)
5	Klarifikasi dan cross cek data	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan IKK Kabupaten dan Laporan SKPD Tahun 2019; Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD 	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
6	Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP	Konsultasi tentang format IKK Kabupaten dan LPPD Tahun 2020	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
7	Expose draft IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019	Expose dengan mengundang seluruh kepala SKPD dipimpin oleh Bupati Lombok Tengah	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
8	Penyempurnaan dan finishing IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019	Berdasarkan hasil konsultasi dengan inspektorat dan BPKP serta hasil expose yang dipimpin Bupati.	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
9	Pengiriman dokumen	<ul style="list-style-type: none"> kepada Gubernur dan Mendagri. 	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten

II.3.5.1 SASARAN 12

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2(Dua) indikator yaitu: Nilai SAKIP, Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	cc	91,46	50	CC	CC	Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2020	Bag. APU
2	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	WTP	WTP	WTP*	100	100	2	2	Surat Kepala Perwakilan BPK NTB Nomor. Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019	BPKAD
Rata-rata						75 %	Kriteria 2020 : SEDANG				

A. NILAI SAKIP

Perbandingan capaian Kinerja indikator “nilai SAKIP” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional (Kemendagri)
2016	52,01 (CC)	66, 64 (B)	-
2017	51,78 (CC)	61,01 (B)	-

2018	52,02 (CC)	BB	-
2019	54,88 (CC)	BB	-
2020	(CC)	BB	-

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai SAKIP”:

A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Program pengembangan data/informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

B. INSPEKTORAT

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

- Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
 - Penataan Kerjasama Daerah
 - Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

Analisis:

Nilai SAKIP Kab. Lombok Tengah 2015-2019

NO	TAHUN	NILAI SAKIP	PREDIKAT	EVALUATOR	DOK. PENDUKUNG
1	2015				
2	2016	52,01	CC	Inspektorat Provinsi NTB	Laporan hasil Evaluasi Atas LKJIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017, Nomor 700/07 K/INSP/2018, Tanggal 10 Januari 2018
3	2017	51,78	CC		
4	2018	52,02	CC		
5	2019	54,88	CC	KemenPAN RB	Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/399/AA.05/2019, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2019
6	2020		CC	KemenPAN RB	

*Catatan. Nilai Sakip 2020 Belum di Publikasikan oleh MENPAN RB***

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi dan pemetaan peran OPD dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	•BAPPEDA •SELURUH OPD
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	•BAPPEDA •SELURUH OPD
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	•BAGIAN ORGANISASI (SETDA) •BAPPEDA •SELURUH OPD
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	INSPEKTORAT
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	•INSPEKTORAT •SELURUH OPD
	TOTAL	100%		

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/399/AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2020, Perihal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 diketahui bahwa nilai implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan nilai CC dengan kriteria “cukup”. Artinya, Target nilai SAKIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dengan predikat “B” tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi oleh KEMENPAN dan RB beberapa permasalahan utama dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
- b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah di rumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;
- c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, perangkat daerah (PD) dan dokumen perjanjian kinerja sehingga level rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya di dukung oleh kinerja pada unit dibawahnya dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
- f. Pelaporan kinerja masih bersifat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas pada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD.

Pendukung atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator “niai SAKIP” yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Reviu dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan didampingi oleh BPKP perwakilan NTB. Bentuk perubahan adalah: Perbaikan indikator kinerja (Tujuan, sasaran, program dan kegiatan);
2. Penyederhanaan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan.

NO	ASPEK	LAMA	BARU/HASIL REVIU
1	Tujuan	45 (tanpa indikator)	5 (8 indikator)
2	Sasaran	165 (tanpa indikator)	13 (25 Indikator)
3	Program	140	74

3. Reviu dokumen RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah . Bentuk perubahan:
 - Perbaikan indikator kinerja OPD;
 - Penyesuaian dengan RPJMD hasil reviu;
 - Penyesuaian dengan strukutur dan Tupoksi OPD yang baru;
4. Assitensi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi NTB Rabu, 24 April 2019 di Hotel Astoria Mataram. Hasil yang diperoleh:
 - Perbaikan indikator dan konten dokumen-dokumen perencanaan daerah dan OPD;
 - Reviu IKU OPD;
 - Reviu IKU Kabupaten;
 - Penyusunan dokumen cascading kinerja Kabupaten dan OPD;
 - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
 - Meningkatnya kualitas pengarsipan dokumen perencanaan daerah dan OPD.
 - Penyusunan Perjanjian kinerja seluruh pejabat struktural dan staf;
5. Penerapan aplikasi “e SAKIP Lombok Tengah” yang di koordinir oleh Bag. Organisasi.

Hasil: Media penyampaian laporan penyelenggaraan SAKIP oleh OPD.

B. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan capaian indikator “nilai opini pengelolaan keuangan daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB :

NO	Tahun	Lombok Tengah	NTB
1	2016	WTP	WTP
2	2017	WTP	WTP
3	2018	WTP	WTP
4	2020	WTP	WTP

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator nilai SAKIP antara lain:

1. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. INSPEKTORAT
 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - Program pengembangan data/informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 7 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan revidi atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi di daerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
 - Aplikasi “SILAK”;
 - Aplikasi “SIMDA”;
 - Aplikasi “SIDATU”;

Dokumentasi :



II.3.5.2 SASARAN 13

MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1(Satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2018	2019		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,32	9,35	9,64	103,43	103,10	9,47	9,65	Laporan BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2020	BPKAD
Rata-rata						104 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional	Ket
2020	9,64	12,23	-	-

Sumber: Laporan BPKAD

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indiator Tingkat Kemandirian fiskal Daerah antara lain:

- BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
 4. INSPEKTORAT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - Program pengembangan data/informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Rasio kemandirian adalah oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan.Sumber:<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01>.

Berikut disampaikan perhitungan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020

KOMPONEN	NILAI (Rp)	
	2019	2020
PAD	204.508.576.776,21	206.419.405.625,90
PENDAPATAN TRANSFER	1.537.058.189.781,00	1.776.714.951.375,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	377.633.572.110,00	113.616.888.984,00
TOTAL PENDAPATAN	2.119.200.338.667	2.096.662.043.478,8

	,21	5
TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (PAD/ TOTAL PENDAPATAN)	0,0965027 = 9,65 %	0,0984047=9,84%

Sumber: BPKAD Lombok Tengah Tahun 2020, data diolah

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Desentralisasi kewenangan menyebabkan daerah dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih cermat dan responsif memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa uang yang dikelola adalah uang masyarakat sedangkan DPRD harus mampu mengawasi pengelolaan uang oleh eksekutif secara profesional agar sebesar-besarnya bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah antara lain dapat diukur dari tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah. Faktor utama yang paling mempengaruhi kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD yang dimiliki akan menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Sampai dengan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah belum mampu membiayai belanja pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah masih kecil dan didominasi oleh UMK. Jumlah industri menengah/ besar sangat sedikit sehingga belum maksimal dalam menambah lapangan kerja serta pajak/ retribusi daerah;
- b. Kondisi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Contoh: Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki kekayaan tambang yang potensial dikembangkan untuk menjadi industri pertambangan yang besar. Potensi tambang yang menonjol hanya pada galian C berupa material tanah urug dan kerikil;
- c. Masih kurangnya komitmen dari struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan untuk memajukan ekonomi/ industri di daerah;

- d. Masih kurangnya kualitas SDM/ aparat, terutama kemampuan administratif, kejujuran dan integritas dari OPD dalam menjalankan manajemen fiskal daerah;
- e. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan cukup tinggi;
- f. Kurangnya peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAD TAHUN 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2019)	Sumber Data
Target PAD	Rp	193.954.302.747,12	206.419.405.625,90	106,42	204.508.576.776,21	LKjIP Bapenda Tahun 2020

Sumber : BPKAD Lombok Tengah LRA

Pencapaian target PAD yang cukup baik ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tiap - tiap SKPD berusaha maksimal untuk mencapai targetnya.
- b. Setiap bulannya dilakukan Rekonsiliasi dan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD.
- c. Adanya perjanjian kinerja tiap – tiap SKPD
- d. Melakukan sosialisasi dengan pihak pengusaha (WP dan WR), pihak aparat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa, kadus/ kaling
- e. Melakukan uji petik setiap bulannya terhadap obyek pajak hotel dan pajak restoran dikawasan wisata
- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pertemuan dengan Notaris (BPHTB)
- h. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait (POL PP, BPMP2T, Kepolisian,Kejaksaan dan BPKP)
- i. Melakukan Reklas (penyesuaian) NJOP PBB-P2

Sedangkan penghambat pencapaian target PAD tahun 2019 adalah :

- a. Tingkat kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel melati/homestay.
- b. Keterbukaan WP terhadap omzet penerimaan rendah
- c. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang TAX atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.
- d. WP mengeluhkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah menyebabkan tamu/konsumen tinggal sebentar.

- e. Masih banyaknya SPPT PBB P2 yang bermasalah.
- f. Pengakuan WP terhadap harga transaksi tanah cenderung lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya.
- g. Belum ada payung hukum yang menjelaskan aturan apakah hotel dan restoran yang tidak memiliki izin operasi dan izin lokasi untuk penarikan pajaknya.

Dokumentasi:



III.3. ANALISIS EFISIENSI

Definisi efisiensi dalam laporan ini adalah: suatu cara (usaha dan kerja) yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, tenaga dan biaya. Definisi ini didasarkan pada beberapa pendapat atau sumber sebagai berikut:

- Mulyadi (2007;63), efisiensi adalah: “ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan out put atau biaya dan keuntungan”
- Hasibuan (2005;233) yang mengutip pernyataan H. Emerson. “efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan out put (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan”

- Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003;178) , efisiensi dapat diartikan sebagai: “ Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (out put) barang dan jasa dengan masukan (input) yang angka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga biaya)”.
- Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. (wikipedia.org diakses tgl 07 Pebruari 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284) . Efisiensi adalah “ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).”

Analisis efisiensi yang disampaikan dalam laporan ini adalah efisiensi pada aspek-aspek yang bersifat umum dan lintas urusan/ OPD bukan analisis efisiensi per indikator kinerja. LKjIP Bupati Lombok Tengah adalah laporan pada level pengambil kebijakan yang bersifat lintas urusan/ OPD. Sedangkan analisis per indikator kinerja idealnya disampaikan pada laporan kinerja level pelaksana kebijakan yaitu tingkat kepala OPD. Analisis yang memaparkan sampel beberapa OPD bertujuan untuk memberikan gambaran riil kondisi pada sebagian OPD serta sebagai bahan dalam membuat kesimpulan secara induktif.

Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 secara kualitatif dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu. Hampir seluruh program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Hanya terdapat beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan dalam perubahan 2020 yang masa pengerjaannya melewati Tanggal 31 Desember 2020. Perpanjangan masa pengerjaan proyek ini masih dapat dilakukan karena kontrak yang bersifat “*multi years*”. Contoh: belum diselesaikannya pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah. Hal ini disebabkan kontrak akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020 serta kondisi dan dinamika lingkungan (cuaca, kelangkaan material, dll) yang terjadi selama proses pengerjaan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dari aspek tenaga dan biaya, kami sampaikan dengan menganalisis kondisi sumber daya manusia, aset, anggaran serta belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020
(kondisi per 31 Desember 2020)

NO	OPD	KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org)	JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org)	KEKURANGAN SDM	KETERANGAN	Sumber
1	BAPPEDA	57	49	8	<ul style="list-style-type: none">6 jabatan struktural (eselon dan non eselon)2 Jabatan fungsional perencanaan	LKjIP Bappeda Tahun 2020
2	BAPENDA	258	138	14	14 jabatan struktural pada sekretariat dan pada bidang teknis (eselon dan non eselon)	LKjIP Bappenda Tahun 2020
3	DINAS PERHUBUNGAN	126	44	4	4 jabatan struktural yaitu: Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020
				78	Pegawai pada seluruh bidang teknis	
4	DINAS PERKIM	85	59	26	Kekurangan pegawai pada bidang-bidang teknis (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2020
5	SET DPRD	58	54	4	4 jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP SET DPRD Tahun 2020
6	SAT POL PP	92	84	8	8 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Sat POL PP Tahun 2020
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	46	12	12 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2020
8	DINAS SOSIAL	50	28	22	22 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2020
9	INSPEKTORAT	170	70	100	Struktural : 10 (eselon dan non eselon) Fungsional : 90	LKjIP Inspektorat Tahun 2020
10	DP3AP2KB		60			LKjIP DP3AP2KB Tahun 2020
11	DPMPTSP		33			LKjIP DPMPTSP Tahun 2020
12	RSUD PRAYA		337			LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap OPD diketahui bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh OPD (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian OPD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan OPD lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh OPD terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengoptimalkan pegawai yang dimiliki saat ini untuk menutupi masalah kekurangan pegawai yang dialami. Pegawai yang ada saat ini telah digerakkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Artinya, selain melaksanakan Tupoksi yang dimiliki, para pegawai juga harus melaksanakan tugas-tugas lain diluar Tupoksi bahkan diluar jam kerja para pegawai.

B. Aspek Sumber Daya Aset

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Kondisi sarana prasarana (aset) merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung capaian kinerja. Pemanfaatan aset secara optimal dalam melaksanakan tugas merupakan bentuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seluruh aset yang dimiliki Pemkab memiliki nilai ekonomi yang semakin lama akan semakin menurun serta memerlukan biaya pemeliharaan/ perawatan secara rutin. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, suatu aset justeru dapat memberikan manfaat tambahan secara ekonomi maupun non ekonomi dan secara kuantitatif atau kualitatif bagi daerah. Suatu aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi. Gambaran pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 antara lain dipaparkan pada sebagian OPD sebagai berikut:

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ASET TAHUN 2020
(kondisi per 31 Desember 2020)**

NO	OPD	NILAI ASET (Rp.)	JUMLAH ITEM	ASET DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK DIGUNAKAN (%)	SUMBER
1	BAPPEDA	9.939.750.547,01	546	0	LKjIP Bappeda Tahun 2020
2	BAPPENDA	8.884.077.017,46		2.28	LKjIP Bappenda Tahun 2020
3	DINAS PERHUBUNGAN	42.946.973.360,00	1.890	0	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020
4	DINAS PERKIM	40.170.112.520	300	0	LKjIP Dinas Perkim Tahun 2020
5	SET DPRD	15.247.797.490,-	718	0	LKjIP Set DPRD Tahun 2020
6	SAT POL PP	6.600.712.210	153	0	LKjIP Sat POL PP Tahun 2020
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	369.795.600	7	0	LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020
8	RSUD PRAYA	219.390.625.666,75	1.495	0	LKjIP RSUD Praya Tahun 2020
9	DINAS SOSIAL	5.352.808,22	194	0	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2020
10	INSPEKTORAT	5.733.837.160,	252	0	LKjIP Inspektorat Tahun 2020
11	BAKESBANGPOLDAGR I	1.115.410.000,00	322	0	LKjIP Bakesbangpoldagri Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan hanya sebesar 2,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan

memanfaatkan aset secara optimal seluruh aset yang dimiliki dalam rangka mendukung capaian kinerja. Aset milik organisasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi.

C. Aspek anggaran dan belanja

Efisiensi anggaran dan belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari seberapa banyak penghematan yang dilakukan serta optimalisasi penggunaan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dalam masa pandemi covid 19 tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggara secara besar-besaran dalam rangka percepatan penganan pandemi tersebut menyebabkan azas pengelolaan keuangan daerah yang efisien menjadi sulit terukur. Namun demikian dapat kami sampaikan beberapa bentuk efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Efisiensi tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun 2011: 0,52 Milyar, Tahun 2012: 20,34 Milyar, Tahun 2013: 9,59 Milyar , Tahun 2014: 8,8 Milyar, Tahun 2015:13,91 Milyar , Tahun 2016:19,47 Milyar, Tahun 2017: 20,61 Milyar, Tahun 2018: 19,15 Milyar Tahun 2019: 18, 95 Milyar Tahun 2020: 9,1 Milyar

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

- HPS : Rp.153.155,42 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.142.642,6 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 518,45 Juta

Tahun 2020

- HPS : Rp.50,320.7 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.44,140.61 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 125,32 Juta

Sumber: Si Mandalika Report, <https://lpse.lombotengahkab.go.id>, diunduh
Tanggal 15 Maret 2020

3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 95,14 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 99,63%). Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolakkarena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh OPD terkait (Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan. Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2020 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pagu dana : Rp. 1.670.244.455.243.

-
- Realisasi
 1. Keuangan : Rp. 1.589.147.357.509.
 2. % keuangan : 95,14
 3. % Fisik : 99,63
 - Sisa dana/ efisiensi : Rp. 81.097.097.734.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP), penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa. Maksud TP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan TP adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu pembangunan daerah dan desa. Selain itu, TP dimaksudkan pula untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing kementerian/Lembaga/Direktorat Jendral melalui kementerian keuangan Republik Indonesia berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah. Demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemberi tugas pembantuan.

III.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 pada mulanya bersumber dari dua kementerian yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 706.000.000. Namun karena pandemi covid 19, dilakukan revisi pengurangan pagu anggaran yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan

menjadi Rp. 542.890.000 dan Tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Perdagangan di tunda pelaksanaannya dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Adanya double sumber anggaran untuk revitalisasi pasar Bonjeruk yaitu dana yang bersumber dari APBN melalui dana tugas pembantuan direncanakan untuk pembangunan kios yang merupakan bangunan penunjang, dan dana yang bersumber dari APBD direncanakan untuk pembangunan Los pasar yang merupakan bangunan prioritas yang roboh akibat bencana angin puting beliung. Anggaran pembangunan los pasar dihapus akibat refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan.
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) direncanakan untuk pembangunan los pasar Bonjeruk tidak dapat diakomodir sehingga berpengaruh terhadap pembangunan kios yang direncanakan melalui dana tugas pembantuan 2020 tidak dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dimasyarakat.

Untuk lebih jelasnya rincian pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA TAHUN 2020

N O	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROG,KEG,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKAS I	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISA SI ANGGAR AN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kementerian Ketenagakerjaan	DIPA No. 026.04.4.239248/2020 (Revisi ke 2 tanggal 8 Juni 2020)	Program Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Kegiatan: Pengembangan dan Peningkatran Perluasan kesempatan kerja Keluaran: 1.jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya 20 orang 2. Jumlah Calon Wirausaha Baru yang diberdayakan sejumlah 140 orang	Kab. Lombo k Tenga h	542890000	537865 900	99,0 7	1.jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya 20 orang 2. jumlah Calon Wirausaha Baru yang diberdayakan sejumlah 140 orang	100

III.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN

Pada tahun 2020 tidak terdapat tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok Tengah.

III.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan program pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga kerja tidak terdapat hambatan/permasalahan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

IV.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

IV.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

- Pendidikan Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

IV.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pendidikan tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	58.459	Orang	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	172.808	Orang	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	225.069	Orang	100

IV.1.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2019 :

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	58.459	33.840	ORANG	
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	172.808	153.509	ORANG	

LPPD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	225.069	192.344	ORANG	
---	---	---------	---------	-------	--

IV.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Untuk tahun Anggaran 2020 adalah :

NO	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1	Pendidikan Usia Dini	58.459	Orang	0	429.600.000
2	Pendidikan Dasar	172.808	Orang	0	103.864.293.000
3	Pendidikan Kesetaraan	225.069	Orang	0	101.400.000

IV.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

No	Jenis /Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27
	e. IV b	12
2.	Jabatan Fungsional	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	3.906
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	1.846
	(2) Golongan III	1.664
	(3) Golongan II	396
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	59
	(3) S1/D4	3.788
	(4) D3	4
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	147
	(1) IV	15

No	Jenis /Kualifikasi	Jumlah
	(2) III	95
	(3) II	35
	(4) I	2
	b. Pendidikan	147
	(1) S3	1
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	78
	(4) D3	5
	(5) D2	1
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	48
	(8) SMP Sederat	3
	(9) SD Sederajat	3

IV.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- 1) Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
- 2) Meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah akibat perkawinan dini terutama pada satuan pendidikan SMP
- 3) Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19

Solusi:

- 1) Melaksnakan pembelajaran dengan system guru kunjung pada tempat kegiatan belajar (TKB) siswa secara berkelompok dengan peserta pembeljaran tidak lebih dari 10 orang siswa
- 2) Melalui Kementerian Pendidikan memberikan bantuan Kuota Internet untuk guru dan siswa untuk mengurangi beban orang tua terhadap biaya pendidikan
- 3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

IV.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

IV.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

IV.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten dalam penerapan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	Orang	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	Orang	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	Orang	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72.756	Orang	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	Orang	100%
6	Pelayana Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596.857	Orang	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	Orang	100%
8	Pelayan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	Orang	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetesmellitus</i> yang mendapatkan layanan	47.311	Orang	100%

		kesehatan			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	Orang	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	Orang	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	Orang	100%

IV.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	21.244	Orang	99%
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	20.370	Orang	100%
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	20.185	Orang	104%
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72.756	50.672	Orang	70%
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	69.274	Orang	80%
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596.857	68.759	Orang	12%
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	7.607	Orang	9%
8	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	40.464	Orang	23%
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetesmellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	47.311	848	Orang	2%
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	974	Orang	39%
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	1.854	Orang	11%
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	15.042	Orang	29%

IV.2.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. :

NO	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	Orang	18.041.500,-	0,-
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	Orang	0,-	3.752.018.000,-
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	Orang	18.041.500,-	0,-
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72.756	Orang	18.041.500,-	0,-
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	Orang	0,-	0,-
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596.857	Orang	0,-	0,-
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	Orang	10.000.000,-	0,-
8	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	Orang	15.195.625,-	0,-
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	47.311	Orang	7.979.700,-	0,-
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	Orang	5.195.625,-	0,-
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	Orang	5.445.000,-	0,-
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	Orang	16.245.000,-	0,-
	Jumlah				

IV.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2020, didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
----	---------------------	--------

1	Eselon	80
	a. II b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	44
	e. IV.b	30
2	Jabatan Fungsional	23
	a. Sanitarian Ahli Madya	4
	b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya/Masyarakat Madya	3
	c. Perawat Muda / Ahli Muda	1
	d. Bidan Penyelia	1
	e. Sanitarian Ahli Muda	1
	f. Nutrisionis Muda	1
	g. Nutrisionis Penyelia	2
	h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2
	i. Sanitarian Ahli Muda	3
	j. Perawat Pelaksana lanjutan	2
	k. Sanitarian Ahli Pertama	1
	l. Sanitarian mahir / pelaksana Lanjutan	1
	m. Perawat Pelaksana	1
3	Pangkat / Golongan	1108
	a. IV	90
	b. III	821
	c. II	192
	d. I	5
4	Jenjang Pendidikan	1108
	a. S3	0
	b. S2	29
	c. S1/DIV	466
	d. D III	450
	e. SMA Sederajat	156
	f. Paket A	7

IV.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

IV.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis layanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokokair minumsehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahanairlimbah domestik

IV.3.2 Target Pencapaain SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan perumahan dan pekerjaan umum tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokokair	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	%	100

	minum sehari-hari				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.136 50	KK (TS) KK (IPAL)	100 100

IV.3.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun Anggaran 2020 :

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan bukan jaringan perpipaan terlindungi	80	78,16	%	97,70
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.136 50	3.136 50	KK (TS) KK (IPAL)	100 100

IV.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang mendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada pada Bidang Cipta Karya dengan Program pengembangan pengelolaan air minumdi Kegiatan penyediaan sarana air bersih bagi Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 15.540.468.750 setelah APBD perubahan dan sebesar Rp. 14.630.468.750 APBD yang terdiri dari Dana DAK dan DAU dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ DAK Reguler : Rp. 3.541.000.000
- ❖ DAK Penugasan : Rp. 2.562.300.000
- ❖ DAK Afirmasi : Rp. 1.232.900.000

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	%	17.329.350.000	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.136 50	KK (TS) KK(IPAL)	21.952.000.000	600.000000

IV.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 253 orang dan 93 orang status NON-PNS, terdiri dari 25 % teknis dan 75 % Non Teknis yang penempatannya sebagai berikut :

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II. b	1
	b. III. a	1
	c. III.b	4
	d. IV. a	17
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	a.	-
	b.	-
	c.	-
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	3
	b. III	63
	c. II	163
	d. I	24
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S3	0
	b. S2	13
	c. S1/DIV	39
	d. SM / D.I / D.III	1
	e. SMA Sederajat	160
	f. SMP Sederajat	23
	g. SD Sederajat	17

IV.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :**a. Tangki Saptik :**

- 1) Masyarakat yang belum memiliki MCK biasanya berdomisili di daerah terpencil sehingga susah diakses kendaraan tangki tinja (roda 3)
- 2) Kesadaran masyarakat untuk memelihara masih kurang.
- 3) Akses air bersih di Kabupaten Lombok Tengah belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa tempat.

b. IPAL :

- 1) Kesulitan lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk.
- 2) Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya.
- 3) Lokasi lahan di bagian hilir pemukiman dan tidak ada akses jalan untuk dropping material maupun penyedotan lumpur tinja.
- 4) Kesadaran Masyarakat pengguna untuk merawat greas trap maupun bak control masih kurang.
- 5) Iuran di pengguna banyak yang tidak berjalan sehingga pada saat ada yang rusak tidak bisa di perbaiki.

Solusi :**a. Tangki Saptik :**

- 1) Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa di lewati kendaraan roda 3.
- 2) Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola fikir.
- 3) Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi.

b. IPAL :

- 1) Lahan kalau bisa di fasilitasi pihak desa atau daerah mengingat dibeberapa tempat sangat membutuhkan.
- 2) Penggunaan jalan lingkungan sepanjang akses lalu lintas bisa di alihkan atau ada alternative akses jalan masyarakat.
- 3) Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat teredukasi.
- 4) Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) IPAL dilakukan secara berkala dan terjadwal sehingga kinerja IPAL tetap bisa di control.

- 5) Desa memperbanyak akses jalan ke pemukiman masyarakat.

IV.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

IV.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang meperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni

IV.4.2 Target Pencapaain SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada table berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24.218	KK	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	120	Orang	100%

IV.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada table berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24.218	24.136	KK	99.66
2	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	120	120	Orang	100%

Alokas

IV.4.4 Anggaran

Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2020 adalah :

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	24.218	KK	-	473.380.000.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah	120	Orang	Rp. 600.000.000	-
	Jumlah	120		Rp.600.000.000	-

IV.4.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah Sebagai Berikut:

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON <ul style="list-style-type: none"> a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 3 11 -
2	JABATAN FUNGSIONAL	0
3	PANGKAT/GOLONGAN <ul style="list-style-type: none"> a. IV b. III c. II d. I 	<ul style="list-style-type: none"> 3 36 19 1
4	JENJANG PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"> a. S2 b. S1/DIV c. DIII d. SMA sederajat e. SLTP Sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> 4 30 - 22 2

Sumber Daya Manusia pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Dinas Teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum mmeadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis sebanyak 70%, perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % untuk tenaga teknis dan 30% non teknis.

IV.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota .
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungannya.

Solusi :

- 1) Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Lombok Tengah selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah .
- 2) Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan dan permukiman

IV.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

IV.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenil layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana

- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

IV.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Lombok Tengah dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PERSENTASE
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	270	Kasus	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	±20.000	orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	orang	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	orang	100
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	108	orang	100

IV.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	270	40	Kejadian(orang)	14,81
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	20.000	20.000	Orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	0	0	Orang	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	Orang	0

5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	108	108	Orang	100
---	--	-----	-----	-------	-----

IV.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	270	Kejadian(orang)		
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	20.000	Orang	35.000.000	0
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	Orang	48.867.000	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	Orang	159.884.500	0
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	108	Orang	988.674.200,00	

IV.5.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penaggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

**Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Keadaan 31 Desember 2020**

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3
	d. IV.a	15
	e. IV.b	-
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	a. Pelaksana	18
	b. Pertama	8
	c. Muda	1
3	PANGKAT/GOLONGAN:	
	a. IV	7
	b. III	33

	c. II	39
	d. I	2
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a. S3	-
	b. S2	5
	c. S1/DIV	30
	d. DIII	1
	e. SMA sederajat	41
	f. SLTP	3
	g. SD	1

Berdasarkan tabel tersebut diatas total pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 81 orang, dimana secara keseluruhan merupakan ASN. Akan tetapi dalam menjalankan tugas ketentraman dan ketertiban umum personil Satpol PPjuga terdiri dari anggota yang bukan ASN yang tersebar di 12 kecamatan dan di lokasi lokasi strategis pemda yang membutuhkan pengamanan. Jumlah total personil yang non ASN adalah 366 orang. Selain itu dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja juga dibantu oleh 4 orang personil yang tergabung dalam jabatan fungsional dan merangkap sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki fungsi melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap orang/badan yang pelanggaran yustisi maupun non yustisi.

**Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Keadaan 31 Desember 2020**

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON:	
	f. II.b	1
	g. III.a	1
	h. III.b	3
	i. IV.a	8
	j. IV.b	-
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	d. Pelaksana	-
	e. Pertama	-
	f. Muda	-
3	PANGKAT/GOLONGAN:	
	e. IV	3
	f. III	16
	g. II	34
	h. I	3
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	h. S3	-
	i. S2	1

j.	S1/DIV	17
k.	DIII	-
l.	SMA sederajat	35
m.	SLTP	3
n.	SD	-

IV.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Satauan Polisi pamong Praja

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada. Berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan tersebut disebabkan karena terjadinya pengurangan anggaran/refocusing dan titik perhatian personil Sat pol PP terpusat kepada sosialisasi protokoler covid dan kegiatan razia masker secara intens.;
- 2) Kurangnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mempengaruhi juga terhadap kinerja Sat pol PP yaitu dalam hal melakukan penanganan terhadap pelanggaran Perda/Perkada;
- 3) Dalam hal melakukan patroli, regu yang ada di kecamatan tidak memiliki sarana yang memadai, masih melakukan secara sendiri sendiri (dengan sarana sepeda motor), sehingga masih belum efektif melakukan sebanyak 3 kali dalam sehari seperti yang ditargetkan dalam SPM, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Untuk itu agar lebih efektifnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan patroli siaga yang dilakukan di masing masing kecamatan.;

Adapun solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran Perda/Perkada secara optimal;
- 2) Adanya penambahan jumlah PPNS yang memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Perda/Pderkada dan gangguan trantibum;
- 3) Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi patroli yang dilakukan oleh regu anggota kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai
- 2) Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah
- 3) Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan
- 4) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi.
- 5) Kurang/ minimnya dukungan Anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga Kebencanaan.
- 6) Belum memadainya/ masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Adapun solusi sebagai berikut:

- 1) Perlunya penyusunan buku daerah rawan bencana lengkap dengan regulasinya
- 2) Perlunya diklat aparatur dan Sosialisasi/ Pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana
- 3) Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana
- 4) Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana
- 5) Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan
- 6) Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana.

IV.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

IV.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- 3) Reehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

IV.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	SATUAN	PERSENTASE
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	4.614	orang	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh sosial diluar panti	4.390	orang	100
3	Reehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	19.002	orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	186	orang	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	457	orang	100

IV.6.3 Realisasi

Realisasi Capaian masing – masing Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
1.	Jumlah warga negara penyandang	4.614	2.471	Orang	18,07

	disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
2.	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	4.390	1.054	Orang	24,00
3.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	19.002	406	Orang	2,14
4.	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	186	82	Orang	44,08
5.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	457	457	Orang	100

IV.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran			Ket.
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)	Sumber Dana Lain Yg Sah (Rp.)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	2.471	Orang	295.470.350	-	-	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1.054	Orang	34.500.500	-	-	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	406	Orang	295.470.350	-	-	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	82	Orang	34.500.500	-	-	
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	457	Orang	348.075.000	-	-	

IV.6.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
----	-------------------	--------

1.	ESELON : a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	 1 1 2 11 -
2.	JABATAN FUNGSIONAL a. - b. - c. -	 - - -
3.	PANGKAT/GOLONGAN : a. IV b. III c. II d. I	 4 17 7 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA Sederajat f. Paket A	 - 3 16 1 8 -

Kondisi personil pada Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal belum memadai dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan, terutama untuk tenaga pelaksana atau staf. Pada masing-masing Bidang kekurangan tenaga pelaksana seperti pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang mempunyai 1 orang tenaga pelaksana padahal Bidang ini ada 3 seksi yang menangani permasalahan Sosial(Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Korban Perdagangan Orang (berkaitan dengan penanganan kasus hukum ataupun lainnya). Kondisi lain terkait juga dengan kebutuhan tenaga pelaksana yang berlatarbelakang pendidikan profesi kesejahteraan Sosial dan IT (Komputer).

IV.6.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Beberapa indikator masih belum mencapai target
- 2) Kurangnya sumber daya manusia/aparatur dalam upaya percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 3) Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional

- 4) Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan
- 5) Kurangnya koordinasi antar sektor
- 6) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang SPM bidang sosial.

Solusi :

- 1) Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan tehnis.
- 2) Pengelokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 3) Secara bertahap menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional
- 4) Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal.
- 5) Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

IV.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 pada tiap-tiap bidang urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

IV.7.1 SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Dasar	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Pembangunan gedung sekolah SD/MI	4.919.045.500
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	1.442.250.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	6.833.266.500
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	514.622.864
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	67.540.000
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	15.655.000
			Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI	570.990.000
			Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs	6.089.649.200
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	4.819.570.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan	6.609.870.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
			sekolah SMP/MTs	
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	39.549.500
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	20.000.000
			Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	388.401.250
			Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar	208.075.000
			Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	50.000.000
			Pembinaan Dewan Pendidikan	74.600.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000
			Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	81.000.000
			Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan	137.450.000
			Dukungan operasional UPT Dinas Pendidikan	127.280.700
			Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	47.322.550
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	80.207.293.000
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	23.657.000.000
2	Pendidikan Kesenjangan	Pendidikan Non Formal	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	890.000.000
			Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan	101.400.000
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung sekolah	3.263.494.381
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.652.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	2.423.930.919
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	108.880.000
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.200.000.000
			Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	429.600.000

IV.7.2 SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal)	3.452.018.000,-

3	PelayananKesehatan Bayi BaruLahir	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
5	PelayananKesehatanpada Usia PendidikanDasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0,-
6	PelayanaKesehatanpada Usia Produktif	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0,-
7	PelayananKesehatanpada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi lansia	10.000.000,-
8	PelayanKesehatan padaPenderitaHypertensi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	15.195.625,-
9	PelayananKesehatan Penderita DiabetesMilitus	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	7.979.700,-
10	PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	5.195.625,-
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.445.000,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	16.245.000,-

IV.7.3 SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat	Rp. 17.158.130.000
			Perencanaan pengembangan Keciptakaryaan	Rp. 171.220.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	23.665.514.700

IV.7.4 SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah	-	Belanja Tidak Langsung BPKAD dengan Akun Belanja Bantuan Sosial	Rp.600.000.000
	JUMLAH			Rp.600.000.000

IV.7.5 SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	490.000.000
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	83.867.000
			kegiatan operasional dan pemeliharaan pusdatin dan pusdalops	16.540.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan pemberdayaan kapasitas forum PRB	0
			Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat	0
			Fasilitasi dan stimulasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam	192.646.500
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	63.360.000
		Pembinaan dan Penanganan daerah rawan kekeringan (penyaluran air bersih	Pembinaan dan Penanganan daerah rawan kekeringan (penyaluran air bersih	79.984.500
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran	27.946.200
			Peningkatan pelayanan	946.328.000

			penanggulangan bahaya kebakaran	
			Kesamaptan petugas PMK	14.400.000

IV.7.6 SPM BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberian bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	295.470.350
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	34.500.500
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberian bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	295.470.350
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	34.500.500
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan maslah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	348.075.000

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar walaupun dalam suasana pandemi covid-19 yang mengharuskan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi tersebut. Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis pencapaian target akhir RPJMD 2016-2021.

APBD Tahun Anggaran 2020 telah dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran indikator pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan IPM, peningkatan kinerja aparatur Pemerintah. Namun demikian akibat pandemi *covid 19* menyebabkan beberapa indikator makro mengalami penurunan yaitu laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita masyarakat.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, TNI/Polri, lembaga adat serta seluruh masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan pada tahun 2020 dalam suasana pandemi *covid 19*, masih terdapat kekurangan dan masih banyak impian yang belum tercapai serta belum dapat memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat Lombok Tengah, maka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan upaya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang “BERSATU” (Beriman, Sejahtera, dan Bermutu).